

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum Penyusunan LAKIP

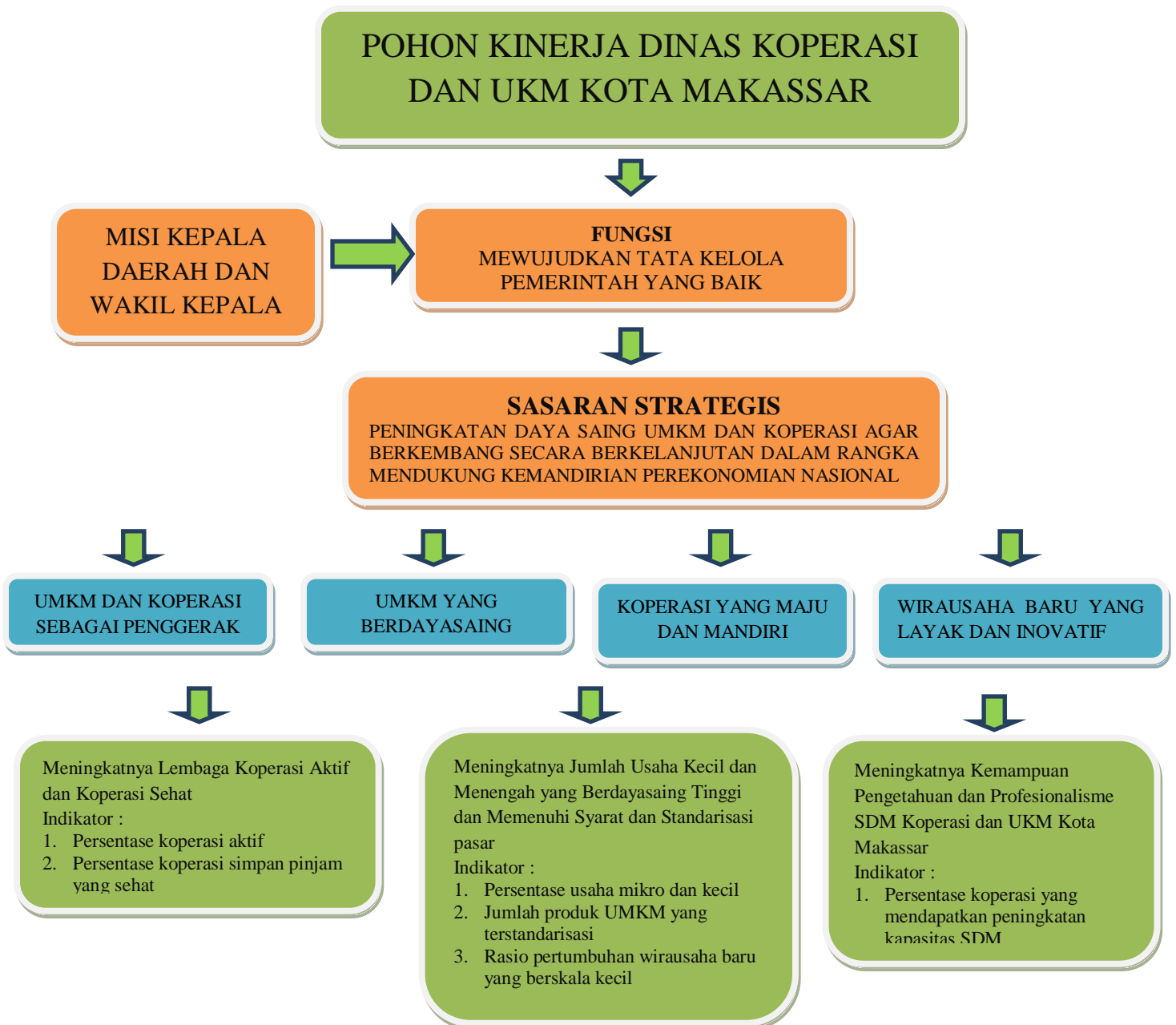
Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Koperasidan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar Tahun 2021 adalah sebagaiberikut :

1. Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Cascading Kinerja

Cascading didefinisikan sebagai proses penurunan (memancar ke bawah menjadi lebih detail), dengan kaitan yang jelas antara umum dan yang detail. Atau proses top-down menghubungkan SS, IKU, IS antara level organisasi tertinggi dan level

dibawahnya hingga individu. Atau bisa juga diartikan Cascading merupakan proses penjabaran sasaran strategis ,indikator kinerja utama (IKU) dan target kinerja organisasi secara vertical dan horizontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam organisasi. Adapun terdapat 3 jenis Cascading dalam organisasi yaitu full cascade, partial/sharing cascade, dan contributing cascade. Full cascade yaitu menurunkan secara penuh sasaran strategis ,IKU dan target hinggake unit kerjayang lebih rendah. Partial/sharing cascade yaitu menurunkan secara sama antara unit yang lebih tinggi dan rendah akan tetapi besaran target IKU berbeda, sedangkan contributing cascade menurunkan sasaran strategis , IKU dan target unit kerja yang lebih tinggi serta relevan dengan IKU unit yang lebih tinggi. Berikut ini Pohon Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar :



1.3. Mandat Kinerja, Proses Bisnis, dan Struktur Organisasi

Mandat kinerja memberikan kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Adapun tujuan pelaporan kinerja sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sedangkan proses bisnis adalah tentang langkah-langkah yang tepat memainkan peran penting dalam memberikan penawaran kepada pelanggan. Karena keberhasilan bisnis adalah tujuan akhir bagi setiap wirausahawan meskipun satu langkah yang salah dapat menjadi masalah besar dan mungkin menghabiskan banyak anggaran untuk memperbaiki kesalahan tunggal itu. Itulah mengapa pentingnya merencanakan dan merancang proses bisnis agar seluruh alur berjalan dengan benar.

Proses bisnis selalu memainkan peran penting dalam berfungsinya organisasi dan strukturnya. Proses terencana dan strategis akan membantu usaha-usaha dengan cara berikut :

- **Pengurangan pengeluaran dan resiko** : sebuah proses terencana dan baik akan mengurangi pengeluaran dan resiko dengan meletakkan cara-cara yang paling efisien untuk melakukan pekerjaan dengan mempertimbangkan potensi kekurangan di masa depan;
- **Mengurangi kesalahan manusia** : mengurangi kesalahan manusia atau human error dengan mendistribusikan tugas kepada orang-orang yang berspesialisasi di dalamnya;
- **Meningkatkan efisiensi** : meningkatkan produktivitas departemen dengan memetakan hal yang harus dilakukan dan langkah relevan yang terbaik untuk bisnis;

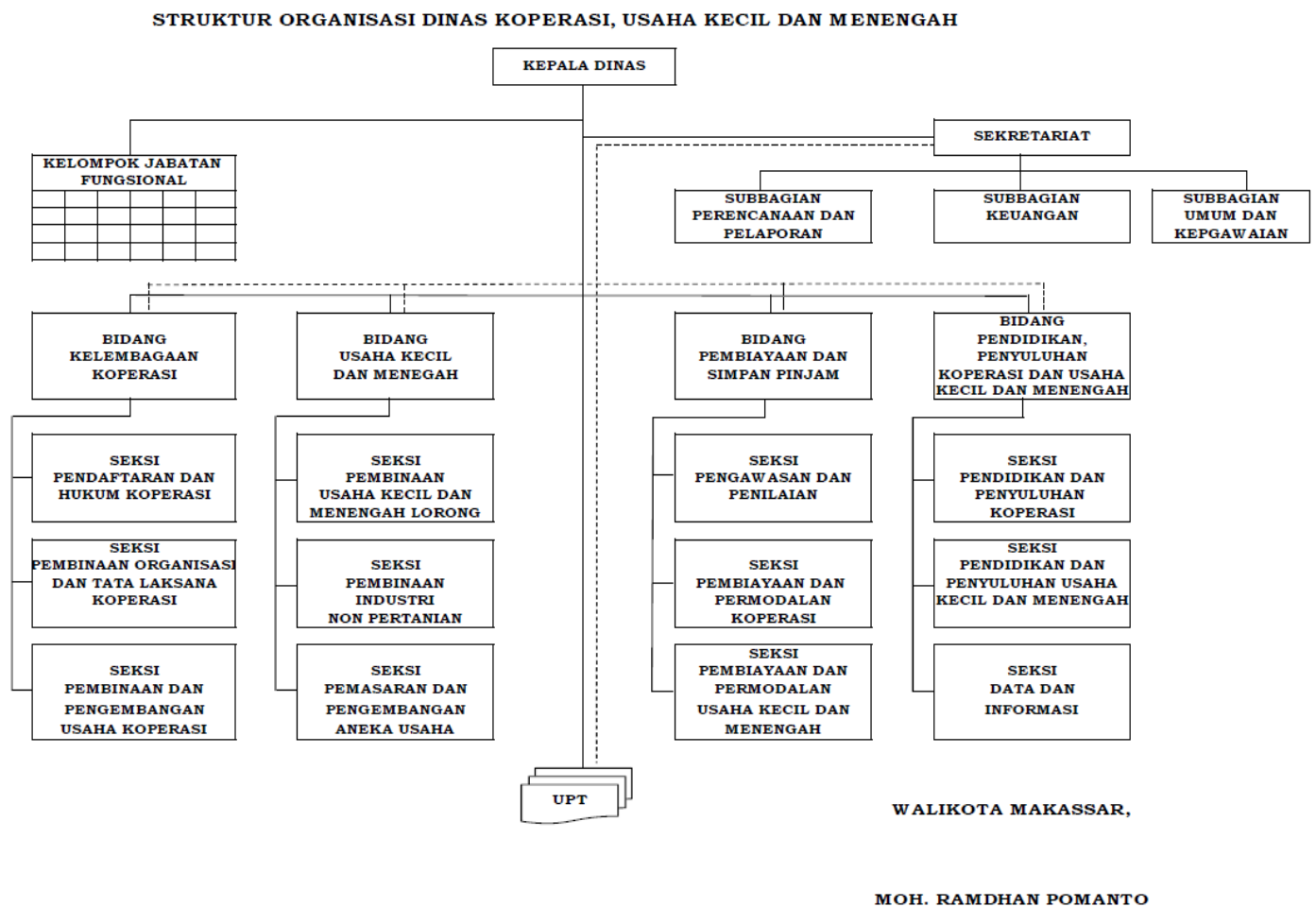
- **Lebih fokus pada pelanggan** : Proses yang baik adalah langkah yang berorientasi pelanggan. Ini terus memperbaiki perusahaan tentang keinginan pelanggan dan ulasan tentang produk/layanan;
- **Menjembatani kesenjangan komunikasi** : Menjembatani kesenjangan komunikasi antara perusahaan dan pelanggannya melalui ulasan dan riset pasar;
- **Manajemen waktu yang lebih baik** : Proses yang benar juga akan meningkatkan efisiensi waktu dengan mengembangkan strategi dan diagram alur untuk meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas tertentu;
- **Adaptasi teknologi baru** : Proses ini seringkali terus berubah dan meningkat seiring waktu. Perusahaan mengadopsi teknologi baru untuk tetap berdiri tegak dengan meningkatkan proses bisnis sesuai dengan teknologi terbaru.

Prinsip diatas hanya dapat dicapai jika semua prinsip dan metode dipetakan secara optimal dan standard. Perusahaan yang gagal melakukannya akan menghadapi masalah berikut :

- **Kegagalan mengenali masalah apa pun** : perusahaan yang tidak focus pada proses bisnisnya akan sering gagal mengenali masalah sebenarnya yang mencegahnya mencapai tujuan karena ketidakmampuannya untuk menetapkan proses standard;
- **Motivasi rendah pada karyawan** : karena tidak adanya proses yang kompeten dan jelas, karyawan perusahaan akan kehilangan motivasi karena mereka mungkin ditempatkan di departemen yang pengetahuannya tidak cukup;
- **Kurangnya implementasi perubahan** : perusahaan akan sering mengulangi kesalahan yang sama berulang kali karena tidak akan ada system untuk mengenali masalah dan menerapkan perubahan dalam prosesnya;
- **Upaya yang memakan waktu** : tanpa diagram alur dan alur kerja yang tepat, pekerjaan tertentu akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk diselesaikan daripada biasanya;
- **Efisiensi yang lebih rendah** : jika ada proses yang tepat dan sesuai kebutuhan maka perusahaan tidak dapat produktif dan efisiensinya akan lebih rendah daripada perusahaan dengan proses yang lebih baik. Proses yang baik meningkatkan efisiensi dengan menyusun langkah-langkah dan kemungkinan cara untuk melakukan tugas;

- **Resiko tinggi dan pengeluaran yang meningkat** : perusahaan yang tidak memiliki proses yang terencana dan tidak memadai seringkali gagal untuk melihat resiko di masa depan dan mereka juga tidak kompeten untuk menemukan cara yang hemat biaya untuk melakukan suatu tugas.

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi UKM Kota Makassar sebagai berikut :



1.4. Tugas,Fungsi dan Peta Jabatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016); dan Peraturan Walikota Kota Makassar 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi dan UKM(Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 98 Tahun 2016) maka Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan dibidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang koperasi,

Usaha kecil dan Menengah;

2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
3. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan Pelaksanaan administrasi Dinas urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dengan Peraturan Daerah ini maka kedudukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2016 terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri atas :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
 - b. Subbagian Keuangan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Kelembagaan Koperasi terdiri atas :
 - a. Seksi Pendaftaran dan Hukum Koperasi
 - b. Seksi Pembinaan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Koperasi
4. Bidang Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas :
 - a. Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah Lorong
 - b. Seksi Pembinaan Industri Non Pertanian
 - c. Seksi Pemasaran dan Pengembangan Aneka Usa
5. Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam terdiri atas :
 - a. Seksi Pengawasan dan Penilaian
 - b. Seksi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi
 - c. Seksi Pembiayaan dan Permodalan Usaha Kecil dan Menengah
6. Bidang Pendidikan dan Penyuluhan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - a. Seksi Pendidikan dan Penyuluhan Koperasi
 - b. Seksi Pendidikan dan Penyuluhan Usaha Kecil Menengah
 - c. Seksi Data dan Informasi
7. Kelompok Jabatan Fungsional

8. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Adapun fungsi masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut :

1. **Sekretariat** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan dinas. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 1. perencanaan operasional urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 2. pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 3. pengoordinasian urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 4. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya
2. **Subbagian Perencanaan dan Pelaporan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas, Subbagian Perencanaan dan pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - d. menghimpun bahan dan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) dinas;
 - e. menghimpun bahan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinas;

- f. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
 - g. menghimpun, memaduserasikan dan menyiapkan bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dari setiap bidang untuk dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait;
 - h. menghimpun dan menganalisa data pelaporan kegiatan dari setiap bidang sebagai bahan evaluasi;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - j. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - k. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - l. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - m. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- 3. Subbagian Keuangan** mempunyai tugas melakukan administrasi dan akuntansi keuangan. Dalam melaksanakan rencana dan program kerja Subbagian Keuangan;
- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbagian Keuangan;
 - b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Keuangan;
 - c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Keuangan;
 - d. melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan di

lingkup dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. meneliti dan memverifikasi kelengkapan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan dokumen pencairan anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menyiapkan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) lingkup dinas;
- g. menyusun segala bentuk pelaporan keuangan lingkup dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- i. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- k. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- d. mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku;
- e. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup dinas;
- f. meminta dan menganalisa rencana kebutuhan barang unit dari setiap bidang;
- g. membuat daftar kebutuhan barang dan rencana tahunan barang unit;
- h. menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan barang;
- i. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian barang di lingkup dinas;
- j. melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang inventaris Daerah;
- k. melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler dinas;
- l. menghimpun bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dinas;
- m. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- o. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- p. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- q. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- r. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

5. Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan, manajemen dan usaha koperasi. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kelembagaan Koperasi menyelenggarakan fungsi :

- 1. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Kelembagaan Koperasi;

2. menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Kelembagaan Koperasi;
 3. mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Kelembagaan Koperasi;
 4. menyusun bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, manajemen dan usaha koperasi;
 5. menyusun bahan bimbingan dan pengendalian teknis proses Pendirian dan Pengesahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi;
 6. menyusun bahan bimbingan dan pengendalian teknis proses pengajuan Badan Koperasi Baru/Perubahan Anggaran Dasar, penggabungan dua atau lebih koperasi yang sejenis (amal gamasi) dan pembubaran koperasi sampai selesai Surat Keputusan Penutupan;
 7. menyusun bahan bimbingan teknis kegiatan kerjasama antar koperasi, pengusaha kecil, menengah dan badan-badan usaha lainnya dalam rangka pengembangan organisasi;
 8. menyiapkan bahan bimbingan teknis kegiatan pemberian bantuan hukum antar koperasi dalam penyelesaian/persengketaan hukum antar koperasi atau alat-alat perlengkapan organisasi;
 9. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 10. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 11. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 12. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 13. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 14. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
6. **Seksi Pembinaan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan administrasi, organisasi dan usaha koperasi serta perangkat koperasi. Dalam

melaksanakan tugas, Seksi Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi :

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pembinaan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi;
 - b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pembinaan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi;
 - c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pembinaan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi;
 - d. melakukan pembinaan administrasi, organisasi dan usaha koperasi;
 - e. memberikan bimbingan teknis kepada koperasi tentang fungsi dan tugas perangkat-perangkat organisasi koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam;
 - f. mengatur dan membimbing kerja sama antar koperasi, pengusaha kecil menengah dan badan-badan usaha lainnya dalam rangka pengembangan organisasinya;
 - g. memberikan bantuan hukum kepada koperasi dalam penyelesaian/persengketaan hukum antar Koperasi atau alat-alat perlengkapan organisasi;
 - h. melakukan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi dan tata laksana pada koperasi;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - j. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - k. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - l. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - m. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
7. **Seksi Pendaftaran dan Hukum Koperasi** mempunyai tugas menyusun rencana pembinaan Koperasi, dan pemrosesan pengesahan Badan Hukum, Amalgamasi,

pembubaran koperasi serta mengevaluasi pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan sebagai bahan laporan. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pendaftaran Hukum Koperasi menyelenggarakan fungsi :

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pendaftaran dan Hukum Koperasi;
- b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pendaftaran dan Hukum Koperasi;
- c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pendaftaran dan Hukum Koperasi;
- d. menyiapkan bahan perumusan pembinaan Koperasi sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- e. mengumpulkan dan mengolah data koperasi sebagai bahan pembinaan dalam rangka penerangan, penyuluhan dibidang pendaftaran dan hukum;
- f. melakukan konsultasi dan bimbingan teknis dalam pemberian pelayanan pendaftaran dan hukum kepada koperasi;
- g. melakukan bimbingan dan registrasi usul pendirian, perubahan anggaran dasar, amal gamasi dan pembubaran koperasi;
- h. menyiapkan Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar serta Pembubaran Koperasi;
- i. meneliti dan menginventarisir koperasi yang aktif dan tidak aktif untuk pembinaan;
- j. melakukan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Tahunan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- n. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada

atasan;

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

8. Seksi Pembinaan Usaha Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan bidang kelembagaan dan usaha Koperasi Perkotaan Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pembinaan Usaha Koperasi menyelenggarakan fungsi :

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Koperasi;
- b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Koperasi;
- c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Koperasi;
- d. menyusun, mengelola data dan mengklarifikasi usaha koperasi;
- e. menganalisa dan mengevaluasi data teknis jenis usaha koperasi;
- f. mempersiapkan pelaksanaan usaha;
- g. mengerahkan koperasi yang bergerak di bidang perkotaan dalam mengembangkan usahanya melalui proses produksi dan kemitraan;
- h. memberi motivasi, mengarahkan koperasi untuk meningkatkan usahanya melalui fasilitas permodalan dari Bank, Badan Usaha Milik Negara atau lembaga lainnya;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- k. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- l. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

9. Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah dibidang industri pertanian, industri non-pertanian, perdagangan aneka usaha sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Usaha Kecil dan Menengah;
- b. menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Usaha Kecil dan Menengah;
- c. mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Usaha Kecil dan Menengah;
- d. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah;
- e. menyusun rencana dan program pembinaan pengusaha kecil mikro melalui pengelompokan usaha di wilayah tertentu dalam Kota Makassar;
- f. menyusun bahan penyusunan rencana dan program penyusunan proyeksi perkembangan pengusaha kecil, tangguh, unggul, mandiri dan menengah bidang industri pertanian, perdagangan dan aneka usaha;
- g. menyusun bahan bimbingan teknis pengidentifikasian pengusaha kecil, tangguh, unggul mandiri dan menengah bidang industri pertanian, industri non pertanian, perdagangan dan aneka usaha;
- h. menyusun bahan bimbingan teknis peningkatan wawasan dan keterampilan pengusaha kecil dan koperasi melalui pelatihan, magang, studi banding dan pameran;
- i. menyusun bahan bimbingan teknis kerjasama dalam kemitraan jaringan usaha antara kecil dan menengah dalam rangka kemitraan dan jaringan usaha;
- j. menyusun bahan bimbingan teknis pembinaan pengusaha kecil dan menengah dibidang perdagangan dan aneka usaha;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam

melaksanakan tugas;

- m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- n. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

10. Seksi Industri Non-Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan pengusaha kecil dan menengah bidang industri non pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Industri Non-Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pembinaan Industri Non Pertanian;
- b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pembinaan Industri Non Pertanian;
- c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pembinaan Industri Non Pertanian;
- d. mengadakan inventarisasi data dan pengelompokan pengusaha kecil dan menengah di bidang industri non pertanian;
- e. melakukan monitoring, evaluasi terhadap perkembangan pengusaha kecil dan menengah di bidang industri non pertanian;
- f. mengumpulkan, mencatat dan mengklasifikasi data teknis usaha pengusaha kecil dan menengah bidang produksi dan tata niaga hasil industri/kerajinan rakyat non pertanian;
- g. mengidentifikasi, mengelompokkan dan mengevaluasi proposal pengusaha kecil dan menengah bidang industri usaha non pertanian yang akan diajukan ke BUMN;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- i. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- k. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja

bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- l. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

11. Seksi Pemasaran dan pengembangan Aneka Usaha mempunyai tugas menyusun rencana, melakukan inventarisasi, memberi bimbingan, memonitor, dan mengevaluasi, serta melakukan konsultasi dalam rangka pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah bidang Perdagangan dan Aneka Usaha. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pemasaran dan Pengembangan Aneka Usaha;
- b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pemasaran dan Pengembangan Aneka Usaha;
- c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pemasaran dan Pengembangan Aneka Usaha;
- d. melakukan inventarisasi data dan pengelompokan pengusaha kecil dan menengah di bidang perdagangan dan aneka usaha;
- e. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah oleh golongan ekonomi lemah;
- f. melakukan monitoring pelaksanaan penyaluran, pemanfaatan pengembalian dana BUMN/BUMD serta BUMS dan lembaga perbankan yang diperoleh pengusaha kecil dan menengah;
- g. melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan pengusaha kecil dan menengah serta perdagangan aneka usaha;
- h. mengidentifikasi, mengelompokkan dan mengevaluasi proposal pengusaha kecil dan menengah bidang perdagangan dan aneka usaha yang akan diajukan ke BUMN;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

- k. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- l. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

12. Seksi Pembinaan Usaha Kecil Menengah Lorong mempunyai tugas menyusun rencana dan melakukan penjabaran pembinaan dan pengembangan usaha dibidang usaha kecil menengah. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pembinaan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah Lorong;
- b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah Lorong;
- c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah Lorong;
- d. mempersiapkan teknis pembinaan dan bimbingan kepada pengusaha kecil dan menengah di bidang industri non-pertanian;
- e. melakukan pembinaan dalam bentuk konsultasi, pelatihan, studi banding, pemagangan, pameran dan temu kemitraan bagi pengusaha kecil dan menengah di bidang industri non pertanian;
- f. melakukan konsultasi dan pengambilan data pada Instansi terkait dalam rangka pembinaan pengusaha kecil dan menengah di bidang industri non pertanian;
- g. mempersiapkan teknis pembinaan dan bimbingan kepada pengusaha kecil dan menengah di bidang perdagangan dan aneka usaha;
- h. melakukan pembinaan dalam bentuk konsultasi, pelatihan, studi banding, pemagangan, pameran dan temu kemitraan bagi pengusaha kecil dan menengah di bidang perdagangan dan aneka usaha;
- i. membuat laporan secara berkala terhadap pembinaan pengusaha kecil dan menengah bidang perdagangan dan aneka usaha;

- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - k. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - l. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - m. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - n. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- 13. Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam** yang mempunyai tugas melaksanakan menyusun bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan perencanaan fasilitasi permodalan, pengawasan dan penilaian koperasi Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam menyelenggarakan fungsi :
- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
 - b. menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
 - c. mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pembinaan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan administrasi organisasi dan usaha dalam bentuk bimbingan;
 - f. melaksanakan konsultasi dan pelatihan kepada pengelola koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis pengawasan dan usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam atas asas prinsip dasar koperasi;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembinaan usaha koperasi dan usaha kecil menengah di bidang permodalan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis pemanfaatan fasilitas kredit

dan bantuan permodalan;

- j. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis evaluasi kegiatan usaha koperasi di bidang permodalan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- n. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

14. Seksi Pengawasan dan Penilaian mempunyai tugas menyusun rencana dan member petunjuk, mengkoordinasikan penilaian pemeriksaan kegiatan. Serta menyusun konsep rencana program permodalan. Sesuai Pengawasan dan Penilaian menyelenggarakan fungsi :

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pengawasan dan Penilaian;
- b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pengawasan dan Penilaian;
- c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pengawasan dan Penilaian;
- d. menyusun rencana program pemeriksaan koperasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. menyusun rencana program pemeriksaan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam;
- f. mengumpulkan dan menganalisa data perkembangan usaha koperasi di bidang usaha simpan pinjam;
- g. melakukan pemeriksaan administrasi pembukuan, usaha koperasi, anggaran dasar/anggaran rumah tangga koperasi;
- h. melakukan pemeriksaan secara menyeluruh baik menyangkut organisasi

maupun usaha koperasi termasuk pelaksanaan pembinaan anggota koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam;

- i. melakukan pemantauan dan menganalisa perkembangan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam secara berkala dalam bentuk laporan bulanan, triwulan, maupun tahunan;
- j. melakukan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam meliputi laporan keuangan, neraca, perhitungan sisa hasil usaha serta menyusun kertas kerja penilaian;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- n. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

15. Seksi Pembiayaan Permodalan Koperasi mempunyai tugas menyusun rencana, mempersiapkan, mengklaksifikasi data usaha pelaksanaan pembiayaan dan permodalan koperasi. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi menyelenggarakan fungsi :

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi;
- b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi;
- c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi;
- d. mengumpulkan dan mengklasifikasi data usaha koperasi dibidang permodalan;

- e. menyusun rencana dan program bimbingan usaha koperasi dibidang permodalan;
- f. mempersiapkan bahan-bahan dan memberikan bimbingan teknis bagi pengembangan usaha koperasi di bidang permodalan;
- g. melakukan bimbingan kepada gerakan koperasi dalam usaha memanfaatkan fasilitasi kredit dan bantuan permodalan;
- h. melakukan monitoring dan mengevaluasi kegiatan usaha koperasi di bidang permodalan;
- i. menyusun dan mengelompokkan koperasi yang telah mendapatkan bantuan kredit/permodalan;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- k. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- l. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- m. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

16. Seksi Pembiayaan dan Permodalan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyusun rencana mempersiapkan, mengklaksifikasi data usaha pelaksanaan pembiayaan dan permodalan usaha kecil dan menengah. Dalam melaksanakan tugas, seksi pembiayaan dan permodalan usaha kecil menengah menyelenggarakan fungsi;

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pembiayaan dan Permodalan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pembiayaan dan Permodalan Usaha Kecil dan Menengah;
- c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi

Pembiayaan dan Permodalan Usaha Kecil dan Menengah;

- d. mengumpulkan dan mengklasifikasi data usaha kecil dan menengah dibidang permodalan;
- e. menyusun rencana dan program bimbingan usaha kecil dan menengah dibidang permodalan;
- f. melakukan bimbingan teknis bagi pengembangan usaha kecil dan menengah dibidang permodalan;
- g. melakukan bimbingan kepada gerakan usaha kecil dan menengah dalam usaha memanfaatkan fasilitas kredit dan bantuan permodalan;
- h. melakukan monitoring dan mengevaluasi kegiatan usaha kecil dan menengah dibidang permodalan;
- i. menyusun dan mengelompokkan usaha kecil dan menengah yang telah mendapatkan bantuan kredit/permodalan;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- k. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- l. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- m. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

17. Bidang Pendidikan dan Penyuluhan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan penyuluhan koperasi dan usaha kecil menengah. Dalam melaksanakan tugas, bidang pendidikan dan penyuluhan koperasi dan usaha kecil menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Pendidikan, Penyuluhan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran

- (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Pendidikan, Penyuluhan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- c. mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Pendidikan, Penyuluhan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - d. menyusun bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan penyuluhan koperasi dan usaha kecil menengah;
 - e. menyusun bahan bimbingan dan pengendalian teknis pelaksanaan metode dan program pendidikan dan penyuluhan;
 - f. menyusun bahan bimbingan dan konsultasi kepada koperasi untuk penyesuaian dan perubahan anggaran dasar;
 - g. menyusun bahan bimbingan dan konsultasi kepada kelompok masyarakat untuk membentuk koperasi;
 - h. melakukan bimbingan teknis persiapan kegiatan pendidikan dan penyuluhan kepada koperasi, usaha kecil menengah;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - j. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - k. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - l. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - m. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

18. Seksi Pendidikan dan Penyuluhan Koperasi mempunyai tugas menyusun rencana, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan/pendidikan dan penyusunan koperasi, melakukan kerjasama dan melaksanakan tugas. Seksi pendidikan dan penyuluhan koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pendidikan dan Penyuluhan Koperasi;
- b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pendidikan dan Penyuluhan Koperasi;

- c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pendidikan dan Penyuluhan Koperasi;
- d. melaksanakan kegiatan program pendidikan penyuluhan bagi koperasi;
- e. mengidentifikasi kebutuhan pelatihan setiap tahun anggaran;
- f. menyusun kalender pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan;
- g. melakukan kerja sama dengan Instansi lain/non pemerintah dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan perkoperasian;
- h. mempersiapkan administrasi kegiatan pendidikan dan penyuluhan kepada koperasi;
- i. melakukan dan mengatur pengadaan bahan dan sarana pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan;
- j. menyusun laporan pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan;
- k. mengevaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan perkoperasian;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- m. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- n. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- o. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- p. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

19. Seksi Pendidikan dan Penyuluhan Usaha Kecil Menengah, mempunyai tugas menyusun rencana, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan/pendidikan dan penyuluhan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Melakukan kerjasama dan mengevaluasi pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan UKM. Dalam melaksanakan tugas, seksi pendidikan dan penyuluhan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi:

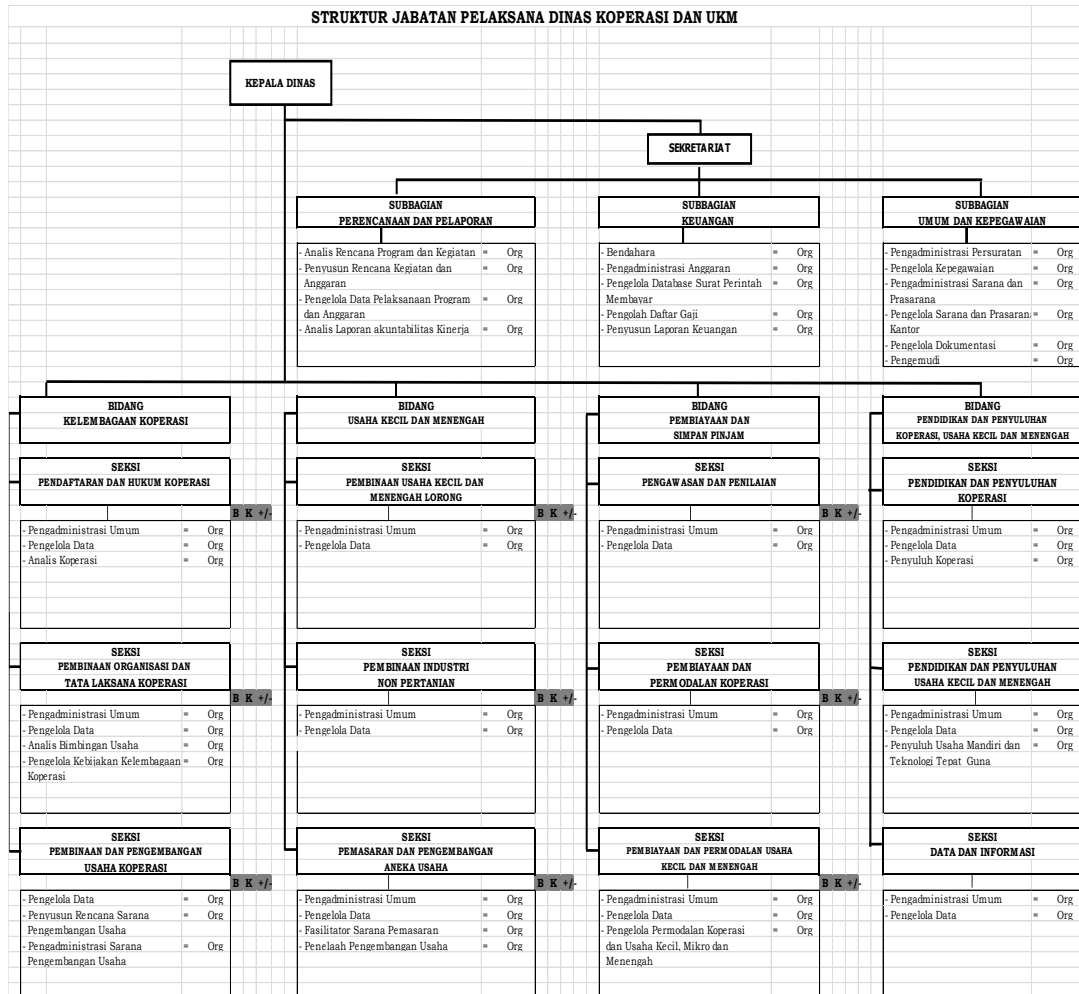
- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pendidikan dan Penyuluhan Usaha Kecil Dan Menengah;
 - b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pendidikan dan Penyuluhan Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pendidikan dan Penyuluhan Usaha Kecil dan Menengah;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan program pendidikan dan penyuluhan bagi usaha kecil dan menengah;
 - e. mengidentifikasi kebutuhan pelatihan setiap tahun anggaran;
 - f. menyusun kalender pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan;
 - g. melakukan kerja sama dengan Instansi lain/non Pemerintah dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan usaha kecil dan menengah;
 - h. mempersiapkan administrasi kegiatan pendidikan dan penyuluhan kepada usaha kecil dan menengah;
 - i. melakukan dan mengatur pengadaan bahan dan sarana pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan;
 - k. mengevaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan usaha kecil menengah;
 - l. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - m. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - n. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - o. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - p. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- 20. Seksi Data dan Informasi** mempunyai tugas menyusun rencana, dan mengkoordinasikan semua data yang diperlukakn sebagai bahan informasi

menyelenggarakan fungsi :

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Data dan Informasi;
- b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Data dan Informasi;
- c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Data Dan Informasi;
- d. menghimpun dan mengolah data koperasi dan pengusaha kecil untuk bahan statistik;
- e. mengoordinasikan kepada bidang-bidang yang terkait;
- f. menginventarisasikan data dan laporan;
- g. menyusun data laporan;
- h. mengevaluasi data untuk bahan informasi;
- i. memberikan informasi terkait penyelenggaraan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- k. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- l. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- m. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

Secara lengkap Bagan Struktur Jabatan Pelaksana Dinas Koperasi UKM Kota Makassar sebagai berikut :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar



1.5. Isu Strategis

isu-isu strategis berupa peluang dan ancaman yang kemungkinan dihadapi dan harus diantisipasi di masa yang akan datang ditengah pandemi Covid19 adalah sebagai berikut:

1. PELUANG (OPPORTUNITIES)

- Meningkatnya SDM Koperasi dan UMKM yang berdayasaing;
- Tersedianya sumber permodalan perbankan atau lembaga keuangan.
- Meningkatnya sarana dan prasarana bagi pelaku Koperasi dan UMKM;
- Menciptakan Koperasi dan UKM mandiri;
- Meningkatnya teknologi antara pelaku bisnis (Market Digital);

2. ANCAMAN (THREATS)

- Terbatasnya kemampuan entrepreneur SDM Koperasi dan UMKM:
- Masih banyak koperasi dan UMKM yang berorientasi dan bergantung pada bantuan pemerintah;
- Masih banyak koperasi dan UMKM yang terkendala dari sisi pembiayaan

- usaha maupun keterampilan teknis berwirausaha dan manajemen;
- d. Belum optimalnya kemampuan desain dan kemasan, sehingga perlunya tenaga pelatih;
 - e. Kesulitan pasokan semenjak diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat distribusi logistik ikut terganggu;
 - f. Cashflow , banyak pelaku UMKM yang merasakan pendapatannya menurun akibat tidak adanya pelanggan yang membeli produk;
 - g. Berubahnya kebutuhan pasar sesuai permintaan (on demand).

Untuk mengatasi permasalahan dan isu-isu strategis maka Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar telah menetapkan sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan identifikasi mengenai potensi dan pengembangan usaha terhadap pelaku ekonomi ,seperti koperasi,usaha kecil,mikro dan menengah.
2. Melakukan program pembinaan terhadap pelaku-pelaku usaha melalui program pendamping.
3. Program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat mengembangkan usaha.
4. Pengembangan produk lokal unggulan mulai dari bidang pertanian, peternakan, perikanan, pengolahan, hingga pemasaran terintegrasi sebagai basis usaha koperasi dan UMKM.
5. Menyiapkan skema pembiayaan pandemi (pandemic finance) bagi koperasi & UMKM dengan pola channelling sehingga pembiayaan tersebut dapat dinikmati langsung oleh pelaku koperasi dan UMKM tanpa melewati skema yang rumit.
6. Skala up dan penguatan digitalisasi produk-produk koperasi & UMKM.
7. Perlunya tenaga pelatih dari luar untuk peningkatan mutu SDM UKM binaan dalam peningkatan usahanya.

1.6. Dukungan SDM,Prasarana dan Anggaran

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar memiliki SDM 33 orang ASN dan 34 Non ASN total keseluruhan 67 Orang SDM yang ada di lingkup Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar selain sumberdaya yang dimiliki juga didukung oleh prasarana yang sangat cukup mumpuni dalam hal mendukung kelancaran dan kinerja agar tujuan SKPD tercapai di tahun 2021, Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar didukung dengan jumlah pagu pokok anggaran sebesar

Rp.28.767.993.476; (Dua Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) dan jumlah pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp.21.481.905.502; (Dua Puluh Satu Milyar Empat Ratus Juta Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Lima Ratus Dua Rupiah) walaupun dalam sepanjang perjalanan di tahun 2021 terdapat perubahan anggaran dan refocussing anggaran tetapi tidak membuat Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar menurun dalam pencapaian kinerja tapi justru semangat dalam memenuhi target capaian dan meningkatkan perekonomian di Kota Makassar.

1.7. Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP

Berdasarkan uraian di atas dan dalam rangka lebih mengaktifkan penerapan Sistem Akuntabilitas di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja, melalui langkah-langkah antara lain :
 - a. Melakukan evaluasi atas program dan dituangkan dalam dokumen hasil evaluasi;
 - b. Melakukan evaluasi dan pemantauan atas Rencana Aksi dan dituangkan dalam dokumen hasil evaluasi dan pemantauan.
2. Memperbaiki kualitas pengukuran kinerja melalui langkah-langkah antara lain :
 - a. Menjadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai salah satu dasar penilaian pemberian *reward* dan *punishment* , serta dasar pemberian promosi jabatan;
 - b. Membuat mekanisme (Standar Operasional Prosedur/SOP) terkait pencapaian target kinerja eselon III dan IV yang diformalkan;
 - c. Hasil pengukuran kinerja atas Rencana Aksi dijadikan dasar penyesuaian strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.
3. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja melalui langkah-langkah, antara lain :

- a. Menyajikan informasi kinerja yang dapat diandalkan dalam laporan kinerja;
 - b. Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai;
 - c. Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
 - d. Memanfaatkan informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Perangkat Daerah secara ekstensif dan menyeluruh, sehingga dapat digunakan antara lain untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi serta peningkatan kinerja.
4. Meningkatkan kualitas evaluasi internal, melalui langkah-langkah :
- a. Evaluasi program dilaksanakan dengan kesimpulan keberhasilan dan kegagalan program yang dievaluasi, disertai rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja dan rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan, serta bukti persetujuan atas rekomendasi untuk dilaksanakan;
 - b. Melaksanakan pemantauan rencana aksi dalam rangka pengendalian kinerja dan alternatif perbaikan, serta melakukan evaluasi atas rencana aksi;
 - c. Melakukan reviu dan evaluasi internal secara berkala terhadap dokumen perencanaan dan penilaian kinerja;
 - d. Memanfaatkan informasi-informasi yang disajikan dalam dokumen perencanaan dan dokumen penilaian kinerja yang telah disusun.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Visi ,Misi Kepala Daerah

Visi misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Makassar ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Makassar adalah **“Percepatan Mewujudkan Makassar KOTA DUNIA yang “SOMBERE’ & SMART CITY” dengan IMUNITAS KUAT untuk Semua”**. Adapun Misi Walikota dan Wakil Walikota Makassar yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Revolusi SDM dan Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi
2. Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan Imunitas Ekonomi dan Kesehatan Kota Yang Kuat Untuk Semua
3. Restorasi ruang Kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang “Sombere’ & Smart City “ untuk semua

Menelaah ketiga misi Walikota dan Wakil Walikota Makassar dihubungkan dengan pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Misi Ke 1 (Satu) adapun poin-poin sebagai berikut:

1. Revolusi PENDIDIKAN, semua harus sekolah
2. Perkuatan KEIMANAN UMMAT
3. 1000 Beasiswa “ANAK LORONG BERPRESTASI”
4. 10.000 Skill Training Gratis
5. Percepatan Tata Pemerintahan “SOMBERE’ & SMART Bersih dari Indikasi Korupsi
6. Menuju PAD Rp. 2 Trilyun
7. Menuju INSENTIF KINERJA RTRW Rp. 2 Juta dan Perkuatan Fungsi RTRW dan Penasehat Walikota serta Para Local Influencer
8. Kelurahan menjadi Pusat Pelayanan Publik yang “SOMBERE’ & SMART”

Dari poin-poin diatas misi 1 (satu) Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar terkait erat masuk pada **10.000 Skill Training Gratis** yaitu dengan memberikan pelatihan-

pelatihan dan keterampilan untuk program pemberdayaan usaha mikro sedangkan pada misi ke 2(dua) adapun poin-poin sebagai berikut :

1. Gerakan Masyarakat Perkuat Imunitas Kesehatan dan Ekonomi
2. Perkuatan Fasilitas Perlindungan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
3. Penyediaan dengan Kemudahan Akses 100.000 Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru
4. Penataan Total Sistem BUMD dan Pembentukan Makassar Incorporation
5. Pembuatan Perda OMNIBUS “MAKASSAR KOTA DUNIA”
6. Percepatan Program JAGAI ANA'TA dan program SMART MILLENIA serta SOCIAL MITIGATION
7. Penataan Total DESTINASI BUDAYA dan SEJARAH
8. Penguatan CITY BRANDING dan peningkatan FESTIVAL dan MICE bulanan dalam skala nasional dan internasional

Pada poin-poin diatas Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar masuk di poin satu (1) **Gerakan Masyarakat Perkuat Imunitas Kesehatan Ekonomi**, dan juga pada poin ketiga (3) **Penyediaan dengan kemudahan akses 100.000 peluang kerja dan peluang bisnis baru**. Misi ke 3 (ketiga) poin-poinnya sebagai berikut :

1. Penataan Total SISTEM PERSAMPAHAN
2. Pembenahan Total SISTEM PENANGANAN BANJIR dan PENANGAN KEMACETAN
3. Pembangunan INFRASTRUKTUR dan KAWASAN “WATERFRONT CITY” berbasis MITIGASI dan ADAPTASI LINGKUNGAN
4. Peningkatan Jejaring SMART PEDESTRIAN dan KORIDON HIJAU KOTA
5. Peningkatan LORONG GARDEN dan Pembentukan 5000 LORONG WISATA
6. Percepatan Pembangunan Sistem dan Infrastruktur “SOMBERE’ & SMART CITY” yang Inklusif
7. Percepatan Makassar menjadi LIVEABLE CITY dan RESILIENT CITY
8. Pembangunan Gedung “SOMBERE’ & SMART” NEW BALAIKOTA & NEW DPRD

Berdasarkan poin-poin diatas di misi 3 Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar masuk pada poin kelima (5) **Peningkatan lorong garden dan pembentukan 5000 lorong wisata** yaitu pengembangan kegiatan ekonomi lorong yang berbasis green,kuliner dan kerajinan. Yang mana untuk target lorong wisata binaan Dinas Koperasi dan UKM ditargetkan 75 lorong pertahun sehingga target akhir RPJMD 375 lorong wisata.

2.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Maksud, Tujuan dan sasaran yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar tidak terlepas dari visi misi Pemerintah Republik Indonesia, Nawa Cita Presiden Republik Indonesia, cita-cita dan acuan pengelolaan Koperasi dan UKM melalui Kementerian Koperasi dan UKM, visi misi Walikota dan Wakil Walikota Makassar beserta program – program strategis yang dijanjikannya selama 5 tahun kedepan. Rencana Strategis – Dinas Koperasi Dan Ukm Kota Makassar 2021 – 2026 sesuai dengan Visi Misi Walikota Makassar Dinas Koperasi dan UKM berkontribusi pada Misi 2 “Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, social dan budaya menuju masyarakat sejahterah dengan imunitas ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan Kota yang kuat untuk semua” Tujuannya “Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Realisasi Investasi” Sasarannya “Terwujudnya gerakan masyarakat memperkuat ketahanan ekonomi dan industri Kreatif. Olehnya itu Maksud dari pembinaan Koperasi dan UKM adalah mendorong pencapaian kemandirian Koperasi dan UKM yang mampu meningkatkan daya saing dan daya dorong pembangunan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi wilayah, melalui fasilitasi kegiatan usaha yang berorientasi bisnis. Adapun tujuan pembinaan adalah:

1. Teridentifikasi, terfasilitasi dan meningkatkan kemampuan dan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang Koperasi dan UKM guna menjamin keberlangsungan proses bisnis secara professional;
2. Meningkatkan kemampuan memasarkan produk yang telah memenuhi standar dengan dukungan sarana prasarana yang dimiliki guna meningkatkan derajat daya saing di bidang Koperasi dan UKM;
3. Meningkatkan kemampuan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam mengakses dan memperluas permodalan, serta kemitraan usaha;
4. Meningkatkan ketersediaan ruang – ruang usaha baik formal maupun informal untuk wirausaha yang sudah ada dan wirausaha baru bagi peningkatan skala usaha dan skala pasar;
5. Meningkatkan kemudahan, Kepastian dan perlindungan untuk usaha.

Dalam pembinaan Koperasi dan UKM, prioritas perhatian diberikan pada aspek yang terkait dengan kepentingan umum. Pemerintah sebagai organ pelayanan public memiliki tanggungjawab dalam penyediaan segala aspek yang terkait dengan kepentingan umum. Pendektesian atas factor berbagai faktor yang ikut memiliki kontribusi dalam

mempengaruhi stabilitas kegiatan pelaku usaha dilakukan melalui pemantapan kelembagaan.

Melalui tujuan tersebut, dikembangkanlah sasaran-sasaran beserta indikatornya, Sasaran adalah hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih terukur, rasional dan mudah dicapai. Dalam perumusan sasaran ditentukan indikator sasaran yang dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Adapun sasaran yang akan dicapai Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Lembaga Koperasi aktif dan Koperasi Sehat Berkembangnya;
2. Meningkatnya UKM yang berkualitas;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelola keuangan Perangkat Daerah.

Selaras dengan RPJMD 2021 - 2023, Indikator kinerja Koperasidan Usaha, Kecil dan Menengah ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Lembaga Koperasi aktif dan Sehat
2. Meningkatnya Digitalisasi Usaha kecil dan Menengah
3. Meningkatnya jumlah unit usaha yang berdayasaing
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelola keuangan Perangkat Daerah

Tercapainya tujuan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar ditentukan oleh berbagai faktor baik dari SDM, sarana prasarana dan keuangan/pendanaan. Keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Koperasi, Usaha kecil dan menengah dapat dilihat antara lain melalui 4 Indikator diatas. Sejuahmana tingkat pencapaian keberhasilannya ditentukan oleh hasil capaian kinerja berdasarkan indikator tersebut.

Tujuan, Sasaran dan indikator sasaran yang akan dicapai Dinas Koperasi Usaha kecil dan menengah dapat dilihat pada table T-C.25

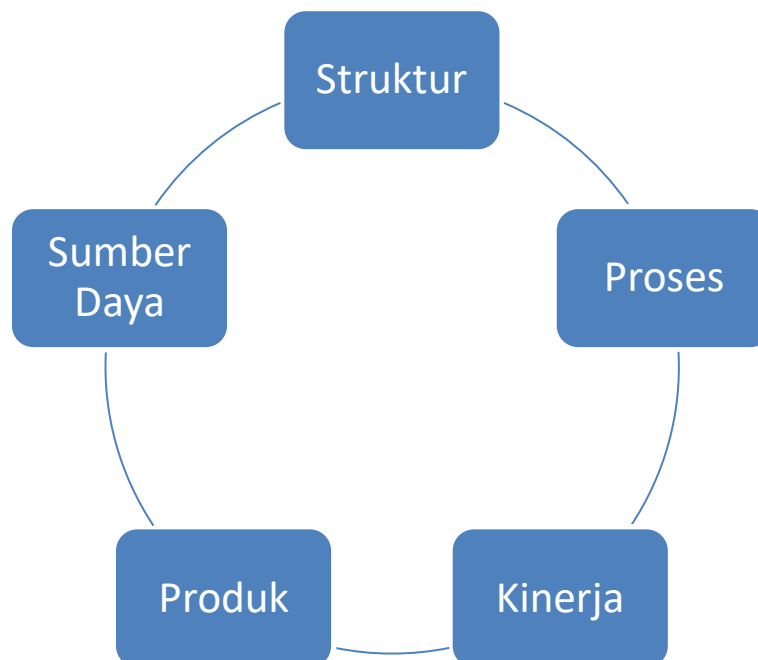
2.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Di dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Perangkat daerah (OPD) harus mampu merumuskan nilai yang akan dianut bersama dalam upaya pencapaian sasaran dimaksud. Nilai Perangkat Daerah harus mampu menggambarkan tata nilai dan falsafah organisasi yang dianut bersama dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang

tentunya akan berkaitan erat dengan mutu pelayanan Perangkat Daerah. Oleh karena itu diperlukan sebuah strategi dalam mencapai tujuan tersebut. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan Program-program untuk mewujudkan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota yang sudah ditentukan. Strategi yang akan sudah ditentukan selanjutnya diuraikan dalam berbagai kebijakan, yang masing-masing kebijakan akan diuraikan menjadi sebuah program-program.

Strategi dan kebijakan dalam rencana strategis PD merupakan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana Program Prioritas dalam rancangan awal RPJMD tahun 2021—2026 dan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat Daerah.

Pengelolaan strategi dan arah kebijakan atas Koperasi dan UKM dilakukan melalui aspek-aspek Struktur, Proses, Produk, Sumber Daya dan Kinerja. Kelima unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang saling menunjang dan memiliki fungsi masing-masing seperti yang terlihat di gambar 5.1 berikut ini



1. Pendekatan Struktur

Pada pendekatan struktur, manajemen pengelolaan Koperasi dan UKM dilakukan melalui penguatan Dinas Koperasi dan UKM yang berdaya guna. Pemantapan kewenangan instansional terkait sesuai dengan kebutuhan terhadap pengelolaan Koperasi dan UKM. Pengelolaan Koperasi dan UKM melibatkan lintas sektor sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Identifikasi tugas dan fungsi perlu dilakukan guna memperoleh gambaran untuk memperoleh titik simpul koordinasi antar instansi sehingga diharapkan mampu mengoptimalkan kewenangan masing-masing instansi.

Dalam menjalankan perannya, keberadaan Dinas Koperasi dan UKM memiliki hubungan tali temali yang kuat dalam pengelolaan Koperasi dan UKM. Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan UKM harus memperkuat institusi yang solid, dengan dasar pertimbangan:

- Efektifitas Pengelolaan. Dalam kaitan dengan pengelolaan, Dinas Koperasi dan UKM berperan sebagai institusi yang memfasilitasi pelaku-pelaku usaha agar mampu berdaya saing, baik pada pasar lokal, regional bahkan internasional;
- Soliditas Pengelolaan. Dinas Koperasi dan UKM mampu mengelola kegiatan pelaku usaha melalui sinergitas dan soliditas pengelolaan dengan para stakeholders lainnya. Termasuk di dalamnya kemampuan melakukan koordinasi antar stakeholders secara baik, terarah dan terukur;
- Komunikasi. Dalam rangka pengelolaan, maka dibutuhkan komunikasi yang intens antara pelaku usaha dengan Dinas Koperasi dan UKM terutama terkait kegiatan bisnis;
- Pertanggungjawaban. Setiap program yang dilaksanakan dilakukan dengan pertanggung jawaban yang profesional dan transparan.

Dalam pemantapan struktur organisasi yang berdaya guna, maka perlu ditetapkan peran kelembagaan sebagai berikut:

1. Peran Pengambilan Keputusan, memberikan arah dan pedoman dalam pengambilan keputusan terhadap pengelolaan Koperasi dan UKM sebagai bagian dari perencanaan pembangunan.
2. Peran Teknis Substansi, baik berkaitan dengan pendekatan sosiologis maupun pendekatan ekonomi dan hukum (mencakup pengawasan dan penertiban atas kegiatan yang melanggar Perda (non yustisi).

3. Peran Monitoring, mencakup penentuan indikator dan monitoring serta evaluasi atas kegiatan pengelolaan.
4. Peran Partisipasi Masyarakat, mencakup strategi pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Koperasi dan UKM.
5. Peran Penyediaan Data, Informasi dan Penelitian, mencakup kegiatan pengumpulan data dan informasi, penyediaan data bagi kegiatan analisis dan formulasi kebijakan dalam konteks pengelolaan Koperasi dan UKM.
6. Peran Kerjasama dan Koordinasi Kelembagaan, mencakup penguatan kerjasama dengan berbagai stakeholder terkait.

2. Pendekatan Proses

Pada tataran proses hal-hal yang harus di tetapkan antara lain:

- a. Penyiapan data/informasi dasar, antara lain berisi tentang kependudukan, jumlah koperasi dan UKM, data ekspor-impor, dan lainlain. Data dan informasi yang akurat menjadi dasar dalam penyusunan program pengelolaan Koperasi dan UKM sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Ketersediaan dan pengolahan data yang memuat seluruh data dan informasi tentang kondisi koperasi dan UKM setempat, baik yang bersifat umum, khusus, teknis, non teknis, confidential maupun non-confidential akan meningkatkan kemampuan fungsi-fungsi pengendalian sistem pengelolaan Koperasi dan UKM. Melalui pendekatan proses akan terbangun fungsi-fungsi, yaitu:

- o Fungsi Perencanaan;
- o Fungsi Pembinaan;
- o Fungsi Fasilitasi;
- o Fungsi Pengawasan;
- o Fungsi Penegakan Hukum.

Ketersediaan dan pengelolaan data dan informasi tentang kondisi koperasi dan UKM ini perlu senantiasa diperbaharui dan dilengkapi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat secara literatif dan berkelanjutan. Dengan demikian terbangun:

- o Eksistensi Informasi (Adanya data);
- o Aktualitas Informasi (Up to date data);
- o Validitas Informasi;
- o Kredibilitas Informasi;
- o Reliabilitas Informasi (Kebenaran);
- o Aksestabilitas Informasi (dapat diakses).

- b. Peraturan Pendukung/Juklak. Setiap kebijakan yang ditetapkan sebaiknya dilengkapi oleh petunjuk pelaksanaan agar dapat menghindari kesalahan penafsiran atas kebijakan tersebut.
- c. Identifikasi Persoalan/Kegiatan. Pemetaan dan inventarisasi kasus dan pendeteksian kebutuhan di bidang pengelolaan Koperasi dan UKM.
- d. Koordinasi Kegiatan. Hubungan kerjasama antara instansi terkait dalam penyusunan program.
- e. Sistem Analisa Pendukung. Ketersediaan dukungan sistem analisa maupun perangkat pendukung seperti Teknologi Informasi (TI).

3. Pendekatan Produk

Pada tataran produk, hal-hal yang harus ditetapkan antara lain:

- o Prosedur penanganan aspek-aspek pengelolaan Koperasi dan UKM;
- o Sistem pelaporan yang memuat kegiatan pengelolaan Koperasi dan UKM;
- o Pelaksanaan kegiatan atau program;
- o Berita acara;
- o Matriks kinerja dan penilaian;
- o Sarana dan prasarana pendukung.
- o Alokasi sumber daya;
- o Pendanaan, dan lain-lain.

4. Pendekatan Sumberdaya

Pengembangan Sumber daya Manusia berbasis Kompetensi di Dinas Koperasi dan UKM dilatarbelakangi oleh beberapa hal :

- a. Keberadaan Dinas Koperasi dan UKM memiliki peran strategis sebagai instrumen daerah dalam mengelola kegiatan usaha Koperasi dan UKM sehingga perlu diberdayakan dan dioptimalkan agar sesuai yang diharapkan.
- b. Pengelolaan Koperasi dan UKM yang berdaya guna memerlukan dukungan kinerja aparat/personil agar mampu menghasilkan kinerja pelayanan publik prima. Kinerja pelayanan publik prima salah satunya dimungkinkan oleh pengembangan sumberdaya manusia berbasis kompetensi.
- c. Adanya tuntutan pelayanan publik yang semakin luas, berbagai persaingan, friksi atau konflik ekonomi terhadap berbagai kepentingan yang ada membutuhkan kemampuan strategi yang adaptif terhadap situasi yang ada melalui kebijakan yang pro bisnis.

Kompetensi organisasi dan kompetensi sumberdaya manusia di dalam organisasi/gugus tugas dipandang sangat menentukan tinggi-rendahnya kinerja suatu

organisasi. Oleh sebab itu upaya-upaya pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi telah dianggap sebagai rangkaian tindakan yang paling tepat untuk meningkatkan kinerja dan pencapaian tujuan suatu organisasi/gugus tugas tertentu. Beberapa aspek yang menjadi landasan konseptual dalam pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi yang perlu diperhatikan antara lain:

- Kompetensi Sumber Daya Manusia merujuk pada penguasaan keterampilan (skill) dan pengetahuan (knowledge) serta dimilikinya integritas oleh seseorang yang kemudian tercermin melalui perilaku kinerja (job behavior) yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi.
- Kompetensi dibedakan menjadi dua tipe atau jenis, yakni soft competency dan hard competency. Soft competency berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta membangun interaksi yang baik dengan berbagai pihak. Sedangkan tipe kompetensi yang kedua yaitu hard competency yang merupakan jenis kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional atau teknis didalam menangani suatu pekerjaan tertentu.
- Pada hakikatnya, kompetensi dapat ditingkatkan. Upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia berbasis kompetensi atau Competency-Based Human Resources Management dapat dilakukan dengan serangkaian langkah terintegrasi.
- Pengembangan SDM berbasis kompetensi yang handal mencakup pengembangan fungsi rekrutmen, pembinaan karir, format dan rancangan pelatihan, hingga sistem remunerasi

5. Pendekatan Kinerja Pada tataran kinerja, memuat antara lain:

- a. Tingkatan substansi Pengelolaan Koperasi dan UKM: kejelasan program, cakupan kegiatan, rencana anggaran, kapasitas aparat dan lain-lain.
- b. Tingkatan fungsi, ketepatan waktu, ketepatan penanganan kasus, ketepatan hasil dan ketepatan manfaat.
- c. Keberhasilan koordinasi. Keseluruhan kerangka sistem di atas harus dijamin bahwa semua instansi terkait maupun pihak yang berkepentingan menyepakati dan menjamin keberlangsungan sistem dilandasi pedoman kerangka kerja yang ditetapkan.

Tujuan , Sasaran, Strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

TABEL T-C.26

Strategi, Dan Kebijakan Perangkat Daerah

VISI : Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Somberedan Smart City dengan Imunitas Kuat untuk Semua			
MISI 1 : Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	KebijakanUmum
MeningkatkanKualitas SDM Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1. Meningkatnya Usaha Mikro menjadi wirausaha	Penyediaan sarana dan prasarana usaha bagi Koperasi dan UMKM	Penciptaan iklim investasi yang kondusif, diantaranya adalah penyediaan sistem informasi yang memadai, peningkatan fasilitas kegiatan ekonomi masyarakat dan pelayanan dunia usaha berbasis Teknologi Informasi
MISI 2 : Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan kota yang kuat untuk semua			
Tujuan	Sasaran	Strategi	KebijakanUmum
Mewujudkan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang berkualitas dan berdaya saing dalam rangka meningkatkan perekonomian kota Makassar	1. Meningkatnya jumlah unit usaha yang berdaya saing	Peningkatan Produktivitas/omset, meningkatkan kemampuan pemasaran Produk Unggulan Koperasi dan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan fasilitasi standarisasi produk UMKM DAN Koperasi - Meningkatnya jaringan kerjasama UMKM dan informasi bisnis serta pengembangan pemasaran
		Peningkatan usaha ekonomi produktif	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan potensi dan sumberdaya ekonomi,memperkuat budaya kewirausahaan serta pengembangan akses pasar

2.4. Struktur Program dan Kegiatan

Berdasarkan keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan maka langkah selanjutnya yaitu program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan tahun 2021 pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)		Rencana Tahun 2021											Perkiraan Maju Tahun 2022		Jenis Keg	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif						
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan								
1	17	01	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan kinerja perangkat daerah	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	100%	100%	8,304,234,900	6,167,112,176	(2,137,122,724)	APBD	APBD			(a/b/c)	1/2/3	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar
				Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap Pelayanan kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)	Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap Pelayanan kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	90%	90%											
				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	90%	90%											

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar

17	01	2	01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	100%	100%	158,138,500	158,138,500	-	APBD	APBD			a
01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Renja SKPD	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	2	2	73,823,000	73,823,000	-	APBD	APBD			a
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	1	1								
					Jumlah Forum SKPD yang dilaksanakan	Jumlah Forum SKPD yang dilaksanakan	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	1	1								
2	01	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	1	1	18,208,000	18,208,000	-	APBD	APBD			a
2	01	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	1	1	17,134,000	17,134,000	-	APBD	APBD			a
2	01	01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	1	1	17,822,000	17,822,000	-	APBD	APBD			a
2	01	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD	Jumlah Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	1	1	17,246,500	17,246,500	-	APBD	APBD			a

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar

2	01	01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	1	1	17,822,000	17,822,000	-	APBD	APBD			a	
2	01	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD	Jumlah Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	1	1	17,246,500	17,246,500	-	APBD	APBD			a	
2	17	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan laporan perjanjian kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan laporan perjanjian kinerja SKPD	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	1	1	6,006,000	6,006,000	-	APBD	APBD			a	
2	17	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	1	1	7,899,000	7,899,000	-	APBD	APBD			a	
					Jumlah Evaluasi Renja SKPD	Jumlah Evaluasi Renja SKPD	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	1	1									
2	17	02	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi keuangan yang disusun	Jumlah Dokumen Administrasi keuangan yang disusun	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	12	12	6,268,965,000	4,874,571,847	(1,394,393,153)	APBD	APBD				
01	2	02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	33	33	5,900,245,000	4,505,851,847	(1,394,393,153)	APBD	APBD			a	
01	2	02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	12	12	263,160,000	263,160,000	-	APBD	APBD			a	
01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa tenaga pendukung dan pengujian/verifikasi	Jumlah Jasa tenaga pendukung dan pengujian/verifikasi	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	6	6	79,567,000	79,567,000	-	APBD	APBD			a	
01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang tersedia	Jumlah dokumen keuangan yang tersedia	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	2	2	5,993,000	5,993,000	-	APBD	APBD			a	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar

01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	5	5	10,000,000	10,000,000	-	APBD	APBD			a
01	2	02	07	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/semester SKPD yang disusun	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/semester SKPD yang disusun	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	2	2	10,000,000	10,000,000	-	APBD	APBD			a
17	01	2	03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah yang dihasilkan	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah yang dihasilkan	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	12	12	101,947,000	106,265,416	4,318,416	APBD	APBD			
01	2	3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah yang dihasilkan	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah yang dihasilkan	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	12	12	101,947,000	106,265,416	4,318,416	APBD	APBD			
17	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jasa administrasi perkantoran yang tersedia	Jumlah jasa administrasi perkantoran yang tersedia	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	12	12	285,861,800	165,861,800	(120,000,000)	APBD	APBD			a
01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya yang diadakan	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya yang diadakan	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	72	72	43,200,000	43,200,000	-	APBD	APBD			a
01	2	05	03	Pendataan dan Pengolahan administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang disusun	Jumlah laporan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang disusun	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	12	12	122,661,800	122,661,800	-	APBD	APBD			a
01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan formal yang diadakan	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan formal yang diadakan	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	10	0	120,000,000	-	(120,000,000)	APBD	APBD			a

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar

17	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jasa administrasi perkantoran yang tersedia	Jumlah jasa administrasi perkantoran yang tersedia	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	12	12	803,955,413	380,955,413	(423,000,000)	APBD	APBD			a	
01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	4	4	9,042,000	9,042,000	-	APBD	APBD			a	
01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	12	12	179,983,413	179,983,413	-	APBD	APBD			a	
01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan cetakan dan penggandaan	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	12	12	56,670,000	56,670,000	-	APBD	APBD			a	
01	2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	5	5	16,260,000	16,260,000	-	APBD	APBD			a	
01	2	06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan	Jumlah pelaksanaan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	53	17	542,000,000	119,000,000	(423,000,000)	APBD	APBD			a	
17	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa administrasi perkantoran yang tersedia	Jumlah jasa administrasi perkantoran yang tersedia	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	12	12	102,598,975	24,999,000	(77,599,975)	APBD	APBD			a	
17	01	2	08	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	7	9	102,598,975	24,999,000	(77,599,975)	APBD	APBD			a	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar

17	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa administrasi perkantoran yang tersedia	Jumlah jasa administrasi perkantoran yang tersedia	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	12	12	141,405,812	130,505,800	(10,900,012)	APBD	APBD			a	
01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Administrasi Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Administrasi Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	12	12	139,005,800	130,505,800	(8,500,000)	APBD	APBD			a	
01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumberdaya Air,dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan	Jumlah jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	1	1	2,400,012	-	(2,400,012)	APBD	APBD			a	
1	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa administrasi perkantoran yang tersedia	Jumlah jasa administrasi perkantoran yang tersedia	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	12	12	441,362,400	325,814,400	(115,548,000)	APBD	APBD			a	
01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang mendapatkan pemeliharaan dan pajak kendaraan	Jumlah mobil jabatan yang mendapatkan pemeliharaan dan pajak kendaraan	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	1	1	55,536,800	55,536,800	-	APBD	APBD			a	
01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Pembiayaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan,biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional yang tersedia	Jumlah Jasa Pemeliharaan,biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional yang tersedia	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	13	13	298,515,600	189,967,600	(108,548,000)	APBD	APBD			a	
01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin kantor yang mendapatkan pemeliharaan	Jumlah Peralatan dan mesin kantor yang mendapatkan pemeliharaan	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	52	36	42,310,000	35,310,000	(7,000,000)	APBD	APBD			a	
01	2	09	10	Pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah jasa kebersihan lainnya	Jumlah jasa kebersihan lainnya	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	12	12	45,000,000	45,000,000	-	APBD	APBD			a	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar

	2	17	03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan	Presentase Koperasi yang diperiksa dan diawasi	Presentase Koperasi yang diperiksa dan diawasi	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	75%	75%	3,922,008,600	3,262,607,600	(659,401,000)	APBD	APBD			Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	
17	03	2	01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah pemeriksaan dan pengawasan koperasi ,koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam kota makassar	Jumlah pemeriksaan dan pengawasan koperasi ,koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam kota makassar	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	5450	4984	3,922,008,600	3,262,607,600	(659,401,000)	APBD	APBD			a	
03	2	01	01	Pengawasan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Manajemen pengelola dan peningkatan kualitas pengawasan kelembagaan koperasi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Manajemen pengelola dan peningkatan kualitas pengawasan kelembagaan koperasi	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	450	450	1,172,213,000	1,073,722,000	(98,491,000)	APBD	APBD			a	
					Jumlah Peserta yang mengikuti Peningkatan Pengawasan KSP dalam Penerapan Undang-undang perkoperasian	Jumlah Peserta yang mengikuti Peningkatan Pengawasan KSP dalam Penerapan Undang-undang perkoperasian	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	650	544									
					Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Pengawasan akuntabilitas koperasi dalam akses pembiayaan	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Pengawasan akuntabilitas koperasi dalam akses pembiayaan	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	600	600									
03	2	01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Pengawasan koperasi yang dilatih	Jumlah Pengawasan koperasi yang dilatih	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	750	675	2,749,795,600	2,188,885,600	(560,910,000)	APBD	APBD			a	
					Jumlah Penilaian koperasi berprestasi dan pemberian penghargaan	Jumlah Penilaian koperasi berprestasi dan pemberian penghargaan	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	500	500								a	
					Jumlah peserta gerakan masyarakat sadar koperasi (Gemaskop)	Jumlah peserta gerakan masyarakat sadar koperasi (Gemaskop)	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	840	655								a	
					Jumlah peserta revitalisasi koperasi	Jumlah peserta revitalisasi koperasi	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	750	700								a	
					Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pelaporan keuangan koperasi keuangan pemanfaatan teknologi informasi (DAK)	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pelaporan keuangan koperasi keuangan pemanfaatan teknologi informasi (DAK)	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	160	160								a	
					Jumlah Peserta yang mengikuti penyusunan laporan RAT bagi koperasi	Jumlah Peserta yang mengikuti penyusunan laporan RAT bagi koperasi	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	750	700								a	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar

2	17	04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang Sehat	Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang Sehat	Koperasi dan UMKM di Kota Makassar	Koperasi dan UMKM di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	80%	80%	2,354,133,800	1,770,571,800	(583,562,000)	APBD	APBD				Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar
17	04	2	01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Kota Makassar yang dilakukan	Jumlah penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Kota Makassar yang dilakukan	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	3220	2500	2,354,133,800	1,770,571,800	(583,562,000)	APBD	APBD			a
04	2	01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah monitoring keragaan KSP/USP	Jumlah monitoring keragaan KSP/USP	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	12	12	1,227,222,800	929,855,800	(297,367,000)	APBD	APBD			a
					Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan peralatan kesehatan dalam upaya peningkatan kinerja manajemen KSP/USP	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan peralatan kesehatan dalam upaya peningkatan kinerja manajemen KSP/USP	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	720	570								a
					Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pedoman penilaian kesehatan koperasi	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pedoman penilaian kesehatan koperasi	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	870	580								a
04	2	01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan/Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti BIMTEK terhadap predikat penilaian kesehatan koperasi bagi KSP/USP	Jumlah Peserta yang mengikuti BIMTEK terhadap predikat penilaian kesehatan koperasi bagi KSP/USP	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	840	560	1,126,911,000	840,716,000	(286,195,000)	APBD	APBD			a
					Jumlah peserta yang mengikuti strategi & metode penguatan struktur terhadap penghargaan koperasi	Jumlah peserta yang mengikuti strategi & metode penguatan struktur terhadap penghargaan koperasi	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	690	690								a
					Jumlah Peserta yang mengikuti penghargaan penilaian kesehatan koperasi bagi pelaku KSP/USP	Jumlah Peserta yang mengikuti penghargaan penilaian kesehatan koperasi bagi petaku KSP/USP	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	100	100								a

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar

2	17	05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Persentase SDM koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Koperasi dan UMKM di Kota Makassar	Koperasi dan UMKM di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	80%	80%	1,710,256,000	1,382,456,000	(327,800,000)	APBD	APBD				Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar			
17	05	2	01	Pendidikan dan Pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	Jumlah koperasi dan UKM yang meningkat kapasitas usaha dan kualitas pelayanannya	Jumlah koperasi dan UKM yang meningkat kapasitas usaha dan kualitas pelayanannya	Koperasi dan UMKM di Kota Makassar	Koperasi dan UMKM di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	2470	2005	1,710,256,000	1,382,456,000	(327,800,000)	APBD	APBD			a			
05		2	01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta penerapan sistem informasi akuntansi terhadap laporan keuangan koperasi akuntansi	Jumlah Peserta Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap laporan Keuangan Koperasi (Akuntansi Komputerisasi dan Auditing/Fraud)	Koperasi dan UMKM di Kota Makassar	Koperasi dan UMKM di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	560	390	1,710,256,000	1,382,456,000	(327,800,000)	APBD	APBD			a		
					Jumlah peserta peningkatan kapasitas usaha dan kualitas pelayanan bagi koperasi dan UMKM (Pelayanan Prima, Informasi teknologi, strategi pemasaran, packaging /pengemasan dan penggunaan merek usaha)	Jumlah peserta peningkatan kapasitas usaha dan kualitas pelayanan bagi koperasi dan UMKM (Pelayanan Prima, Informasi teknologi, strategi pemasaran, packaging /pengemasan dan penggunaan merek usaha)	Koperasi dan UMKM di Kota Makassar	Koperasi dan UMKM di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	675	625									a		
					Jumlah peserta peningkatan pemahaman dan pengetahuan	Jumlah Peserta Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perpajakan Bagi Koperasi dan UKM	Koperasi dan UMKM di Kota Makassar	Koperasi dan UMKM di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	560	500										a	
					Jumlah peserta peningkatan tehnik penyusunan laporan keuangan koperasi berbasis akrual	Jumlah peserta peningkatan tehnik penyusunan laporan keuangan koperasi berbasis akrual	Koperasi dan UMKM di Kota Makassar	Koperasi dan UMKM di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	675	490										a	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar

2	17	06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang meningkat kualitasnya	Persentase koperasi yang meningkat kualitasnya	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	80%	80%	2,485,973,200	2,385,219,200	(100,754,000)	APBD	APBD				Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	
17	06	2	01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang meningkat kualitas dan produktivitas serta nilai tambah koperasi	Jumlah koperasi yang meningkat kualitas dan produktivitas serta nilai tambah koperasi	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	2778	2330	2,485,973,200	2,385,219,200	(100,754,000)	APBD	APBD			a	
06	2	01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas ,nilai tambah ,akses pasar ,akses pembiayaan ,Penguatan Kelembagaan ,Penataan Manajemen,Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah peserta penerapan teknologi modern dalam manajemen usaha koperasi	Jumlah peserta penerapan teknologi modern dalam manajemen usaha koperasi	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	508	381	2,485,973,200	2,385,219,200	(100,754,000)	APBD	APBD			a	
					Jumlah peserta peningkatan dan pengembangan enterpreneurship koperasi	Jumlah peserta peningkatan dan pengembangan enterpreneurship koperasi	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	500	500								a	
					Jumlah peserta peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Jumlah peserta peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	520	334								a	
					Jumlah peserta peningkatan kapasitas pengurus koperasi	Jumlah peserta peningkatan kapasitas pengurus koperasi	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	375	365								a	
					Jumlah peserta peningkatan kualitas kelembagaan koperasi sekolah	Jumlah peserta peningkatan kualitas kelembagaan koperasi sekolah	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	375	250								a	
					Jumlah peserta peran kelompok strategi dalam membangun perkoperasian	Jumlah peserta peran kelompok strategi dalam membangun perkoperasian	Koperasi di Kota Makassar	Koperasi di Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang	Kec. Ujung Pandang	500	500								a	
					Jumlah peserta pengembangan potensi masyarakat dalam membentuk kelompok usaha/koperasi (Lorong Wisata)	Jumlah peserta pengembangan potensi masyarakat dalam membentuk kelompok usaha/koperasi (Lorong Wisata)		Kelompok Usaha dilorong Kota Makassar	Kec. Ujung Pandang			15								a	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar

2	17	07	Program Pemberdayaan usaha mikro kecil binaan menjadi usaha menengah (UMKM)	Meningkatnya usaha mikro kecil binaan menjadi usaha menengah	Meningkatnya usaha mikro kecil binaan menjadi usaha menengah	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Kota Makassar	Kota Makassar	80%	80%	7,430,736,500	3,905,410,250	(3,525,326,250)	APBD	APBD			Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	
17	07	2	01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan, Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM binaan	Jumlah UMKM binaan	UMKM di Kota Makassar	UMKM di Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	8573	5479	7,430,736,500	3,905,410,250	(3,525,326,250)	APBD	APBD		a	
17	07	2	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM	UMKM di Kota Makassar	UMKM di Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	15	15	1,563,709,000	1,502,709,000	(61,000,000)	APBD	APBD		a	Tambahan Pembuatan Sistem Smart Waroeng Koperasi dan UMKM
					Jumlah Peserta Fasilitas Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Mikro	Jumlah Peserta Fasilitas Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Mikro	UMKM di Kota Makassar	UMKM di Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	900	670							a	
					Jumlah Peserta Pelatihan Optimalisasi Digital Marketing bagi UMKM (DAK)	Jumlah Peserta Pelatihan Optimalisasi Digital Marketing bagi UMKM (DAK)	UMKM di Kota Makassar	UMKM di Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	180	180							a	
					Jumlah Peserta Peningkatan Inovasi berbasis Teknologi dalam mengembangkan Potensi Usaha Mikro	Jumlah Peserta Peningkatan Inovasi berbasis Teknologi dalam mengembangkan Potensi Usaha Mikro	UMKM di Kota Makassar	UMKM di Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	900	780							a	
						Terlaksananya Pembuatan Smart Waroeng Koperasi dan UMKM	UMKM di Kota Makassar	UMKM di Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	1	1							a	
7	2	01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan Pembuatan Kotak Tisu Lontara	Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan Pembuatan Kotak Tisu Lontara	UMKM di Kota Makassar	UMKM di Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	700	282	3,518,817,500	669,311,250	(2,849,506,250)	APBD	APBD		a	
					Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan Jumlah Pembuatan Masker Fashion	Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan Jumlah Pembuatan Masker Fashion	UMKM di Kota Makassar	UMKM di Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	600	170							a	
					Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan Pembuatan Pengembangan Kreativitas Merajut	Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan Pembuatan Pengembangan Kreativitas Merajut	UMKM di Kota Makassar	UMKM di Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	600	255							a	
					Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan Pengelolaan Makanan	Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan Pengelolaan Makanan	UMKM di Kota Makassar	UMKM di Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	700	200							a	
					Jumlah UMKM yang mengikuti Sablon	Jumlah UMKM yang mengikuti Sablon	UMKM di Kota Makassar	UMKM di Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	600	100							a	
					Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan Tata Rias	Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan Tata Rias	UMKM di Kota Makassar	UMKM di Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	600	340							a	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar

07	2	01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Kemudahan Perizinan	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Kemudahan Perizinan	UMKM di Kota Makassar	UMKM di Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	285	285	630,904,000	192,204,000	(438,700,000)				a		
07	2	01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Peserta Pengembangan Bisnis Plan dan manajemen usaha bagi UMKM	Jumlah Peserta Pengembangan Bisnis Plan dan manajemen usaha bagi UMKM	UMKM di Kota Makassar	UMKM di Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	828	716	1,717,306,000	1,541,186,000	(176,120,000)	APBD	APBD		a		
					Jumlah Peserta Peningkatan Keterampilan Berwirausaha bagi anak putus sekolah	Jumlah Peserta Peningkatan Keterampilan Berwirausaha bagi anak putus sekolah	Anak Putus Sekolah	UMKM di Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	840	750							a		
					Jumlah Peserta Peningkatan Teknik pemasaran Digital bagi UMKM (strategi branding, promosi dan perluasan pasar berbasis sustainability)	Jumlah Peserta Peningkatan Teknik pemasaran Digital bagi UMKM (strategi branding, promosi dan perluasan pasar berbasis sustainability)	UMKM di Kota Makassar	UMKM di Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	840	750									
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang meningkat Volume /omsetnya	Persentase UMKM yang meningkat Volume /omsetnya	UMKM di Kota Makassar	UMKM di Kota Makassar	Kota Makassar	Kota Makassar	65%	65%	2,270,657,000	2,608,528,476	337,871,476	APBD	APBD			Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar		
17	8	2	01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil yang dikembangkan	Jumlah Usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil yang dikembangkan	UMKM di Kota Makassar	UMKM di Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	990	996	2,270,657,000	2,608,528,476	337,871,476	APBD	APBD	a			
17	08	01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan teknologi	Jumlah Operasional UPT Kanrerong	Jumlah Operasional UPT Kanrerong	UMKM di Kota Makassar	UMKM di Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	12	12	2,270,657,000	2,608,528,476	337,871,476	APBD	APBD	a	Desain Smart Kanrerong Karebosi, Desain Smart Kanrerong Nikel, Pengadaan lettere		
					Jumlah Promosi yang dilaksanakan	Jumlah Promosi yang dilaksanakan	UMKM di Kota Makassar	UMKM di Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	8	5						a			
					Jumlah Sentra Galery yang dilaksanakan	Jumlah Sentra Galery yang dilaksanakan	UMKM di Kota Makassar	UMKM di Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	1	1						a			
					Jumlah UMKM yang mengikuti lomba antar kecamatan	Jumlah UMKM yang mengikuti lomba antar kecamatan	UMKM di Kota Makassar	UMKM di Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	150	150						a			
					Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan Pemanfaatan Informasi Teknologi	Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan Pemanfaatan Informasi Teknologi	UMKM di Kota Makassar	UMKM di Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	420	420						a			
					Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan Peningkatan teknis desain	Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan Peningkatan teknis desain	UMKM di Kota Makassar	UMKM di Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	420	420						a			
JUMLAH													28,478,000,000	21,481,905,502	(6,996,094,498)	APBD	APBD				

2.5. Perjanjian Kinerja (Triwulanan)

Dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Diharapkan melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

1. Akuntabilitas transparansi dan kinerja aparatur;
2. Wujud nyata komitmen;
3. Dasar penilaian, penghargaan dan sanksi;
4. Dasar evaluasi kinerja aparatur;
5. Dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise;
6. Dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun penjabaran kondisi realisasi kegiatan yang tertuang dalam perjanjian kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya Lembaga Koperasi Aktif dan Koperasi Sehat	Persentase koperasi aktif	75%
		Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang sehat	60%

Program

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Anggaran

- Rp.3.262.607.600;
Rp.1.770.571.800;
Rp.2.385.219.200;

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
2.	Meningkatnya Jumlah	Persentase usaha mikro	80%

usaha kecil dan menengah yang berdaya saing tinggi dan memenuhi syarat dan standarisasi pasar	Jumlah Produk UMKM yang terstandarisasi	35 Produk
	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	30%

Program

Anggaran

- Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, Dan usaha mikro (UMKM)** Rp.3.905.410.250;
- Program Pengembangan UMKM** Rp.2.608.528.476;

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
3.	Meningkatnya, kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme SDM koperasi & UMKM Kota Makassar	Persentase koperasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas	80%
		Jumlah UKM mendapatkan peningkatan kapasitas SDM	1.500 UKM

Program

Anggaran

- Program Pendidikan dan pelatihan perkoperasian** Rp.1.382.456.00

Dalam penerapan penjabaran visi misi Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar terumuskan 6 program utama dan 1 program penunjang yang mana dalam implementasi kegiatannya terlaksana oleh struktur-struktur personil dan pejabat internal instansi. Berikut tahapan-tahapan, realisasi dan laporan.

Triwulan I

Dalam kurun waktu januari- Maret program-program Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar melaksanakan kegiatan yang terbatas di karenakan arus kas yang ditetapkan pihak anggaran sebesar 20%, sehingga ada Batasan pelaksanaan yang terprioritaskan bersifat administratif .

Triwulan II

Dalam kurun waktu April-juni beberapa bidang mencanangkan/melaksanakan implementasi kegiatan kepada objek kegiatan di antaranya bidang pembiayaan dan simpan pinjam melaksanakan monitoring langsung terhadap objek kegiatan di antaranya ke badan-badan koperasi di Kota Makassar untuk mengkategorikan spesifikasi kriteria dari pada koperasi sehat. Selain dari pada idenetifikasi koperasi sehat juga dilaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap badan-badan koperasi berpa pemeriksaan laporan keuangan badan koperasi. Hasil identifikasi kegiatan ini selanjutnya di kawal oleh kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Triwulan III

Pada tahap ini indeks penacapaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar banyak terealisasi melalui kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi. Pemberdayaan yang di maksud adalah berupa penyuluhan-penyuluhan penguatan modal, peningkatan SDM, dan registrasi perijinan guna meningkatkan kualitas badan koperasi yang bermuara pada tingkat kepercayaan masyarakat meningkat terhadap suatu badan koperasi. Serta membina SDM dalam hal ini pengurus koperasi agar memiliki daya saing.

Selain dari pada pemberdayaan dan perlindungan. Hasil dari pada identifikasi dari kegiatan sebelumnya yaitu identifikasi koperasi sehat pada tahap ini di lakukan tindak lanjut atas identifikasi tersebut yang diharapkan masing-masing badan koperasi mampu menselaraskan tata Kelola dengan situasi yang diharapkan.

Triwulan IV

Selain dari pada fokus terhadap pembinaan badan-badan koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar juga focus terhadap perkembangan UKM. Hal ini dibuktikan melalui program kerja walikota dan wakil walikota makassar melalui pencaanangan Kanrerong dan Lorong wisata. Pada kesempatan ini Dinas Koperasi Kota Makassar selaku salah satu pihak terkait yang berkewajiban melaksanakan dan mensukseskan program kerja tersebut. Khusus program kerja Lorong wisata ini di lakukan melalui hasil kordinasi dengan induk kegiatan yaitu Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar.

Pada bagian ini Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar berperan serta melakukan pemetaan UKM di 5.000 Lorong , 153kelurahan, 15 kecamatan. Pemetaan ini bertujuan untuk menselaraskan jenis-jenis UKM agar memiliki daya saing dan memudahkan promosi hasil produksi berbasis wilayah (potensi wilayah) selain itu di harapkan menjadi tujuan wisata dengan muatan UKM.

2.6 Instrumen Pendukung Pencapaian Kinerja

Sebagai satuan kerja daerah yang membidangi ekonomi, tentu sangat diharapkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat utamanya dalam hal peningkatan pendapatan melalui faktor-faktor berupa produksi, pemasaran, dan penjualan. Dikarenakan hal itu dinas Koperasi dan UKM di harapkan mampu membaca situasi perkembangan yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Wujud dari pada hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat terimplementasikan melalui program-program yang tertuang dalam Visi-misi Kepala daerah dan wakil kepala Daerah yang kemudian dijabarkan melalui kerja-kerja Dinas terkait, yang mana Dinas terkait mampu menjaga Instrumen Selarasnya kegiatan para pemangku kepentingan Mulai dari pemerintah kota makassar secara umum, Dinas Koperasi dan UKM, para pelaku UKM dan badan -badan koperasi, dan bermuara pada kepuasan masyarakat.

Terkait dengan hal di atas selaku pelaksana teknis kebijakan pemerintah bidang ekonomi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar mencanangkan Langkah Langkah yang di anggap mampu menjadi jawaban kondisi ekonomi beserta praktek prktek solusinya. Adapun di maksud sebagai Langkah dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar meliputi Program Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi, Program penilaian Kesehatan koperasi, Program pendidikan dan Latihan perkoperasian, Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi, Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro.

A. Internal Pemerintah

Dalam setiap Lembaga/badan tersusun beberapa unsur untuk mendukung kerja-kerja suatu instansi. Adapun cakupan dalam unsur tersebut berupa instrument pendukung internal dan eksternal.

1. Dinas Perdagangan

Pada umumnya suatu lambaga/ badan dalm Menyusun kegiatan kegiatan sangat memperhitungkan potensi-potensi yang tercakup dalam internal badan itu sendiri. Dalam konstruksi pemerintah daerah hal yang terkait ke dalam faktor-faktor internal pemerintah daerah dalam bidang ekonomi adalah segala instansi yang mencakup urusan bidang ekonomi . Dalam program Dinas Koperasi sering berhubung tugas dengan beberapa instansi pemerintah daerah seperti Dinas Perdagangan. Hadirnya dinas Perdagagn sangat menunjang hasil muara daeri terciptanya peningkatan kondisi ekonomi masyarkat khususnya

pada sector perkoperasiandan UKM. Hal itu di buktikan bahwa objek dari pada pembinaan Dinas Koperasi identik dengan objek pembinaan Dinas perdagangan.

2. Instansi Kewilayahan (kelurahan/kecamatan)

Pembinaan Masyarakat secara umum dapat teralisasi dengan kuatnya kordinasi para pemangku kebijakan. Dimana masing- masing pemangku kebijakan memiliki peran. Tanpa terkecuali instansi kewilayah dalam hal ini lurah/camat. Hal ini di buktikan dengan keikut sertaan instansi kewilayahan dengan optimal demi menunjang visi/misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terjabarkan melalui program-program dinas koperasi dan UKM Kota Makassar.

B. Eksternal

1. Masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam pencapaian peningkatan pembangunan bidang ekonomi sangat strategis. Hal tersebut dikarenakan muara dari segala program kerja pemerintah daerah adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Tentu karena merupakan muara dari segala program Dinas koperasi dalam programnya berupa program pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota melalui penacnagan Gerakan Masyarakat Gemar Koperasi.

2. Swasta

Cakupan-cakupan penunjang dalam meningkatkan pembangunan bidang ekonomi tentu banyak melibatkan banyak pihak. Apalagi dewasa ini pihak swasta trus bertambah di kota makassar. Salah satu pencapaian utama pihak swsta adalah peningkatan produktifitas dan penjualan hasil produksi. Oelh karena itu demi menjamin meningkatnya daya beli masyarakat, pihak swasta itu sendiri harus meilabtkan diri dalam bebrpa program pemerintah selain dari pada penunjang program pemerintah juga mrupakan ajang promosi dari produksi pihak swasta itu sendiri.

3. Tekhnologi.

Permasalahan yang umum ditemui, banyak dari pelaku usaha masih enggan mengenal teknologi internet untuk mengembangkan usahanya. Padahal pemanfaatan teknologi, informasi, dan jaringan internet semakin mudah dijangkau dan digunakan bahkan untuk orang awam sekalipun.

Masyarakat dewasa ini memiliki kreativitas yang beragam, hal itu sangat berpotensi membangun pembangunan sector ekonomi. Hanya saja sebagian orang tidak tahu cara membangun suatu produk menjadi dikenal dan punya potensi pasar yang luas dengan pemanfaatan teknologi internet.

Kondisi tersebut merupakan kesempatan yang untuk dimanfaatkan dalam mengadaptasi layanan berbasis teknologi untuk menjalankan pemasaran secara online, sehingga dari hal ini bisa menciptakan ragam peluang baru yang menguntungkan.

Oleh karena itu Dinas Koperasi dan UKM kota Makassar terus mendorong melalui kegiatan-kegiatannya untuk menunjang penggunaan teknologi . selain daripada basis pengenalan profil dari pada badan koperasi juga sebagai pemasaran hasil produksinya.

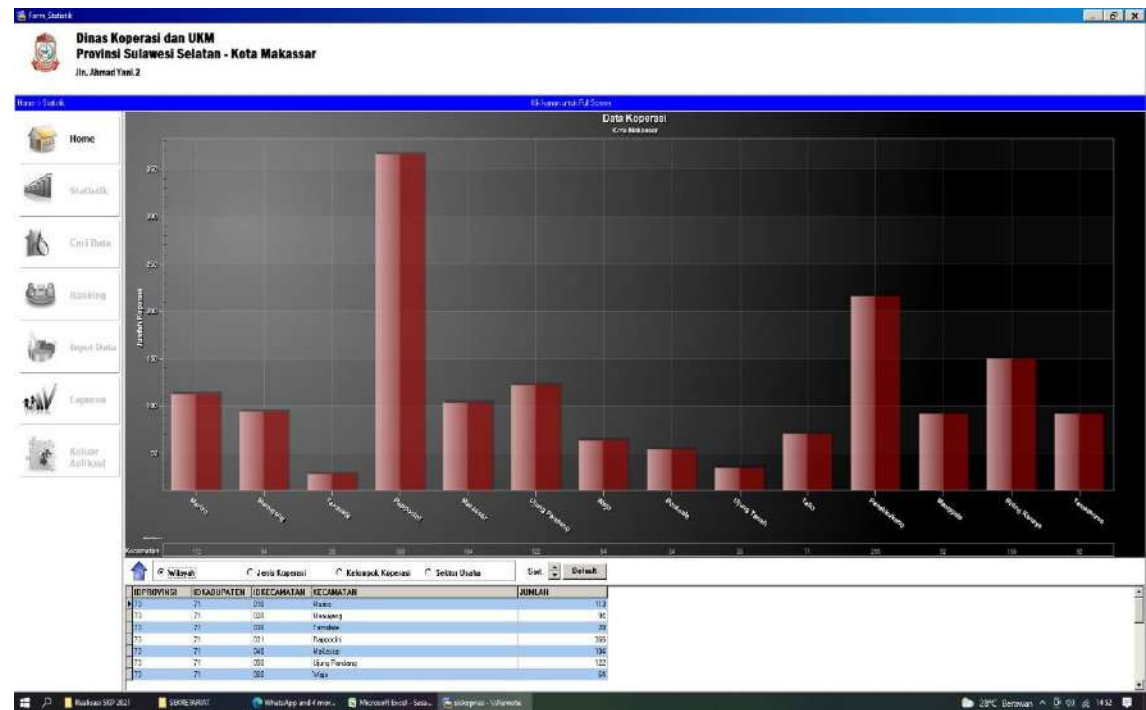
Untuk mendukung penerapan SAKIP Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar menggunakan instrument pengolah data yang disebut aplikasi ODS atau Online Data System. Aplikasi ODS merupakan aplikasi yang dimiliki Kementerian Koperasi dan UKM RI yang dapat diakses oleh Dinas Koperasi dan UKM diseluruh Indonesia.

Aplikasi ODS dibagi menjadi dua yaitu ODS Koperasi dan ODS UMKM yang memuat data UMKM yang nasional. Data koperasi yang diperoleh dari gabungan data koperasi kabupaten/kota sedangkan data UMKM merupakan rekap data by name by address UMKM seluruh kabupaten/kota yang telah dikompilasi dengan data UMKM hasil sensus ekonomi dari BPS. ODS koperasi telah berjalan di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar sejak tahun 2017. Aplikasi ODS juga mengelola sertifikasi Nomor Induk Koperasi (NIK) bagi koperasi sesuai dengan petunjuk dari Kementerian yang digunakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar ODS Koperasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar

NO	NIK	KOPERASI	NO BADAN HUKUM	TANGGAL BADAN HUKUM	ALIHAN
1	72702000000	Koperasi PegawaiNegeriMts	815581431	09/01/2011	A. Nurul, S2
2	72702000000	Koperasi PegawaiNegeriMts S. IP 25	9181	08/14/2008	A.A. Khotunnulhaq No. 95
3	72702000000	Koperasi PegawaiNegeriMts S. IP 25	1483	12/01/2008	A. Badriyasa No. 14
4	72702000000	Koperasi PegawaiNegeriMts PersewaMakassar	409-814M	10/01/2002	A. Badriyasa
5	72702000000	Koperasi PegawaiNegeriMts PKN Cendekasih	HE22SH	09/19/2002	A. Djennasno No. 2
6	72702000000	Koperasi PegawaiNegeriMts Stabat Koperasi	4029-814M	10/19/2002	A. H. Saadulloh S
7	72702000000	Koperasi PegawaiNegeriMts LadaLadaPakikan B1	2903	09/03/2006	A. Badriyasa No. 12
8	72702000000	Koperasi PegawaiNegeriMts Pnggali	248	03/14/2002	A. Badriyasa
9	72702000000	Koperasi PegawaiNegeriMts Kating DuluHoge 1	462-814M	12/01/2000	A. Badriyasa No. 30
10	72702000000	Koperasi PegawaiNegeriMts PersewaJayaDuluHoge 14	515-12214KOP	02/01/2005	A. Djennasno
11	72702000000	Koperasi PegawaiNegeriMts Pnggali	5029-814M/35	09/04/2002	A. PakaPnggali S
12	72702000000	Koperasi KaryawanSamsa	21-2H	03/29/2005	A. KasubNo. 4
13	72702000000	Koperasi PegawaiNegeriMts Bkt	12981H	07/19/2008	A. Bk. Saadulloh
14	72702000000	KOPERASI HYUNDAI PER	245-814M/100	03/19/2005	A. Rajani No. 58
15	72702000000	KOPERASI UJUNGJAYA 2 (PusatJaya2)	214-814M	11/21/2007	A. DUAJAYA No. 6
16	72702000000	KOPERASI KAWANAN Samsa	214-814M	03/29/2005	A. KasubNo. 4
17	72702000000	KOPERASI KAWANAN Samsa	214-814M	03/29/2005	A. KasubNo. 4
18	72702000000	Koperasi PersewaMts	698-814M/814/2000	02/24/2000	A. Saadulloh No. 12
19	72702000000	Koperasi SamsaKawananSamsa	800-814/100	07/28/2003	A. Cendekasih
20	72702000000	Koperasi KawanSamsa	4026-814	03/11/2002	A. Jaggan
21	72702000000	Koperasi PegawaiNegeriMts Bkt	448-814M	03/19/2005	A. Bkt. Saadulloh No. 14
22	72702000000	Koperasi PegawaiNegeriMts Bkt	515-12214KOP	02/01/2005	A. Bkt. Saadulloh No. 10
23	72702000000	KOPERASI UJUNGJAYA 2	245-814M	03/19/2005	A. RAJANI No. 58
24	72702000000	KOPERASI ESTABEMEN	81-304H	03/19/2005	A. Saadulloh No. 2
25	72702000000	Koperasi KawanSamsa	858-814/2004/2001	11/29/2001	A. Bkt. U. 31 No. 24
26	72702000000	Koperasi KawanSamsa	858-814	07/21/2008	A. Saadulloh
27	72702000000	Koperasi KawanSamsa	858-814	09/13/2008	A. Saadulloh
28	72702000000	KawanSamsa	800-814/2004/2001	04/23/2005	A. Saadulloh
29	72702000000	KawanSamsa	702-814/2004/2001	07/29/2001	A. Saadulloh
30	72702000000	KawanSamsa	800-814/2004/2001	07/29/2001	A. Saadulloh
31	72702000000	KawanSamsa	800-814/2004/2001	07/29/2001	A. Saadulloh
32	72702000000	KawanSamsa	800-814/2004/2001	07/29/2001	A. Saadulloh
33	72702000000	KawanSamsa	800-814/2004/2001	07/29/2001	A. Saadulloh
34	72702000000	KawanSamsa	800-814/2004/2001	07/29/2001	A. Saadulloh
35	72702000000	KawanSamsa	800-814/2004/2001	07/29/2001	A. Saadulloh
36	72702000000	KawanSamsa	800-814/2004/2001	07/29/2001	A. Saadulloh
37	72702000000	KawanSamsa	800-814/2004/2001	07/29/2001	A. Saadulloh

Gambar I. Tampilan Aplikasi ODS



Gambar II. Tampilan Aplikasi ODS

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Persasaran, Indikator, Formula (Sistem Data)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 7 (Tujuh) Program (6 program strategik dan 1 program operasional) dan 14 kegiatan yaitu 8 kegiatan penunjang dan 6 kegiatan utama 40 subkegiatan walaupun di tahun 2021 pemerintah kota atau Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar masih mengalami masa pandemi untuk menghadapi perbaikan ekonomi khususnya di Usaha Kecil Menengah yang menjadi tugas utama Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar untuk meningkatkan perekonomian. Jumlah pagu anggaran pokok Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar sebesar Rp.28.478.0000.000; (Dua Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp.21.481.905.502; (Dua Puluh Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Lima Ratus Dua Rupiah) dengan capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar sebesar 94% dari total penyerapan realisasi anggaran sebesar Rp.18.847.640.395; (Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) atau 87.74%.

Tabel Rekapitulasi data pelaksanaan perubahan anggaran daerah menurut program dan kegiatan sebagai berikut :

NO	Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(RP)	(%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.304.234.900	6.167.112.176	(2.137.122.724)	(25.74)
	Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD				
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	101.947.000	106.265.416	4.318.416	4.24
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Pendidikan dan Pelatihan	120.000.000	0	(120.000.000)	(100.00)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Makassar

NO	Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(RP)	(%)
	Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	542.000.000	119.000.000	(423.000.000)	(78.04)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	2.400.012	0	(2.400.012)	(100.00)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	298.515.600	189.967.600	(108.548.000)	(36.36)
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	42.310.000	35.310.000	(7.000.000)	(16.54)
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	3.922.008.600	3.262.607.600	(659.401.000)	(16.81)
	Pengawasan Kekuatan ,Kesehatan,Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan kabupaten/Kota	1.172.213.000	1.073.722.000	(98.491.000)	(8.40)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Makassar

NO	Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(RP)	(%)
	Pemeriksaan Koperasi peraturan undangan kabupaten /kota Ketauhan Terhadap perundang-kewenangan	2.749.795.600	2.188.885.600	(560.910.000)	(20.40)
	Program Kesehatan Koperasi				
	Penilaian KSP/USP				
	Pelaksanaan Kesehatan Koperasi Kabupaten/kota Penilaian KSP/USP Kewenangan	1.227.222.800	929.855.800	(297.367.000)	(24.23)
	Penghargaan KSP/USP Kewenangan Kabupaten/Kota Kesehatan Koperasi	1.126.911.000	840.716.000	(286.195.000)	(25.40)
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1.710.256.000	1.382.456.000	(327.800.000)	(19.17)
	Peningkatan dan Perkoperasian SDM Koperasi Pemahaman Pengetahuan serta kapasitas dan kompetensi	1.710.256.000	1.382.456.000	(327.800.000)	(19.17)
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	2.485.973.200	2.385.219.200	(100.754.000)	(4.05)
	Pemberdayaan Produktivitas, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Manajemen, Peningkatan Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Penataan Standarisasi,	2.485.973.200	2.385.219.200	(100.754.000)	(4.05)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Makassar

NO	Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(RP)	(%)
	dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah ,Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	7.430.736.500	3.905.410.250	(3.525.326.250)	(47.44)
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha mikro	1.563.709.000	1.502.709.000	(61.000.000)	(3.90)
	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	3.518.817.500	669.311.250	(2.849.506.250)	(80.98)
	Pembeedayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	1.717.306.000	1.541.186.000	(176.120.000)	(10.26)
	Program Pengembangan UMKM	2.560.650.476	2.608.528.476	47.878.000	(1.87)
	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan pengolahan,pemasaran,SDM ,serta Desain dan Teknologi	2.560.650.476	2.608.528.476	47.878.000	(1.87)

Program anggaran belanja daerah pada **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.8.304.234.900; (Delapan Milyar Tiga Ratus Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah) pagu setelah perubahan sebesar Rp.6.167.112.176; (Enam Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah). Kegiatan-kegiatan yang mengalami perubahan anggaran di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah mengalami perubahan anggaran pada subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada

SKPD dikarena adanya utang belanja Jaminan Kesehatan (BPJS) dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.101.947.000; (Seratus Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) anggaran setelah perubahan sebesar Rp.106.265.416; (Seratus Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah) bertambah sebanyak Rp.4.318.416; (Empat Juta Tiga Ratus Delapan belas Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah) atau 4.24% kenaikan dari perubahan anggaran. Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah mengalami refocussing anggaran pada subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dengan pagu sebelum perubahan sebesar Rp.120.000.000; (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) setelah perubahan di Rp.0.00 (Dinolkan) atau 100% di refocussing. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mengalami perubahan anggaran atau refocussing anggaran pada subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD pagu sebelum perubahan sebesar Rp.542.000.000; (Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.119.000.000; (Seratus Sembilan belas Juta Rupiah) total refocussing anggaran sebesar Rp.423.000.000; (Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) atau sebanyak 78.04 %. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mengalami perubahan anggaran atau refocussing anggaran pada subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.2.400.012; (Dua Juta Empat Ratus Ribu Dua Belas Rupiah) setelah perubahan sebesar di Rp.0.00 (Dinolkan) atau 100% di refocussing. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.298.515.600; (Dua Ratus Juta Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.189.967.600; (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) total pengurangan refocussing anggaran sebesar Rp.108.548.000; (Seratus Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) atau sebesar 36.36% di refocussing dan subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya juga mengalami pengurangan anggaran dengan pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.42.310.000; (Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.35.310.000; (Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) total pengurangan anggaran yang direfocussing sebesar Rp.7.000.000; (Tujuh Juta Rupiah) atau 16.54% direfocussing.

Selanjutnya pada **Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi** pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.3.922.008.600; (Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua

Juta Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.3.262.607.600; (Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan total refocussing anggaran sebesar Rp.659.401.000; (Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Satu Ribu Rupiah) atau sebesar 16.81% anggaran yang direfocussing. Kegiatan yang mengalami perubahan anggaran pada sub-sub kegiatan dengan Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi yaitu Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota pada subkegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan , serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.1.172.213.000; (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.1.073.722.000; (Satu Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan total refocussing anggaran sebesar Rp.98.491.000; (Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) atau 8.40% dan Sub Kegiatan Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota dengan pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.2.749.795.600; (Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.2.188.885.600; (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan total refocussing anggaran sebesar Rp.560.910.000; (Lima Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) atau 20.40%.

Selanjutnya **Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi** juga mengalami pengurangan anggaran pada kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota di sub kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.1.227.222.800; (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.929.855.800; (Sembilan Ratus Juta Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan total refocussing sebesar Rp.297.367.000; (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau 24.23%.

Selanjutnya **Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian** pada kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota mengalami perubahan anggaran yang terefocussing di sub kegiatan

Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.1.710.256.000; (Satu Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan total anggaran yang di refocussing sebesar Rp.1.382.456.000; (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) atau 19.17%.

Selanjutnya **Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi** pada kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota mengalami perubahan anggaran dengan pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.2.485.973.200; (Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.2.385.219.200; (Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan total anggaran refocussing sebesar Rp.100.754.000; (Seratus Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) atau 4.05%.

Selanjutnya **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)** pada kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan mengalami perubahan anggaran di sub kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro dengan pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.1.563.709.000; (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.1.502.709.000; (Satu Milyar Lima Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Rupiah) dengan total anggaran refocussing sebesar Rp.61.000.000; (Enam Puluh Satu Juta Rupiah) atau 3.90%. Sub kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro mengalami perubahan anggaran dari pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.3.518.817.500; (Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.669.311.250; (Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan total anggaran di refocussing sebesar Rp.2.849.506.250; (Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) atau 80.98%. sub kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro mengalami perubahan anggaran dari pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.630.904.000; (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.192.204.000; (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Ribu Rupiah) dengan total anggaran di refocussing sebesar Rp.438.700.000; (Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) atau 69.54%. sub kegiatan Pemberdayaan

Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro mengalami perubahan anggaran di refocussing sebelum perubahan sebesar Rp.1.717.306.000; (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.1.541.186.000; (Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan total refocussing anggaran sebesar Rp.176.120.000; (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau 10.26%.

Selanjutnya **Program Pengembangan UMKM** pada kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil mengalami kenaikan anggaran di sub kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi dari pagu anggaran sebelum refocussing sebesar Rp. 2.560.650.476; (Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) setelah perubahan sebesar Rp.2.608.528.476; (Dua Milyar Enam Ratus Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) dengan total kenaikan anggaran sebesar Rp.47.878.000; (Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Tujuh Puluh Ribu Rupiah) atau 1.87%.

Tabel Capaian kinerja, persasaran dan Indikator Kinerja Sub Bagian Sekretariat sebagai berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota	Persentase Ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	Persentase	100%	100%	100%
	Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (Kepegawaian, Perencanaan, dan Keuangan)	Persentase	90%	100%	111%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Makassar

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN
	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persentase	90%	75%	83%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Renja SKPD	Dokumen	2	2	100%
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100%
	Jumlah Forum SKPD yang dilaksanakan	Kali	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA -SKPD	Dokumen	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA –SKPD	Dokumen	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA –	Dokumen	1	1	100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Makassar

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN
Dokumen Perubahan DPA-SKPD	SKPD				
Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD	Dokumen	1	1	100%
	Jumlah Penyusunan Laporan Perjanjian Kinerja SKPD	Dokumen	1	1	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD	Dokumen	1	1	100%
	Jumlah Evaluasi Renja SKPD	Dokumen	4	4	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	Dokumen	33	33	100%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang disediakan	Dokumen	12	12	100%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Dokumen	6	6	100%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan yang tersedia	Dokumen	2	0	0

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Makassar

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Dokumen	5	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan bulanan/semester SKPD yang disusun	Dokumen	2	0	0
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah yang dihasilkan	Dokumen	12	12	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Berserta kelengkapannya yang diadakan	Orang	72	72	100%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian yang	Bulan	12	12	100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Makassar

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN
	disusun				
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang diadakan	Orang	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	4	3	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Bulan	12	12	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jenis	5	5	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar	Kali	12	12	100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Makassar

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN
	Daerah yang disediakan				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesinnya yang tersedia	Unit	7	3	43%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Administrasi Surat Menyurat	Bulan	12	12	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	Jenis	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah mobil jabatan yang mendapatkan pemeliharaan dan	Unit	1	1	100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Makassar

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pajak kendaraan				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional yang tersedia	Unit	13	13	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang mendapatkan pemeliharaan	Unit	51	51	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah jasa kebersihan yang tersedia	Bulan	12	12	100%

Pengukuran Indikator Kinerja tabel diatas pada sub bagian sekretariat dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota mempunyai 3 (tiga) indikator program yaitu yang pertama **Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah** dengan target kinerja 100% realisasi kinerja sebesar 100% tingkat capaian sebesar 100% yang indikator kedua **Indeks kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian,Perlengkapan dan Keuangan)** dengan target kinerja sebesar 90% realisasi kinerja sebesar 100% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 111% yang ketiga **Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik** dengan target kinerja sebesar 90% realisasi kinerja sebesar 75% dengan capaian kinerja

sebesar 83%. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah mempunyai 7 (Tujuh) sub kegiatan yaitu :

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah memiliki 3 (Tiga) indikator yang pertama **Jumlah dokumen penyusunan renja SKPD** dengan target indikator 2 dokumen realisasi kinerja 2 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 100%, indikator yang kedua **Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah** dengan target kinerja 1 dokumen realisasi kinerja 1 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 100%, indikator yang ketiga **Jumlah forum SKPD yang dilaksanakan** dengan target kinerja 1 kali realisasi kinerja 1 kali dengan capaian kinerja sebesar 100% dari ketiga indikator sub kegiatan memenuhi target dengan capaian kinerja baik;
2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan indikator **Jumlah dokumen RKA-SKPD** target kinerja 1 dokumen realisasi kinerja 1 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 100%;
3. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD dengan indikator **Jumlah dokumen perubahan RKA –SKPD** target kinerja 1 dokumen realisasi kinerja 1 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 100%;
4. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD dengan indikator **Jumlah dokumen DPA –SKPD** target kinerja 1 dokumen realisasi kinerja 1 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 100%
5. Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan **indikator Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD** target kinerja 1 dokumen realisasi kinerja 1 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 100%;
6. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD terdiri dari 2 indikator dengan indikator pertama **Jumlah Penyusunan indikator kinerja utama (IKU) SKPD** target kinerja 1 dokumen realisasi 1 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 100%, indikator kedua **Jumlah penyusunan laporan perjanjian kinerja SKPD** target kinerja 1 dokumen realisasi kinerja 1 dokumen dengan capaian kinerja 100%;
7. Evaluasi kinerja perangkat daerah terdiri dari 2 indikator dengan indikator pertama **Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD** target kinerja 1 dokumen realisasi kinerja 1 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 100%, indikator kedua **Jumlah evaluasi renja SKPD** target kinerja 4 dokumen realisasi kinerja 4 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri 6 (enam) sub kegiatanyaitu :

1. Penyediaan gaji dan tunjangan dengan indikator **Jumlah gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan** target kinerja 33 dokumen realisasi 33 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 100%;
2. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dengan indikator **Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan** target kinerja 12 dokumen realisasi kinerja 12 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 100%;
3. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD dengan indikator **Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi penatausahaan dan pengujian/verifikasi** target kinerja 6 dokumen realisasi kinerja 6 dengan capaian kinerja sebesar 100%;
4. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD dengan indikator **Jumlah dokumen keuangan yang tersedia** target kinerja 2 dokumen tidak ada realisasi kinerja dikarenakan tidak penunjukan narasumber;
5. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan indikator **Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun** target kinerja 5 dokumen tidak ada realisasi kinerja dikarenakan tidak penunjukan narasumber;
6. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran SKPD dengan indikator **Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/semester SKPD yang disusun** target kinerja 2 dokumen tidak ada realisasi kinerja dikarenakan tidak penunjukan narasumber.

Kegiatan Administrasi Milik Daerah pada Perangkat Daerah mempunyai 1 sub kegiatan yaitu :

1. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dengan indikator **Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah yang dihasilkan** target kinerja 12 bulan realisasi kinerja 12 bulan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :

1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dengan indikator **Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya** yang diadakan target kinerja 72 orang realisasi kinerja 72 orang dengan capaian kinerja sebesar 100%;

2. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian dengan indikator **Jumlah laporan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang disusun** target kinerja 12 bulan realisasi kinerja 12 bulan dengan capaian kinerja sebesar 100%;
3. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dengan indikator **Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang diadakan**, sub kegiatan ini tidak terealisasi dikarenakan pengurangan anggaran atau refocussing anggaran.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu :

1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan indikator **Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan** target kinerja 4 jenis realisasi 3 jenis dengan capaian kinerja sebesar 75%;
2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan indikator **Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia** target kinerja 12 bulan realisasi kinerja 12 bulan dengan capaian kinerja sebesar 100%;
3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan indikator **Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan** target kinerja 12 bulan realisasi kinerja 12 bulan dengan capaian kinerja sebesar 100%;
4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan indikator **Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan** target kinerja 5 jenis realisasi kinerja 5 jenis dengan capaian kinerja sebesar 100%;
5. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan indikator **Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah** yang disediakan target kinerja 12 kali realisasi kinerja 12 kali dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

1. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan indikator **Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang tersedia** target kinerja 7 unit realisasi kinerja 3 unit dengan capaian kinerja sebesar 43%.

Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan 2 sub kegiatan yaitu :

1. Penyediaan jasa surat menyurat dengan indikator terlaksananya **administrasi surat menyurat** target kinerja 12 bulan realisasi kinerja 12 bulan dengan capaian kinerja sebesar 100%;
2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dengan indikator **Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan** dengan sub kegiatan ini terfokus anggaran sehingga tidak ada realisasi kinerja.

Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terdiri 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

1. Penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan indikator **Jumlah mobil jabatan yang mendapatkan pemeliharaan dan pajak kendaraan** target kinerja 1 unit realisasi kinerja 1 unit dengan capaian kinerja sebesar 100%;
2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan indikator **Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional yang tersedia** target kinerja 13 unit realisasi kinerja 13 unit dengan capaian kinerja sebesar 100%;
3. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan indikator **Jumlah peralatan dan mesin kantor yang mendapatkan pemeliharaan** target kinerja 51 unit realisasi kinerja 51 unit dengan capaian kinerja sebesar 100 %;
4. Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan indikator **Jumlah jasa kebersihan yang tersedia** target kinerja 12 bulan realisasi anggaran 12 bulan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Tabel Capaian kinerja, persasaran dan Indikator Kinerja Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam sebagai berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN
Program Pengawasan dan Pemeriksaan	Persentase Koperasi yang diperiksa dan diawasi	Persentase	75%	19%	25%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Makassar

Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas	Jumlah peserta yang mengikuti manajemen pengelola dan peningkatan kualitas pengawasan kelembagaan koperasi	Koperasi	450	450	100%
Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan pengawasan KSP dalam penerapan UUD perkoperasian	Koperasi	650	450	100%
	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengawasan akuntabilitas koperasi dalam akses pembiayaan	Koperasi	600	600	100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Makassar

Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang sehat	Persentase	80%	74	93
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Monitoring Keragaan KSP/USP	Bulan	12	0	0
	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan penilaian kesehatan dalam upaya peningkatan kinerja manajemen KSP/USP	Koperasi	720	718	100%
	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi pedoman penilaian kesehatan koperasi	Koperasi	870	840	97
Penghargaan kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan	Jumlah peserta yang mengikuti BIMTEK	Koperasi	840	835	99%

Kabupaten/Kota	terhadap predikat penilaian kesehatan koperasi bagi KSP/USP				
	Jumlah Peserta yang mengikuti strategi & metode penguatan struktur terhadap penghargaan koperasi	Koperasi	690	690	100%
	Jumlah peserta yang mengikuti penghargaan penilaian kesehatan koperasi bagi pelaku KSP/USP	Koperasi	0	0	0

Pengukuran Indikator Kinerja tabel diatas pada bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam terdiri dari 2 program dengan program pertama (1) Program Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai 1 (satu) indikator program yaitu Persentase koperasi yang diperiksa dan diawasi dengan target kinerja 75% realisasi kinerja 19% dengan capaian kinerja sebesar 25% dengan kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota mempunyai 1 sub kegiatan yaitu :

- Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota mempunyai 3 indikator kinerja yaitu :

1. **Jumlah peserta yang mengikuti manajemen pengelola dan peningkatan kualitas pengawasan kelembagaan koperasi** dengan target kinerja 450 koperasi realisasi kinerja 450 koperasi dengan capaian kinerja 100%;
2. **Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan pengawasan KSP dalam penerapan UUD perkoperasian** dengan target kinerja 650 koperasi realisasi kinerja 638 koperasi dengan capaian kinerja 98%;
3. **Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengawasan akuntabilitas koperasi dalam akses pembiayaan** dengan target kinerja 600 koperasi realisasi kinerja 600 koperasi dengan capaian kinerja 100%.

Program kedua (2) yaitu program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota dengan kegiatan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

1. Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota mempunyai 3 indikator kinerja yang indikator kinerja pertama (1) Jumlah monitoring keragaan KSP/USP target kinerja 12 bulan tidak ada realisasi anggaran karena tidak dilaksanakan kegiatannya dari selaku bidang pembiayaan; indikator kinerja kedua (2) Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan penilaian kesehatan dalam upaya peningkatan kinerja manajemen KSP/USP target kinerja 720 koperasi realisasi kinerja 718 koperasi dengan capaian kinerja sebesar 100%; indikator kinerja ketiga (3) Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pedoman penilaian kesehatan koperasi target kinerja 870 koperasi realisasi kinerja 840 koperasi dengan capaian kinerja sebesar 97%.
2. Penghargaan kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan/kabupaten/kota mempunyai 3 indikator kinerja yang indikator kinerja pertama (1) Jumlah peserta yang mengikuti BIMTEK terhadap predikat penilaian kesehatan koperasi bagi KSP/USP target kinerja 840 koperasi realisasi kinerja 835 koperasi dengan capaian kinerja sebesar 99%; indikator kinerja kedua (2) Jumlah peserta yang mengikuti strategi & metode penguatan struktur terhadap penghargaan koperasi target kinerja 690 koperasi realisasi kinerja 690 koperasi dengan capaian kinerja sebesar 100%; indikator kinerja ketiga (3) Jumlah peserta yang mengikuti penghargaan penilaian kesehatan koperasi bagi pelaku KSP/USP tidak ada realisasi kinerja dikarenakan refocussing anggaran.

Tabel Capaian kinerja, persasaran dan Indikator Kinerja Bidang Kelembagaan Koperasi sebagai berikut :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Makassar

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN
Program Pengawasan dan Pemeriksaan	Persentase Koperasi yang diperiksa dan diawasi	Persentase	75%	19%	25%
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan yang dilatih	Koperasi	750	749	100%
	Jumlah Penilaian Koperasi berprestasi dan pemberian penghargaan	Koperasi	500	0	0
	Jumlah Peserta gerakan masyarakat sadar koperasi (Gemaskop)	Koperasi	840	840	100%
	Jumlah Peserta revitalisasi koperasi	Koperasi	750	744	99
	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pelaporan keuangan pemanfaatan teknologi informasi (DAK)	Koperasi	160	160	100%
	Jumlah Peserta yang mengikuti penyusunan laporan RAT bagi	Koperasi	750	740	99%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Makassar

	koperasi				
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang meningkat kualitasnya	Persentase	80%	70	88%
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar ,Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, standarisasi dan restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta peningkatan dan pengembangan entrepreneurship koperasi	Koperasi	500	250	250%
	Jumlah Peserta peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Koperasi	334	130	130%
	Jumlah Peserta peningkatan kapasitas pengurus koperasi	Koperasi	365	365	100
	Jumlah Peserta peningkatan kualitas kelembagaan koperasi sekolah	Koperasi	250	125	125%

	Jumlah Peserta Peran kelompok strategi dalam membangun perkoperasian	Koperasi	500	380	76%
	Pengembangan potensi masyarakat dalam membentuk kelompok usaha atau koperasi (lorong wisata)	Kecamatan	15	15	100%

Pengukuran Indikator Kinerja tabel diatas pada bidang Kelembagaan Koperasi terdiri dari 2 program dengan program pertama (1) Program Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai 1 (satu) indikator program yaitu **Persentase koperasi yang diperiksa dan diawasi** dengan target kinerja 75% realisasi kinerja 19% dengan capaian kinerja sebesar 25% dengan kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota mempunyai 1 sub kegiatan yaitu :

- Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan yaitu :
 1. **Jumlah pengawasan koperasi yang dilatih** target kinerja 750 koperasi realisasi kinerja 749 koperasi dengan capaian kinerja sebesar 100%;
 2. **Jumlah penilaian koperasi berprestasi dan pemberian penghargaan** target kinerja 500 koperasi, tidak ada realisasi kinerja dikarenakan refocussing anggaran;
 3. **Jumlah peserta gerakan masyarakat sadar koperasi (GEMASKOP)** target kinerja 840 koperasi realisasi kinerja 84 koperasi dengan capaian kinerja sebesar 100%;
 4. **Jumlah peserta revitalisasi koperasi** target kinerja 750 koperasi realisasi kinerja 744 koperasi dengan capaian kinerja sebesar 99%;
 5. **Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pelaporan keuangan koperasi keuangan pemanfaatan teknologi informasi (DAK)** target kinerja 160 koperasi realisasi kinerja 160 koperasi dengan capaian kinerja sebesar 100%;

6. **Jumlah peserta yang mengikuti penyusunan laporan RAT bagi koperasi** target kinerja koperasi realisasi kinerja 740 koperasi dengan capaian kinerja sebesar 99%.

Program kedua (2) yaitu Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan indikator kinerja **Persentase koperasi yang meningkat kualitasnya** target kinerja 80% realisasi kinerja 70% dengan capaian kinerja sebesar 88%, kegiatan dari program pemberdayaan dan perlindungan koperasi dengan kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota mempunyai 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pemberdayaan peningkatan produktivitas ,nilai tambah,akses pasar,akses pembiayaan,penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota terdiri dari 7 (tujuh) indikator kinerja sebagai berikut :

1. **Jumlah peserta penerapan teknologi modern dalam manajemen usaha koperasi** target kinerja 381 koperasi realisasi kinerja 381 koperasi dengan capaian kinerja sebesar 100%;
2. **Jumlah peserta peningkatan dan pengembangan entrepreneurship koperasi** target kinerja 500 koperasi realisasi kinerja 250 koperasi dengan capaian kinerja sebesar 50%;
3. **Jumlah peserta peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi** target kinerja 334 koperasi realisasi kinerja 130 koperasi dengan capaian kinerja sebesar 39%;
4. **Jumlah peserta peningkatan kapasitas pengurus koperasi** target kinerja 365 koperasi realisasi kinerja 365 koperasi dengan capaian kinerja sebesar 100%;
5. **Jumlah peserta peningkatan kualitas kelembagaan koperasi sekolah** target kinerja 250 koperasi realisasi kinerja 125 koperasi dengan capaian kinerja sebesar 50%;
6. **Jumlah peserta peran kelompok strategi dalam membangun perkoperasian** target kinerja 500 koperasi realisasi kinerja 380 koperasi dengan capaian kinerja sebesar 76%;
7. **Pengembangan potensi masyarakat dalam membentuk kelompok usaha atau koperasi (lorong wisata)** target kinerja 15 kecamatan realisasi kinerja 15 kecamatan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Tabel Capaian kinerja, persasaran dan Indikator Kinerja Bidang Pendidikan Penyuluhan Koperasi dan UKM sebagai berikut :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Makassar

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang mendapat pendidikan dan latihan	Persentase	80%	78.54%	98%
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Peserta penerapan sistem informasi akuntansi terhadap laporan keuangan koperasi keuangan	Koperasi	560	552	99%
	Jumlah Peserta peningkatan kapasitas usaha dan kualitas pelayanan bagi koperasi dan UMKM (Pelayanan prima, Informasi teknologi , Strategi pemasaran, Packaging/ pengemasan dan penggunaan merek usaha	Koperasi dan UMKM	675	676	100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Makassar

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN
	Jumlah peserta peningkatan pemahaman dan pengetahuan perpajakan bagi koperasi dan UKM	Koperasi dan UMKM	560	555	99%
	Jumlah peserta peningkatan tehnik penyusunan laporan keuangan koperasi berbasis akrual	Koperasi dan UMKM	675	476	71%
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya Usaha Mikro Kecil binaan menjadi usaha menengah	Persentase	80%	54.44%	6.805%
Pendataan Potensi dan pengembangan usaha	Jumlah Monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas SDM koperasi dan UMKM	Kecamatan	15	15	100%
	Jumlah Peserta fasilitas pengembangan jaringan	UMKM	670	661	661

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Makassar

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN
	kerjasama usaha mikro				
	Jumlah Peserta Pelatihan optimalisasi Digital Marketing bagi UMKM (DAK)	UMKM	180	180	180
	Jumlah Peserta peningkatan inovasi berbasis teknologi dalam mengembangkan potensi usaha mikro	UMKM	780	771	771
	Tersedianya dalam aplikasi Si Datu Michiko	Aplikasi	1	1	1
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Peserta Pengembangan bisnis plan dan manajemen usaha bagi UMKM	UMKM	716	710	710
	Jumlah peserta peningkatan keterampilan berwirausaha bagi anak putus sekolah	UMKM	750	746	746

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN
	Jumlah peserta peningkatan teknik pemasaran Digital bagi UMKM (Strategi Branding, Promosi dan perluasan pasar berbasis sustainability)	UMKM	750	735	735

Pengukuran Indikator Kinerja tabel diatas pada bidang Pendidikan dan Penyuluhan Koperasi dan terdiri dari 2 program dengan program pertama (1) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian mempunyai 1 (satu) indikator program yaitu **Persentase SDM Koperasi yang mendapat pendidikan dan pelatihan** dengan target kinerja 80% realisasi kinerja 78.54% dengan capaian kinerja sebesar 98% dengan kegiatan Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota mempunyai 1 sub kegiatan yaitu :

- Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja sebagai berikut :
 1. **Jumlah peserta penerapan sistem informasi akuntansi terhadap laporan keuangan koperasi akuntansi** target kinerja 560 koperasi realisasi kinerja 552 koperasi dengan capaian kinerja sebesar 99%;
 2. **Jumlah peserta peningkatan kapasitas usaha dan kualitas pelayanan bagi koperasi dan UMKM (pelayanan prima, informasi teknologi, strategi pemasaran, packaging/pengemasan dan penggunaan merek usaha** target kinerja 675 koperasi dan UMKM realisasi anggaran 676 koperasi dengan capaian kinerja sebesar 100%;
 3. **Jumlah peserta peningkatan pemahaman dan pengetahuan perpajakan bagi koperasi dan UKM** target kinerja 560 koperasi dan UMKM realisasi kinerja 555 koperasi dan UMKM dengan capaian kinerja sebesar 99%;

4. **Jumlah peserta peningkatan tehnik penyusunan laporan keuangan koperasi berbasis akrual** target kinerja 675 koperasi dan UMKM realisasi kinerja 476 koperasi dan UMKM dengan capaian kinerja sebesar 71%.

Program kedua (2) yaitu Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Meningkatnya usaha mikro kecil binaan menjadi usaha menengah dengan target kinerja 80% realisasi kinerja 54.44% dengan capaian kinerja sebesar 68% ; Kegiatan Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dengan 2 (Dua) sub kegiatan yang masuk dalam bidang Pendidikan Penyuluhan koperasi dan UKM yaitu :

1. Pendataan potensi dan pengembangan usaha terdiri dari 5 (Lima) indikator kinerja sebagai berikut :

- **Jumlah monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas SDM koperasi dan UMKM** target kinerja 15 kecamatan realisasi kinerja 15 kecamatan dengan capaian kinerja sebesar 100%;
- **Jumlah peserta fasilitas pengembangan jaringan kerjasama usaha mikro** target kinerja 670 UMKM realisasi kinerja 661 UMKM dengan capaian kinerja sebesar 99%;
- **Jumlah peserta pelatihan optimalisasi digital marketing bagi UMKM (DAK)** target kinerja 180 UMKM realisasi kinerja 180 UMKM dengan capaian kinerja sebesar 100%;
- **Jumlah peserta peningkatan inovasi berbasis teknologi dalam mengembangkan potensi usaha mikro** target kinerja 780 UMKM realisasi kinerja 771 UMKM dengan capaian kinerja sebesar 99%;

Tersedianya dalam aplikasi Si Datu Michiko target kinerja 1 aplikasi realisasi kinerja 1 aplikasi dengan capaian kinerja sebesar 100%.

2. Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut :

- **Jumlah peserta pengembangan bisnis plan dan manajemen usaha bagi UMKM** target kinerja 716 UMKM realisasi kinerja 710 UMKM dengan capaian kinerja sebesar 99%;
- **Jumlah peserta peningkatan keterampilan berwirausaha bagi anak putus sekolah** target kinerja 750 UMKM realisasi kinerja 746 UMKM dengan capaian kinerja 99%;
- **Jumlah peserta peningkatan teknik pemasaran Digital bagi UMKM (strategi branding, promosi dan perluasan pasar berbasis sustainability)** target kinerja 750 UMKM realisasi kinerja 735 UMKM dengan capaian kinerja 98%.

Tabel Capaian kinerja, persasaran dan Indikator Kinerja Bidang UKM sebagai berikut

:

Program		Persentase	80%	54.44%	6.805%
Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya Usaha Mikro Kecil binaan menjadi usaha menengah				
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan pembuatan kotak tisu lontara	UMKM	94	94	94
	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan jumlah pembuatan masker fashion	UMKM	170	170	170
	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan pembuatan pengembangan kreativitas merajut	UMKM	85	85	85

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar

	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan pengelolaan makanan	UMKM	200	200	200
	Jumlah UMKM yang mengikuti sablon	UMKM	100	100	100
	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan tata rias	UMKM	85	85	85
Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang terfasilitasi kemudahan perizinan usahanya	UMKM	95	95	100
Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang meningkat volume/omsetnya	Persentase	65%	57.00%	88%
Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,SDM,serta desain dan teknologi	Jumlah Operasional UPT Kanrerong	Bulan	12	9	75%
	Jumlah promosi yang dilaksanakan	Kegiatan promosi	5	5	100%
	Jumlah Sentra Galery yang dilaksanakan	Sentra gallery	1	1	100%
	Jumlah UMKM yang mengikuti	UMKM	150	150	100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar

	lomba antar kecamatan				
	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan pemanfaatan informasi teknologi	UMKM	420	420	100%
	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan peningkatan teknis desain	UMKM	420	370	88%

Pengukuran Indikator Kinerja tabel diatas pada bidang UKM dan terdiri dari 2 program dengan program pertama (1) yaitu Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Meningkatnya usaha mikro kecil binaan menjadi usaha menengah dengan target kinerja 80% realisasi kinerja 54.44% dengan capaian kinerja sebesar 68% ; Kegiatan Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan ,kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dengan 2 (Dua) sub kegiatan yang masuk dalam bidang UKM yaitu :

1. Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja sebagai berikut :
 - **Jumlah UMKM mengikuti pelatihan pembuatan kotak tisu lontara** target kinerja 94 UMKM realisasi kinerja 94 UMKM dengan capaian kinerja 100%;
 - **Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan jumlah pembuatan masker fashion** target kinerja 170 UMKM realisasi kinerja 170 UMKM dengan capaian kinerja sebesar 100%;

- **Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan pembuatan pengembangan kreativitas merajut** target kinerja 85 UMKM realisasi kinerja 85 UMKM dengan capaian kinerja sebesar 100%;
 - **Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan pengelolaan makanan** target kinerja 200 UMKM realisasi kinerja 200 UMKM dengan capaian kinerja sebesar 100%;
 - **Jumlah UMKM yang mengikuti sablon** target kinerja 100 UMKM realisasi kinerja 100 UMKM dengan capaian kinerja sebesar 100%;
 - **Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan tata rias** target kinerja 85 UMKM realisasi kinerja 85 UMKM dengan capaian kinerja sebesar 100%.
2. **Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro** dengan 1 indikator kinerja yaitu **jumlah UMKM yang terfasilitasi kemudahan perizinan usahanya** target kinerja 95% realisasi kinerja 85% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Program kedua (2) yaitu Program pengembangan UMKM mempunyai 1 (satu) indikator Persentase UMKM yang meningkat Volume/Omsetnya target kinerja 65% realisasi kinerja 57% dengan capaian kinerja sebesar 88% dengan kegiatan Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil dengan 1 (satu) sub kegiatan fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM,serta desain dan teknologi mempunyai 6 (enam) indikator kinerja yaitu :

1. **Jumlah operasional UPT kanrerong** target kinerja 12 bulan realisasi kinerja 9 bulan dengan capaian kinerja sebesar 75%;
2. **Jumlah promosi yang dilaksanakan** target kinerja 5 kegiatan promosi realisasi kinerja 5 kegiatan promosi dengan capaian kinerja sebesar 100%;
3. **Jumlah sentra gallery yang dilaksanakan** target kinerja 1 sentra gallery realisasi kinerja 1 sentra gallery dengan capaian kinerja sebesar 100%;
4. **Jumlah UMKM yang mengikuti lomba antar kecamatan** target kinerja 150 UMKM realisasi kinerja 150 UMKM dengan capaian kinerja 100%;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar

5. Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan pemanfaatan informasi teknologi target kinerja 420 UMKM realisasi kinerja 420 UMKM dengan capaian kinerja sebesar 100%;
6. Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan peningkatan teknis desain target kinerja 420 UMKM realisasi kinerja 370 dengan capaian kinerja sebesar 88%.

Rumusan Indikator Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

RUMUS INDIKATOR DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA MAKASSAR			
DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA MAKASSAR			
NO	PROGRAM	INDOKATOR	RUMUS
1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Bpr/Lkm Aktif	$(\text{Jumlah Bpr/Ikm Aktif}) / (\text{Jumlah Bpr/Ikm Keseluruhan}) \times 100$
2	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Diawasi Dan Diperiksa	$(\text{Jumlah Koperasi yang di periksa/diawasi}) / (\text{Jumlah Koperasi Aktif}) \times 100$
3	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi	Persentase KSP/USP yang sehat	$(\text{Jumlah KSP/USP yang dinilai}) / (\text{Jumlah KSP/USP Keseluruhan}) \times 100$
4	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Sdm Koperasi Yang Mendapat Pendidikan Dan Pelatihan	$(\text{Jumlah SDM Koperasi yang telah diberikan pendidikan dan pelatihan}) / (\text{Jumlah Anggota Koperasi}) \times 100$
5	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	$(\text{Jumlah Koperasi yang RAT}) / (\text{Jumlah Koperasi Aktif}) \times 100$
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro	Meningkatnya Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	$(\text{Jumlah Usaha mikro menjadi wirausaha}) / (\text{Jumlah Usaha Mikro Keseluruhan}) \times 100$
7	Program Pengembangan Umkm	Persentase Usaha Mikro Dan Kecil	$(\text{Jumlah Usaha Mikro dan Kecil}) / (\text{Jumlah Seluruh UKM}) \times 100$

3.2. Capaian Realisasi vs target, Realisasi antar tahun, Realisasi thd.RPJMD, Realisasi antar thd. standar nasional

NO.	URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN					
		TARGET		REALISASI		(%)	
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1.	Belanja Daerah	13.115.648.225	21.481.905.502	11.310.590.598	18.847.640.395	86.24	87.74

Belanja daerah dengan target tahun 2020 sebesar Rp.13.115.648.225; (Tiga Belas Milyar Seratus Lima Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dengan realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp.11.310.590.598; (Sebelas Milyar

Tiga Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribuan Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar 86.24%. mengalami kenaikan di tahun 2021 dengan target sebesar Rp.21.481.905.502; (Dua Puluh Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Ribuan Lima Ratus Dua Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.18.847.640.395; (Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribuan Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 87.74%.

3.3. Analisis Program/Kegiatan,

Upaya-upaya untuk merealisasikan sasaran melalui 7 Program Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kota** yang meliputi 8 kegiatan, kegiatan ini mendukung sebagai penunjang kelancaran administrasi internal Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, pagu anggaran sebesar Rp.6.167.112.176; dengan realisasi sebesar Rp.5.510.367.354; atau sebesar 89.35% memperhatikan tingkat capaian realisasi program dan kegiatan sebagaimana diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja mencapai 89% atau dikategorikan “Tinggi”. Kejadiannya adalah sebagai berikut :

1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1.1.1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- 1.1.2 Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA –SKPD
- 1.1.3 Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-DPA
- 1.1.4 Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD
- 1.1.5 Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD
- 1.1.6 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD
- 1.1.7 Evaluasi kinerja perangkat daerah

1.2. Administarsi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1.2.1 Penyediaan gaji dan tunjangan
- 1.2.2 Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
- 1.2.3 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD
- 1.2.4 Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD
- 1.2.5 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- 1.2.6 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD

1.3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1.3.1 Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD

1.4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1.4.1 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- 1.4.2 Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
- 1.4.3 Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1.5.1 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
- 1.5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 1.5.3 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
- 1.5.4 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 1.5.5 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1.6.1 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1.7.1 Penyediaan jasa surat menyurat

1.7.2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1.8.1 Penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

1.8.2 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

1.8.3 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

1.8.4 Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

2. Program pengawasan dan pemeriksaan yang meliputi 1 kegiatan, dimana program kegiatan diharapkan mampu dan dapat mencapai target persentase koperasi berkualitas sehingga meningkatkan jumlah koperasi yang melaksanakan RAT. Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar melaksanakan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.3.262.607.600; dengan realisasi sebesar Rp.2.946.534.123; atau sebesar 90.31%. dengan memperhatikan tingkat capaian realisasi program dan kegiatan sebagaimana diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja mencapai 90% atau dikategorikan “sangat tinggi”. Meliputi 1 kegiatan sebagai berikut :

2.1. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam koperasi wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota meliputi 2 sub kegiatan sebagai berikut :

2.1.1 Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/ kota

2.1.2 Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota

3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi meliputi 1 kegiatan, dimana program dan kegiatan diharapkan rutinnya penilaian kesehatan terhadap koperasi ini untuk mengukur kinerja KSP/USP koperasi yang dibina agar dengan kondisi sehat mampu memberikan kontrol lebih bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan anggota serta kepercayaan masyarakat umum. Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar melaksanakan alokasi atau pagu anggaran sebesar Rp.1.770.571.800; dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.552.215.923; atau sebesar 87.67%. memperhatikan tingkat capaian realisasi program dan kegiatan diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja sebesar 87% atau dapat dikategorikan “Tinggi”. Meliputi 1 kegiatan sebagai berikut :

3.1. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten /kota meliputi 2 sub kegiatan yaitu :

3.2.1 Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/ kota

3.2.2 Penghargaan kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan /kabupaten/ kota

4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian meliputi 1 kegiatan , dimana program dan kegiatan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan ,memperluas kemampuan dan memperluas wawasan anggota dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan koperasi. Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar melaksanakan Program dan kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.382.456.000; dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.241.273.000; atau sebesar 89.79%. memperhatikan tingkat capaian realisasi program dan kegiatan sebagaimana diatas,dapat disimpulkan

bahwa tingkat capaian kinerja mencapai 89% atau dikategorikan “Tinggi”. Meliputi 1 kegiatan sebagai berikut :

4.1 Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten /kota dengan 1 sub kegiatan yaitu :

4.2.1 Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi

5. **Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi** meliputi 1 kegiatan, dimana program dan kegiatan diharapkan untuk memperkuat meningkatkan kontribusinya dalam perekonomian ,baik dalam penanggulangan kemiskinan ,penciptaan lapangan kerja maupun dalam peningkatan nilai tambah perekonomian yang menyokong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan yang berkelanjutan. Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar untuk melaksanakan program dan kegiatan ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.2.385.219.200; dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.241.273.000; atau sebesar 87.62%. memperhatikan tingkat capaian realisasi program dan kegiatan sebagaimana diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja 87% atau dapat dikategorikan “Tinggi” . meliputi 1 kegiatan sebagai berikut :

5.1 **Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten /kota dengan 1 sub kegiatan yaitu :**

5.1.2 Pemberdayaan peningkatan produktivitas ,nilai tambah, akses pasar , akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten /kota.

6. **Program Pemberdayaan Usaha Menengah,Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)** meliputi 1 kegiatan, dimana program dan kegiatan diharapkan menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro,kecil dan menengah. Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar untuk melaksanakan program dan kegiatan ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.3.905.410.250; dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.332.796.008; atau sebesar 85.34%. memperhatikan tingkat capaian realisasi program dan kegiatan diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja 85% dikategorikan “Tinggi”. Meliputi 1 kegiatan sebagai berikut :

6.1 Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan , kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan, kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dengan 4 sub kegiatan yaitu :

6.1.1 Pendataan potensi dan pengembangan usaha

6.1.2 Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro

6.1.3 Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro

6.1.4 Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro

7. **Program Pengembangan UMKM** meliputi 1 kegiatan, dimana program dan kegiatan diharapkan mampu dan dapat mencapai target persentase pelaku usaha mikro dan kecil naik kelas sehingga pelaku UMKM volume usaha semakin meningkat dan mampu menyerap tenaga kerja serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha. Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar untuk melaksanakan program dan kegiatan ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.2.608.528.476; dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.174.606.437; atau sebesar 83.37% .memperhatikan tingkat capaian realisasi program dan kegiatan diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja 83% dikategorikan “Tinggi” . meliputi 1 kegiatan sebagai berikut :

7.1 Pengembangan Usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil dengan 1 sub kegiatan yaitu :

7.1.1 Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan ,pemasaran ,SDM,serta desain dan teknologi.

3.4. Analisis Capaian,

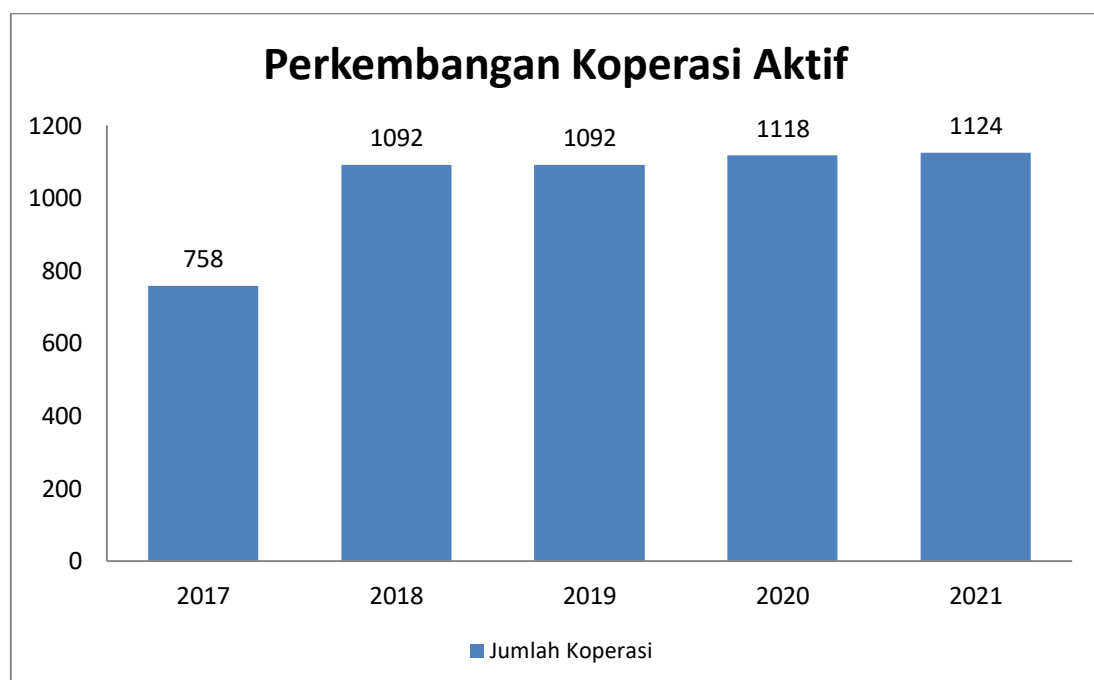
Analisis capaian kinerja dilaksanakan pada setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Adapun rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

1	<i>Meningkatnya Lembaga Koperasi Aktif dan Koperasi Sehat</i>
----------	--

Capaian sasaran *Meningkatnya lembaga Koperasi Aktif dan Koperasi sehat* yang diukur dengan 2 indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Koperasi aktif	Persentase(%)	75%	70%	93%
Persentase Koperasi Simpan Pinjam Yang Sehat	Persentase(%)	60%	64%	107%
Rata-rata Capaian Sasaran				100%

a. Persentase Koperasi Aktif



Sumber data : Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

Dari data grafik perkembangan koperasi aktif selama tahun 2017-2021 pada tahun 2021 diperoleh fakta bahwa jumlah koperasi aktif 1.124 unit koperasi atau sebesar 93% dari total koperasi 1.612 koperasi unit capaian kinerja ini belum mencapai capaian kinerja yang ditarget sebesar 75%. Dapat juga dilihat pada lampiran 3.1.1

Jumlah koperasi aktif tahun 2021 menjadi 1.124 unit mengalami kenaikan jumlah koperasi aktif jika dibandingkan dengan jumlah koperasi aktif tahun 2020 hanya 1.118 unit koperasi. Adapun faktor pendorong dari indikator ini adalah :

- Meningkatnya kesadaran pengurus dan anggota koperasi untuk memberdayakan dan menggunakan sebagai instrumen ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya;
- Adanya peningkatan kelembagaan khususnya bagi koperasi tidak aktif minimal 3 tahun buku tidak melaksanakan RAT maka badan hukumnya akan dibekukan dan kemudian dibubarkan sesuai dengan surat keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI nomor : 114/Kop/M.KUKM/XII/2016 tentang pembubaran koperasi sehingga pengurus koperasi merasa berkewajiban senantiasa mengaktifkan koperasinya.
- Dinas koperasi dan UKM senantiasa melaksanakan koordinasi dan monitoring dalam rangka peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;

Adapun langkah-langkah ke depan untuk meningkatkan kembali atau mengatasi kendala yang dihadapi dalam rangka mencapai target kinerja jumlah Koperasi Aktif yaitu sebagai berikut:

- Dinas Koperasi dan UKM senantiasa melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada Pengurus Koperasi;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Koperasi;
- Memberikan pelatihan-pelatihan tentang tata kelola kegiatan/unit Koperasi serta penatausahaan dan pembukuan laporan Koperasi.

Berikut ini adalah data jumlah Koperasi aktif yang ada di Kota Makassar Tahun 2021 :

No	KELOMPOK KOPERASI	KETERANGAN
1.	Koperasi Simpan Pinjam	83
2.	Koperasi Wanita	26
3.	Koperasi Serba Usaha	241
4.	Kopontren	4

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota
Makassar

No	KELOMPOK KOPERASI	KETERANGAN
5.	KUD	2
6.	Koperasi Pertanian	14
7.	Koperasi Pasar	9
8.	Kopinkra	8
9.	KPRI	205
10.	Koperasi Angkutan Darat	2
11.	Koperasi Pemuda	1
12.	Koperasi Wredatama	-
13	Koperasi Kepolisian	11
14	Koperasi Angkutan Darat	25
15	Koperasi Angkutan Laut	3
16	Koperasi Angkutan Udara	2
17	Kopkar	92
18	Koperasi Peternakan	2
19	Koperasi Perikanan	5
20	Koperasi Veteran	-
21	Koperasi Mahasiswa	4
22	Koperasi Pepabri	6
23	Koperasi Perumahan	1
24	Koperasi Pedagang Kaki Lima	3

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar

No	KELOMPOK KOPERASI	KETERANGAN
25	Kopti	-
26	Koperasi Profesi	-
27	Koperasi Syariah	18
28	Koperasi Bank Pasar	-
29	Koperasi Sekunder	-
30	Koperasi Produsen	10
31	Koperasi Konsumen	44
32	Koperasi Jasa	13
33	Koperasi lainnya	290
Jumlah		1.124

Sumber data : Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

Dokumentasi I. Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSP Satyadana Tahun 2021



Dokumentasi II. Rapat Anggota Tahunan (RAT) KPN SMA 4 Makassar



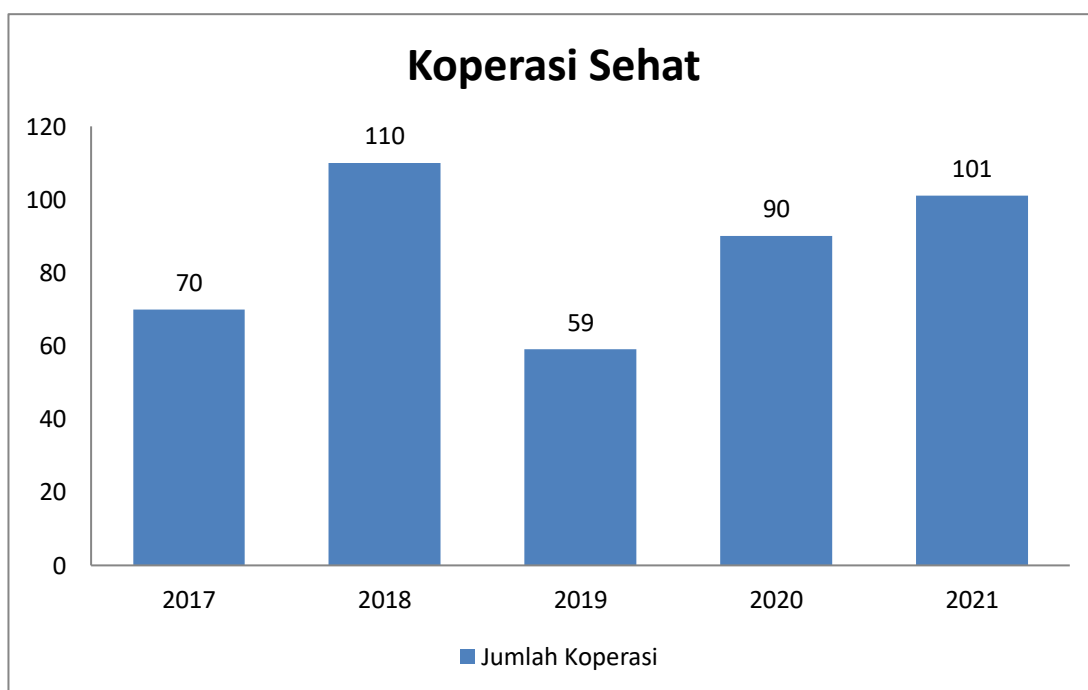
Dokumentasi III. Rapat Anggota Tahunan (RAT) KPRI UNM Makassar



b. Persentase Koperasi Sehat

Indikator kedua yaitu Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang Sehat digolongkan sebagai Koperasi Sehat atau yang sudah dilakukan penilaian kesehatan KSP/USP pada tahun 2021 adalah sebanyak 101 Unit Koperasi yang sudah dilakukan penilaian kesehatan dari jumlah keseluruhan KSP/USP adalah sebesar 157 Unit Koperasi yang dilakukan penilaian sebesar 107%. Namun jika dibandingkan dengan jumlah koperasi ditahun 2020 yang dilakukan penilaian kesehatan sebesar 90 Unit maka didapatkan persentase capaian kinerja lebih tinggi tahun 2021 dibanding tahun 2020.

Perkembangan koperasi sehat selama periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 disajikan dalam grafik berikut:



Sumber data : Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

Jumlah koperasi sehat tahun 2021 sebesar 101 unit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya sebesar 90 unit. Dapat juga dilihat pada lampiran 3.1.2

Kegiatan Pelatihan Penilaian Kesehatan Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Manajemen KSP/USP

Dokumentasi 1. Pelatihan Penilaian Kesehatan dalam upaya peningkatan Kinerja Manajamen KSP/USP



Dokumentasi II. Pelatihan Penilaian Kesehatan dalam upaya peningkatan Kinerja Manajamen KSP/USP



2

Meningkatnya Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Yang Berdaya Saing Tinggi Memenuhi Syarat dan Standarisasi Pasar

Capaian sasaran usaha kecil dan menengah yang berdaya saing memiliki 3 indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Usaha Mikro dan kecil	Persentase	80%	90%	113%
Jumlah Produk UMKM yang terstandarisasi	Produk	35	8	23%
Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	Persentase	30	25	83%
Rata-rata capaian				73%

Indikator kinerja pertama (1) dari sasaran kinerja kedua yaitu Persentase Usaha Mikro dan Kecil dengan target kinerja 80% yang terealisasi 90% dengan capaian kinerja sebesar 113% sudah melebihi capaian yang ditargetkan sehingga disimpulkan kategori “Sangat Tinggi”. Indikator kinerja kedua (2) yaitu Jumlah Produk UMKM yang terstandarisasi target 35 Produk dengan realisasi 8 Produk UMKM dengan capaian kinerja 23% rendahnya capaian dikarenakan adanya program sehat (sertifikat halal gratis) dari kemenag dan naiknya biaya pengurusan PIRT sehingga banyak UMKM yang PIRT nya expired enggan mengurus, sedangkan salah satu syarat tuk mengurus sertifikat halal adalah PIRT dan masih banyak UKM yang belum memenuhi persyaratan untuk mengurus halal. Indikator kinerja ketiga (3) yaitu Rasio Pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil di tahun 2020 jumlah 30 UKM sedangkan ditahun 2021 pertumbuhan usaha baru naik menjadi 40 UKM terjadi kenaikan jumlah wirausaha baru berskala kecil tahun 2021 disebabkan pandemi yang sudah menurun, program vaksinasi yang semakin massal sehingga iklim berusaha semakin membaik dibandingkan tahun 2020. disamping itu ,program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) melalui berbagai kegiatan pengembangan UMKM sehingga memotivasi masyarakat untuk berwirausaha. Target rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil sebesar 30% dengan realisasi kinerja 25% dengan tingkat capaian sebesar

83%. Tingkatan capaian rata-rata kinerja sasaran strategis kedua (2) sebesar 73% dikategorikan “Sedang”.

Pencapaian target kinerja sasaran strategis tersebut menggambarkan kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar berupa pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pengembangan sentra produksi rakyat serta regulasi yang berpihak pada KUMKM, pembinaan kelompok-kelompok usaha produktif telah dijalankan secara optimal melalui perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang ada.

Adapun faktor pendorong dari capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya kesadaran masyarakat di Kota Makassar dalam mengembangkan usahanya
- Terjalannya koordinasi yang baik antara Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dengan para pelaku UMKM di Kota Makassar
- Meningkatnya kualitas SDM dengan cara melakukan sosialisasi dan pelatihan dalam menjalankan UKM yang capable ,inovatif dan mampu berdaya saing

Untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja sasaran ditahun berikutnya , maka Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar akan mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- Melakukan pembinaan pada UMKM di Kota Makassar dalam meningkatkan kualitas hasil produksi UKM sesuai dengan kebutuhan on demand (sesuai permintaan) pasar dengan kondisi new normal dimasa pandemic
- Dinas Koperasi dan UKM senantiasa melakukan koordinasi dan konsultasi terhadap UKM, dan
- Melakukan bimbingan dan pelatihan terhadap UMKM khususnya di bidang market digital menggunakan teknologi agar menciptakan peluang pasar yang baik.

Dokumentasi I. Pelatihan Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro



Dokumentasi I. Pelatihan Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro



3	Meningkatnya Kemampuan ,Pengetahuan dan Profesional SDM Koperasi & UMKM Kota Makassar
----------	--

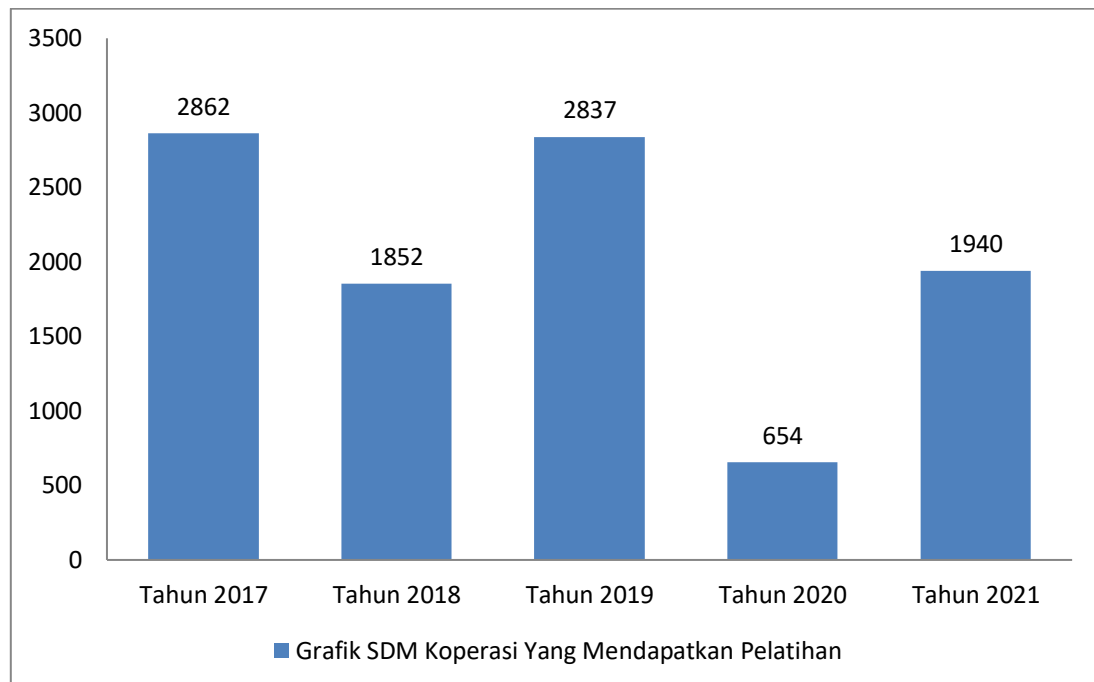
Capaian sasaran Meningkatkan Kemampuan, Pengetahuan dan Profesional SDM Koperasi & UMKM Kota Makassar yang diukur dengan 2 indikator kinerja utama pada Dinas Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Koperasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Persentase	80%	79%	98%
Jumlah UKM mendapatkan peningkatan kapasitas SDM	UKM	1.500	1.200	80%
Rata-rata Capaian Sasaran				89%

Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas dengan Target kinerja 80% koperasi dengan Realisasi kinerja 79 koperasi dengan Capaian kinerja 98%. Jumlah UKM Mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM dengan Target kinerja 1.500 UKM dengan Realisasi kinerja 1.200 UKM dengan Capaian kinerja 80%. capaian sasaran rata-rata dari 2 indikator sebanyak 89%.

a. Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas

Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas sebanyak 98% dibagi jumlah keseluruhan SDM Koperasi yang ada di Kota Makassar sebanyak 2.470 terdiri dari jumlah pengurus /pengawas koperasi, adapun grafik SDM Koperasi yang diberikan pelatihan sebagai berikut :



Sumber data : Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

Dapat dilihat grafik diatas pada tahun 2021 data koperasi yang diberikan pelatihan sebanyak 1.940 koperasi lebih tinggi daripada di tahun 2020 Koperasi yang diberikan pelatihan sebanyak 654 koperasi jadi jumlah koperasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas mengalami kenaikan sehingga disimpulkan 98% dikategorikan “Tinggi”. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Dinas Koperasi dan UKM untuk lebih meningkatkan kinerja di tahun berikutnya adalah sebagai berikut :

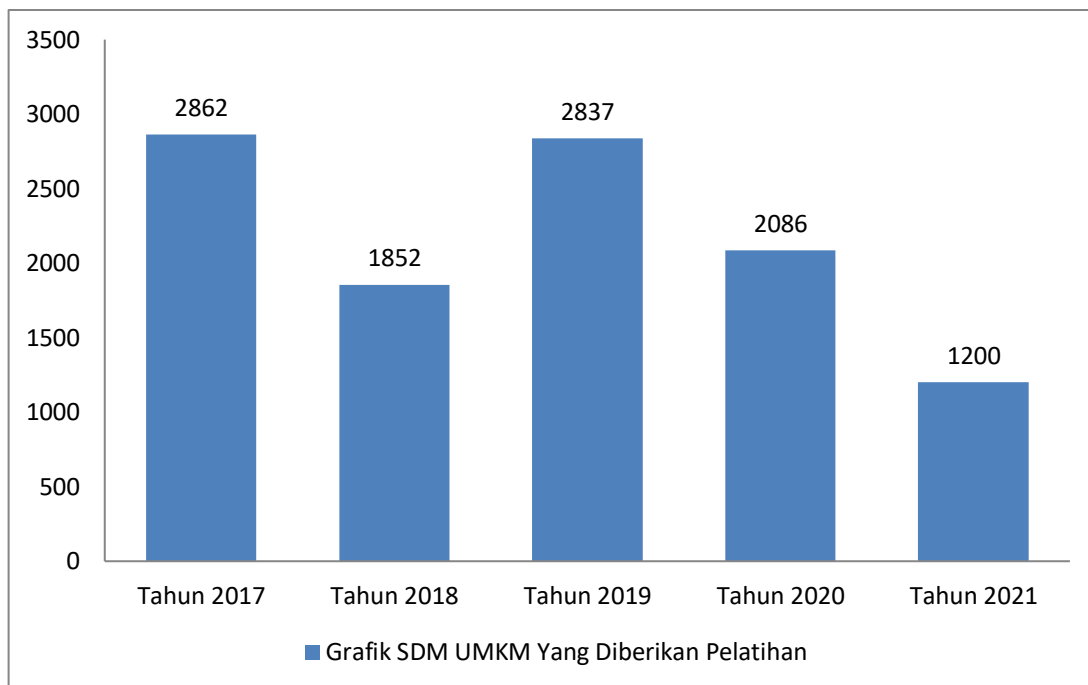
- Meningkatkan koordinasi dengan koperasi yang akan diberikan pelatihan dan
- Mengadakan sosialisasi dan pembinaan akan pentingnya mengikuti pelatihan terkait manajemen perkoperasian.

Gambar I. Pelatihan Peningkatan Pemahaman Perpajakan Bagi Koperasi dan UKM



b. Jumlah UKM Mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM

Jumlah UKM Mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM dengan Target Kinerja 1500 UKM dengan Realisasi Kinerja Sebesar 2.086 UKM dengan Capaian kinerja sebesar 139%. Adapun dapat dilihat pada Grafik berikut ini :



Sumber data : Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

Dapat dilihat pada grafik SDM UMKM yang diberikan pelatihan pada tahun 2020 jumlah UKM yang diberikan pelatihan sebanyak 2086 sedangkan di tahun 2021 mengalami penurunan SDM UMKM yang diberikan pelatihan sebesar 1200 UKM tetapi bila dilihat dari target indikator 1500 UKM atau capaian kinerja sebesar 80% sehingga dikategorikan “Tinggi”.

Tingginya Capaian Kinerja indikator kinerja utama tersebut disebabkan oleh :

- Terjalin koordinasi antara Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dengan para pelaku UMKM yang akan diberikan pelatihan dan
- Meningkatnya kesadaran para pelaku UMKM untuk mengikuti pelatihan yang mana bertujuan menumbuhkan wirausaha baru yang sehat dan mampu berdaya saing.

Langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan koordinasi dengan para pelaku UMKM yang akan diberikan peningkatan kapasitas SDM dan
- Mengadakan sosialisasi dan pembinaan akan pentingnya mengikuti pelatihan terkait manajemen perkoperasi

Jumlah laki-laki dan perempuan yang mendapatkan peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan sebagai berikut :

NO.	URAIAN KEGIATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	388	1.552
Total Keseluruhan		1.940	

Gambar I. Peningkatan kapasitas usaha dan kualitas pelayanan bagi koperasi dan UKM



3.5. Analisis Efisiensi,

Anggaran merupakan hal penting. Karena anggaran dijadikan sebagai alat pemerintah daerah dalam merencanakan suatu kegiatan atau rencana yang akan dilakukan. Dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah, salah satu cerminan kinerja dan kemajuan sebuah OPD dapat dilihat melalui anggaran belanja daerah. Maka dari itu dalam mengelola anggaran tersebut dilakukan secara ekonomis, efektif dan efisien.

Seberapa efektif dan efisien anggaran belanja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar yang mana efektivitas adalah hubungan output dengan tujuan sedangkan efisiensi adalah perbandingan antara output dan input hal ini dapat dilihat dari hasil pencapaian persentase penyerapan anggaran belanja daerah.

EFISIENSI PENGGUNAAN ALOKASI ANGGARAN

NO.	URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Belanja Daerah	21.481.905.502	18.847.640.395	87.74	107%

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 87,74% dengan realisasi capaian kinerja seluruh program sebesar 107% pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan alokasi anggaran sudah efisien dikarenakan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar sudah melebihi dari 100% sehingga dikategorikan “Sangat Tinggi”.

3.6. Rencana Aksi,

Rencana aksi daerah (RAD) adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi dan focus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu. Berikut ini Rencana Aksi Dinsa Koperasi dan UKM Kota Makassar :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar

RENCANA AKSI KINERJA														
DINAS KOPERASI DAN UKM														
KOTA MAKASSAR														
TAHUN 2021														
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					PROGRAM / KEGIATAN	TARGET PROGRAM/ KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
			Variabel	I	II	III	IV		I	II	III	IV		
1	Meningkatnya Lembaga Koperasi Aktif dan Koperasi Sehat	Persentase Koperasi yang diperiksa dan diawasi	75%	10	10	30	35	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi						3,922,008,600
								Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota					Bidang Pembiayaan	1,172,213,000
			650 Koperasi					Peningkatan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dalam Penerapan Undang-Undang Perkoperasian	200	200	125	125		
			600 Koperasi					Pengawasan Akuntabilitas Koperasi dalam Akses Pembiayaan	200	200	100	100		
			450 Koperasi					Manajemen Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Pengawasan Kelembagaan Koperasi	125	125	100	100		
								Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota					Bidang Kelembagaan	2,749,795,600
			160 Koperasi					Pelatihan Pelaporan Keuangan Koperasi dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi (DAK)	50	50	30	30		
			500 Koperasi					Penilaian Koperasi Berprestasi	150	150	100	100		
			750 Koperasi					Penyusunan Laporan RAT bagi Koperasi	250	250	125	125		
			750 Koperasi					Revitalisasi Koperasi	250	250	125	125		
			750 Koperasi					Peningkatan Manajemen Pengawasan bagi Pengawas Koperasi	250	250	125	125		
			840 Koperasi					Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP)	300	300	120	120		
		Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang Sehat	80%	20	20	20	20	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi					Bidang Pembiayaan	2,354,133,800
								Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota						1,227,222,800
			12 bulan					Monitoring Keragaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP/USP)	3	3	3	3		
			720 Koperasi					Pelatihan Penilaian Kesehatan dalam Upaya Peningkatan Kinerja	250	250	110	110		
			870 Koperasi					Sosialisasi Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi	300	300	135	135		
								Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota						1,126,911,000
			690 Koperasi					Strategi & Metode Penguatan Struktur Terhadap Penghargaan Koperasi	250	250	95	95		
			840 Koperasi					Bimtek Terhadap Predikat Penilaian Kesehatan Koperasi bagi KSP/USP	250	250	170	170		
			100 Koperasi					Penghargaan Penilaian Kesehatan Koperasi bagi Pelaku KSP/USP	25	25	25	25		

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar

		Persentase Koperasi yang Meningkatkan Produktivitas	80%	20	20	20	20	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi									2,485,973,200
								Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota								Bidang Kelembagaan	2,485,973,200
			4 Kegiatan					Kegiatan Pameran Unggulan Koperasi	1	1	1	1					
			508 Koperasi					Kegiatan Penerapan Teknologi Modern dalam Manajemen Usaha Koperasi	150	150	104	104					
			500 Koperasi					Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Entrepreneurship Koperasi	150	150	100	100					
			520 Koperasi					Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	150	150	110	110					
			375 Koperasi					Kegiatan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Sekolah	130	130	65	50					
			500 Koperasi					Kegiatan Peningkatan Peran Kelompok Strategis dalam Membangun	150	150	100	100					
			375 Koperasi					Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi									
2	Meningkatnya jumlah usaha kecil dan menengah yang berdaya saing tinggi memenuhi syarat dan standarisasi pasar	Meningkatnya Usaha Mikro Kecil Binaan Menjadi Usaha Menengah	80%	20	20	20	20	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)									7,430,736,500
								Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro								Bidang DIKLU	1,563,709,000
			180 UMKM					Pelatihan Optimalisasi Digital Marketing bagi UMKM (DAK)	50	50	40	40					
			15 Kecamatan					Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM	5	5	3	2					
			900 UMKM					Kegiatan Fasilitas Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Mikro	250	250	200	200					
			900 UMKM					Kegiatan Peningkatan Inovasi Berbasis Teknologi dalam Mengembangkan Potensi Usaha Mikro	250	250	200	200					
								Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro								Bidang UKM	3,518,817,500
			600 UMKM					Pelatihan Pembuatan Masker Fashion	200	200	100	100					
			600 UMKM					Praktek Tata Rias	200	200	100	100					
			600 UMKM					Praktek Kegiatan Pelatihan Sablon	200	200	100	100					
			700 UMKM					Praktek Kegiatan Pembuatan Tissue Lontara	200	200	150	150					
			600 UMKM					Praktek Kegiatan Pengembangan Kreativitas Merajut	200	200	100	100					
			700 UMKM					Praktek Kegiatan Pengolahan Makanan	200	200	150	150					
			285 UMKM					Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	100	100	45	40			Bidang UKM	630,904,000	
								Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha							Bidang DIKLU	1,717,306,000	
			828 UMKM					Pengembangan Bisnis Plan dan Manajemen Usaha Bagi UMKM	250	250	178	150					
			840 UMKM					Peningkatan Keterampilan Berwirausaha bagi Anak Putus Sekolah	250	250	170	170					
			840 UMKM					Peningkatan Teknik Pemasaran Digital bagi UMKM (Strategi Branding, Promosi, dan Perluasan Pasar Berbasis Sustainability)	250	250	170	170					
		Persentase UMKM yang Meningkatkan volume/Omsetnya	65%	20	20	15	10	Program Pengembangan UMKM									2,560,650,476
								Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan,								Bidang UKM	2,560,650,476
			150 UMKM					Lomba UKM antar Kecamatan	50	50	25	25					
			1 Sentra Galery					Sentra Galeri Produk Unggulan UMKM		1							
			8 Kegiatan Promosi					Penyelenggaraan Promosi Produk Unggulan UMKM	2	2	2	2					
			420 UMKM					Peningkatan Teknis Desain Produk Usaha Bagi UMKM	110	110	100	100					
			420 UMKM					Pemanfaatan Informasi Teknologi dalam Peningkatan Kualitas UMKM	110	110	100	100					
			12 bulan					UPTD Kanrerong	3	3	3	3					

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar

Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 87.74%.

LAPORAN REALISASI							
MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN							
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2021							
SKPD : DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA MAKASSAR (PENCAPAIAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH SD. TW IV SEBESAR 87.74%)							
KODE REKENING	URAIAN JENIS BELANJA	NILAI DPA SKPD			FISIK (%)	Sisa Dana Belum Dicairkan & Di STSkan	PERMASALAHAN
			KEUANGAN	(%)			
1	2	3	4	5	6	9	10
2.17.00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	21,481,905,502	18,847,640,395	87.74	87.74	2,634,265,107	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,167,112,176	5,510,367,354	89.35	89.35	656,744,822	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	158,138,500	103,099,400	65.20	65.20	55,039,100	
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	73,823,000	61,438,000	83.22	83.22	12,385,000	
2.17.01.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	2,121,000	904,000	42.62	42.62	1,217,000	
2.17.01.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	1,301,000	684,000	52.57	52.57	617,000	
2.17.01.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	360,000	0	0.00	0.00	360,000	
2.17.01.2.01.01.5.1.02.01.01.0029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer	241,000	0	0.00	0.00	241,000	
2.17.01.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	900,000	300,000	33.33	33.33	600,000	
2.17.01.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia	18,700,000	12,350,000	66.04	66.04	6,350,000	
2.17.01.2.01.01.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan	22,200,000	22,200,000	100.00	100.00	0	
2.17.01.2.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan dinas paket meeting dalam kota	28,000,000	25,000,000	89.29	89.29	3,000,000	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar

2.17.01.2.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18,208,000	7,400,000	40.64	40.64	10,808,000
2.17.01.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	1,257,000	0	0.00	0.00	1,257,000
2.17.01.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	472,000	0	0.00	0.00	472,000
2.17.01.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	2,779,000	0	0.00	0.00	2,779,000
2.17.01.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	300,000	0	0.00	0.00	300,000
2.17.01.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia	6,000,000	0	0.00	0.00	6,000,000
2.17.01.2.01.02.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan	7,400,000	7,400,000	100.00	100.00	0
2.17.01.2.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	17,134,000	7,700,000	44.94	44.94	9,434,000
2.17.01.2.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	419,000	0	0.00	0.00	419,000
2.17.01.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	236,000	0	0.00	0.00	236,000
2.17.01.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	2,779,000	0	0.00	0.00	2,779,000
2.17.01.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	300,000	300,000	100.00	100.00	0
2.17.01.2.01.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia	6,000,000	0	0.00	0.00	6,000,000
2.17.01.2.01.03.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan	7,400,000	7,400,000	100.00	100.00	0
2.17.01.2.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	17,822,000	10,801,700	60.61	60.61	7,020,300
2.17.01.2.01.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	1,048,000	962,500	91.84	91.84	85,500
2.17.01.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	295,000	0	0.00	0.00	295,000
2.17.01.2.01.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	2,779,000	2,439,200	87.77	87.77	339,800
2.17.01.2.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	300,000	0	0.00	0.00	300,000
2.17.01.2.01.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia	6,000,000	0	0.00	0.00	6,000,000
2.17.01.2.01.04.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan	7,400,000	7,400,000	100.00	100.00	0
2.17.01.2.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	17,246,500	10,139,200	58.79	58.79	7,107,300
2.17.01.2.01.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	588,000	0	0.00	0.00	588,000
2.17.01.2.01.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	177,000	0	0.00	0.00	177,000
2.17.01.2.01.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	2,781,500	2,439,200	87.69	87.69	342,300
2.17.01.2.01.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	300,000	300,000	100.00	100.00	0
2.17.01.2.01.05.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia	6,000,000	0	0.00	0.00	6,000,000
2.17.01.2.01.05.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan	7,400,000	7,400,000	100.00	100.00	0
2.17.01.2.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6,006,000	4,720,500	78.60	78.60	1,285,500
2.17.01.2.01.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	1,910,000	1,360,500	71.23	0.00	549,500
2.17.01.2.01.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	555,000	395,000	71.17	71.17	160,000
2.17.01.2.01.06.5.1.02.01.01.0026	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak	500,000	475,000	95.00	0.00	25,000
2.17.01.2.01.06.5.1.02.01.01.0029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer	241,000	90,000	37.34	0.00	151,000
2.17.01.2.01.06.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	400,000	0	0.00	0.00	400,000
2.17.01.2.01.06.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan	2,400,000	2,400,000	100.00	100.00	0
2.17.01.2.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,899,000	900,000	11.39	0.00	6,999,000
2.17.01.2.01.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	454,000	0	0.00	0.00	454,000
2.17.01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	295,000	0	0.00	0.00	295,000
2.17.01.2.01.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak	250,000	0	0.00	0.00	250,000
2.17.01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	900,000	900,000	100.00	10.00	0
2.17.01.2.01.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	6,000,000	0	0.00	0.00	6,000,000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar

2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,874,571,847	4,489,846,223	92.11	92.11	384,725,624
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	4,505,851,847	4,163,359,723	92.40	92.40	342,492,124
2.17.01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja gaji pokok PNS	1,790,492,964	1,713,556,919	95.70	95.70	76,936,045
2.17.01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja tunjangan keluarga PNS	146,527,000	134,133,826	91.54	91.54	12,393,174
2.17.01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja tunjangan jabatan PNS	191,930,000	174,580,000	90.96	90.96	17,350,000
2.17.01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja tunjangan fungsional umum PNS	43,763,000	44,005,000	100.55	100.55	-242,000
2.17.01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja tunjangan beras PNS	80,974,000	78,720,540	97.22	97.22	2,253,460
2.17.01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS	20,934,000	20,643,836	98.61	98.61	290,164
2.17.01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja pembulatan gaji PNS	52,000	19,148	36.82	36.82	32,852
2.17.01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja luran jaminan kesehatan PNS	218,364,000	133,294,305	61.04	61.04	85,069,695
2.17.01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja luran jaminan kecelakaan kerja PNS	13,102,000	5,511,151	42.06	42.06	7,590,849
2.17.01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja luran jaminan kematian PNS	39,306,000	9,095,191	23.14	23.14	30,210,809
2.17.01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS	1,960,406,883	1,849,799,807	94.36	94.36	110,607,076
2.17.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	263,160,000	251,000,000	95.38	95.38	12,160,000
2.17.01.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja honorarium penanggungjawab aban pengelola keuangan	227,400,000	227,400,000	100.00	100.00	0
2.17.01.2.02.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja honorarium pengadaan barang/jasa	12,960,000	2,700,000	20.83	20.83	10,260,000
2.17.01.2.02.02.5.1.01.03.08.0002	Belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan	22,800,000	20,900,000	91.67	91.67	1,900,000
2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	79,567,000	75,486,500	94.87	94.87	4,080,500
2.17.01.2.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	2,814,000	2,571,500	91.38	91.38	242,500
2.17.01.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	864,000	615,000	71.18	71.18	249,000
2.17.01.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak	289,000	0	0.00	0.00	289,000
2.17.01.2.01.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	3,600,000	300,000	8.33	8.33	3,300,000
2.17.01.2.01.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja jasa tenaga administrasi	72,000,000	72,000,000	100.00	100.00	0
2.17.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5,993,000	0	0.00	0.00	5,993,000
2.17.01.2.01.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	1,219,000	0	0.00	0.00	1,219,000
2.17.01.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	118,000	0	0.00	0.00	118,000
2.17.01.2.01.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak	56,000	0	0.00	0.00	56,000
2.17.01.2.01.04.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	600,000	0	0.00	0.00	600,000
2.17.01.2.01.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	4,000,000	0	0.00	0.00	4,000,000
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10,000,000	0	0.00	0.00	10,000,000
2.17.01.2.01.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	891,000	0	0.00	0.00	891,000
2.17.01.2.01.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	170,000	0	0.00	0.00	170,000
2.17.01.2.01.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak	98,000	0	0.00	0.00	98,000
2.17.01.2.01.05.5.1.02.01.01.0029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer	241,000	0	0.00	0.00	241,000
2.17.01.2.01.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	600,000	0	0.00	0.00	600,000
2.17.01.2.01.05.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	8,000,000	0	0.00	0.00	8,000,000
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10,000,000	0	0.00	0.00	10,000,000
2.17.01.2.01.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	1,195,000	0	0.00	0.00	1,195,000
2.17.01.2.01.07.5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	177,000	0	0.00	0.00	177,000
2.17.01.2.01.07.5.1.02.01.01.0026	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak	28,000	0	0.00	0.00	28,000
2.17.01.2.01.07.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	600,000	0	0.00	0.00	600,000
2.17.01.2.01.07.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	8,000,000	0	0.00	0.00	8,000,000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar

2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	106,265,416	104,745,518	98.57	98.57	1,519,898
2.17.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	106,265,416	104,745,518	98.57	98.57	1,519,898
2.17.01.2.01.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	1,877,000	1,250,500	66.62	66.62	626,500
2.17.01.2.01.06.5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	295,000	210,000	71.19	71.19	85,000
2.17.01.2.01.06.5.1.02.01.01.0029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer	241,000	90,000	37.34	37.34	151,000
2.17.01.2.01.06.5.1.02.02.01.0026	Belanja jasa tenaga administrasi	90,000,000	90,000,000	100.00	100.00	0
2.17.01.2.03.06.5.1.02.02.02.0005	Belanja luran jaminan kesehatan bagi Non ASN	12,718,416	12,131,376	95.38	95.38	587,040
2.17.01.2.03.06.5.1.02.02.02.0006	Belanja luran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	504,000	472,730	93.80	93.80	31,270
2.17.01.2.03.06.5.1.02.02.02.0007	Belanja luran jaminan kematian bagi Non ASN	630,000	590,912	93.80	93.80	39,088
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	165,861,800	145,738,642	87.87	114.70	20,123,158
2.17.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	43,200,000	43,200,000	100.00	100.00	0
2.17.01.2.05.02.5.1.02.01.01.0063	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	43,200,000	43,200,000	100.00	100.00	0
2.17.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	122,661,800	102,538,642	83.59	83.59	20,123,158
2.17.01.2.05.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	2,095,000	885,000	42.24	42.24	1,210,000
2.17.01.2.05.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	885,000	420,000	47.46	47.46	465,000
2.17.01.2.05.03.5.1.02.01.01.0029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer	241,000	90,000	37.34	37.34	151,000
2.17.01.2.05.03.5.1.02.02.01.0026	Belanja jasa tenaga administrasi	54,000,000	36,000,000	66.67	66.67	18,000,000
2.17.01.2.05.03.5.1.02.02.01.0027	Belanja jasa tenaga operator komputer	54,000,000	54,000,000	100.00	100.00	0
2.17.01.2.05.03.5.1.02.02.02.0005	Belanja luran jaminan kesehatan bagi Non ASN	10,080,000	10,080,000	100.00	100.00	0
2.17.01.2.05.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja luran jaminan kecelakaan bagi Non ASN	604,800	472,730	78.16	78.16	132,070
2.17.01.2.05.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja luran jaminan kematian bagi Non ASN	756,000	590,912	78.16	78.16	165,088
2.17.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
2.17.01.2.05.09.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
2.17.01.2.05.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	380,955,413	318,896,800	83.71	83.71	62,058,613
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,042,000	4,870,000	53.86	53.86	4,172,000
2.17.01.2.06.01.5.1.02.01.01.0031	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik	9,042,000	4,870,000	53.86	53.86	4,172,000
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	179,983,413.00	151,316,800	84.07	84.07	28,666,613.00
2.17.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	127,994,413	115,460,300	90.21	90.21	12,534,113.00
2.17.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	23,097,000	18,611,250	80.58	80.58	4,485,750.00
2.17.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer	570,000	280,250	49.17	49.17	289,750.00
2.17.01.2.06.02.5.1.02.01.01.0030	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor	28,322,000	16,965,000	59.90	59.90	11,357,000.00
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56,670,000	46,575,000	82.19	82.19	10,095,000
2.17.01.2.06.05.5.1.02.01.01.0026	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor -bahan cetak	56,670,000	46,575,000	82.19	82.19	10,095,000
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16,260,000	13,164,000	80.96	80.96	3,096,000
2.17.01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah	16,260,000	13,164,000	80.96	80.96	3,096,000
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	119,000,000	102,971,000	86.53	86.53	16,029,000
2.17.01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja perjalanan dinas biasa	119,000,000	102,971,000	86.53	0.00	16,029,000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar

2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24,999,000	20,416,000	81.67	81.67	4,583,000	
2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24,999,000.00	20,416,000	81.67	81.67	4,583,000.00	
2.17.01.2.07.06.5.2.02.05.01.0003	Belanja modal alat reproduksi (penggandaan)	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
2.17.01.2.07.06.5.2.02.10.01.0003	Belanja modal komputer unit lainnya	21,999,000	18,018,000	81.90	81.90	3,981,000	
2.17.01.2.07.06.5.2.02.10.02.0001	Belanja modal peralatan Mainframe	3,000,000	2,398,000	79.93	79.93	602,000	
2.17.01.2.07.06.5.2.02.10.02.0003	Belanja modal peralatan personal computer	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130,505,800	91,238,410	69.91	69.91	39,267,390	
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	130,505,800	91,238,410	69.91	69.91	39,267,390	
2.17.01.2.08.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	5,793,000	0	0.00	0.00	5,793,000	
2.17.01.2.08.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	1,062,000	0	0.00	0.00	1,062,000	
2.17.01.2.08.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak	3,969,000	0	0.00	0.00	3,969,000	
2.17.01.2.08.01.5.1.02.01.01.0029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer	241,000	0	0.00	0.00	241,000	
2.17.01.2.08.01.5.1.02.02.01.0026	Belanja jasa tenaga administrasi	54,000,000	49,500,000	91.67	91.67	4,500,000	
2.17.01.2.08.01.5.1.02.02.01.0032	Belanja jasa tenaga caraka	54,000,000	34,500,000	63.89	63.89	19,500,000	
2.17.01.2.08.01.5.1.02.02.01.0064	Belanja paket/pengiriman	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
2.17.01.2.08.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja luran jaminan kesehatan bagi Non ASN	10,080,000	6,250,368	62.01	62.01	3,829,632	
2.17.01.2.08.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja luran jaminan kecelakaan bagi Non ASN	604,800	439,130	72.61	72.61	165,670	
2.17.01.2.08.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja luran jaminan kematian bagi Non ASN	756,000	548,912	72.61	72.61	207,088	
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
2.17.01.2.09.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja tagihan telepon	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	325,814,400	236,386,361	72.55	72.55	89,428,039	
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55,536,800	40,455,150	72.84	72.84	15,081,650.00	
2.17.01.2.09.01.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan Bakar Pelumas	15,906,800	15,842,400	99.60	99.60	64,400.00	
2.17.01.2.09.01.5.1.02.01.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	1,000,000	957,750	95.78	95.78	42,250.00	
2.17.01.2.09.01.5.1.02.01.01.0036	Belanja Pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor - kendaraan bermotor penumpang	38,630,000	23,655,000	61.23	61.23	14,975,000.00	
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	189,967,600.00	115,912,211	61.02	61.02	74,055,389.00	
2.17.01.2.09.02.5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan-bahan dan pelumas	71,957,600	70,418,400	97.86	97.86	1,539,200.00	
2.17.01.2.09.02.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	6,200,000	4,636,811	74.79	74.79	1,563,189	
2.17.01.2.09.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor - kendaraan bermotor penumpang	100,890,000	34,670,000	34.36	34.36	66,220,000	
2.17.01.2.09.02.5.1.02.01.01.0038	Belanja Pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor - kendaraan bermotor beroda dua	10,920,000	6,187,000	56.66	56.66	4,733,000	
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35,310,000	35,019,000	99.18	99.18	291,000	
2.17.01.2.09.06.5.1.02.03.02.0115	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor -alat reproduksi (penggandaan)	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
2.17.01.2.09.06.5.1.02.03.02.0121	Belanja pemeliharaan alat kantor dan alat rumah tangga-alat Pendingin	6,710,000	6,710,000	100.00	100.00	0	
2.17.01.2.09.06.5.1.02.03.02.0405	Belanja pemeliharaan komputer -komputer unit-personal computer	18,250,000	18,146,000	99.43	99.43	104,000	
2.17.01.2.09.06.5.1.02.03.02.0411	Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer lainnya	10,350,000	10,163,000	98.19	98.19	187,000	
2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45,000,000	45,000,000	100.00	100.00	0	
2.17.01.2.09.10.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa tenaga kebersihan	45,000,000	45,000,000	100.00	100.00	0	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar

2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	3,262,607,600	2,946,534,123	90.31	90.31	316,073,477	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah/Kabupaten Kota	3,262,607,600	2,946,534,123	90.31	90.31	316,073,477	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten /Kota	1,073,722,000	944,640,000	87.98	87.98	129,082,000	
2.17.03.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	9,060,000	6,585,000	72.68	72.68	2,475,000	
2.17.03.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	2,360,000	1,935,000	81.99	81.99	425,000	
2.17.03.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak	280,000	0	0.00	0.00	280,000	
2.17.03.2.01.01.5.1.02.01.01.0029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer	482,000	180,000	37.34	37.34	302,000	
2.17.03.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	139,700,000	136,200,000	97.49	97.49	3,500,000	
2.17.03.2.01.01.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan	29,200,000	29,200,000	100.00	100.00	0	
2.17.03.2.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan dinas paket meeting dalam kota	892,640,000	770,540,000	86.32	86.32	122,100,000	
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2,188,885,600	2,001,894,123	91.46	91.46	186,991,477	
2.17.03.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	9,597,800	7,721,500	80.45	80.45	1,876,300	
2.17.03.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	1,947,000	1,218,000	62.56	62.56	729,000	
2.17.03.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak	25,112,000	22,229,900	88.52	88.52	2,882,100	
2.17.03.2.01.02.5.1.02.01.01.0029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer	228,000	106,000	46.49	46.49	122,000	
2.17.03.2.01.02.5.1.02.01.01.0035	Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cenderamata	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
2.17.03.2.01.02.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	1,560,000	0	0.00	0.00	1,560,000	
2.17.03.2.01.02.5.1.02.01.01.0064	Belanja pakaian dinas lapangan (PDL)	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
2.17.03.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	283,600,000	279,400,000	98.52	98.52	4,200,000	
2.17.03.2.01.02.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan	40,200,000	40,200,000	100.00	100.00	0	
2.17.03.2.01.02.5.1.02.02.01.0006	Honorarium penyuluhan dan pendampingan	26,000,000	26,000,000	100.00	100.00	0	
2.17.03.2.01.02.5.1.02.02.01.0026	Belanja jasa tenaga administrasi	54,000,000	54,000,000	100.00	100.00	0	
2.17.03.2.01.02.5.1.02.02.01.0027	Belanja jasa tenaga operator komputer	54,000,000	54,000,000	100.00	100.00	0	
2.17.03.2.01.02.5.1.02.02.02.0005	Belanja luran jaminan kesehatan bagi Non ASN	10,080,000	9,375,552	93.01	93.01	704,448	
2.17.03.2.01.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja luran jaminan kecelakaan bagi Non ASN	604,800	567,276	93.80	93.80	37,524	
2.17.03.2.01.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja luran jaminan kematian bagi Non ASN	756,000	709,095	93.80	93.80	46,905	
2.17.03.2.01.02.5.1.02.02.04.0123	Belanja sewa alat rumah tangga lainnya (Home Use)	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
2.17.03.2.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja perjalanan dinas biasa	34,000,000	25,966,800	76.37	76.37	8,033,200	
2.17.03.2.01.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan dinas paket meeting dalam kota	1,647,200,000	1,480,400,000	89.87	89.87	166,800,000	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar

2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	1,770,571,800	1,552,215,923	87.67	87.67	218,355,877	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	1,770,571,800	1,552,215,923	87.67	87.67	218,355,877	
2.17.04.2.01.02	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	929,855,800	806,538,923	86.74	86.74	123,316,877	
2.17.04.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	8,044,000	5,791,000	71.99	71.99	2,253,000	
2.17.04.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	1,062,000	756,000	71.19	71.19	306,000	
2.17.04.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak	168,000	0	0.00	0.00	168,000	
2.17.04.2.01.01.5.1.02.01.01.0029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer	241,000	90,000	37.34	37.34	151,000	
2.17.04.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	8,640,000	0	0.00	0.00	8,640,000	
2.17.04.2.01.01.5.1.02.01.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	114,300,000	99,150,000	86.75	86.75	15,150,000	
2.17.04.2.01.01.5.1.02.01.01.0004	Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan	16,200,000	14,400,000	88.89	88.89	1,800,000	
2.17.04.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja jasa tenaga administrasi	108,000,000	108,000,000	100.00	100.00	0	
2.17.04.2.01.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja luran jaminan kesehatan bagi Non ASN	10,080,000	9,375,552	93.01	93.01	704,448	
2.17.04.2.01.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja luran jaminan kecelakaan bagi Non ASN	604,800	567,276	93.80	93.80	37,524	
2.17.04.2.01.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja luran jaminan kematian bagi Non ASN	756,000	709,095	93.80	93.80	46,905	
2.17.04.2.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan dinas paket meeting dalam kota	661,760,000	567,700,000	85.79	85.79	94,060,000	
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	840,716,000	745,677,000	88.70	88.70	95,039,000	
2.17.04.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	8,303,000	6,177,000	74.39	74.39	2,126,000	
2.17.04.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	1,475,000	714,000	48.41	48.41	761,000	
2.17.04.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak	210,000	0	0.00	0.00	210,000	
2.17.04.2.01.02.5.1.02.01.01.0029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer	228,000	106,000	46.49	0.00	122,000	
2.17.04.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	114,300,000	111,500,000	97.55	97.55	2,800,000	
2.17.04.2.01.02.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan	16,200,000	14,400,000	88.89	88.89	1,800,000	
2.17.04.2.01.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan dinas paket meeting dalam kota	700,000,000	612,780,000	87.54	87.54	87,220,000	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar

2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1,382,456,000	1,241,273,000	89.79	89.79	141,183,000	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,382,456,000	1,241,273,000	89.79	89.79	141,183,000	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1,382,456,000	1,241,273,000	89.79	89.79	141,183,000	
2.17.05.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	19,630,000	17,017,500	86.69	86.69	2,612,500	
2.17.05.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	2,596,000	1,848,000	71.19	71.19	748,000	
2.17.05.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak	630,000	607,500	96.43	96.43	22,500	
2.17.05.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa, Acara dan Panitia	203,200,000	197,600,000	97.24	97.24	5,600,000	
2.17.05.2.01.01.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan	33,600,000	33,600,000	100.00	100.00	0	
2.17.05.2.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan dinas paket meeting dalam kota	1,122,800,000	990,600,000	88.23	88.23	132,200,000	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2,385,219,200	2,089,847,550	87.62	87.62	295,371,650	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2,385,219,200	2,089,847,550	87.62	87.62	295,371,650	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2,385,219,200	2,089,847,550	87.62	87.62	295,371,650	
2.17.06.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	11,546,200	10,190,500	88.26	88.26	1,355,700	
2.17.06.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	3,009,000	2,142,000	71.19	71.19	867,000	
2.17.06.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak	3,630,000	0	0.00	0.00	3,630,000	
2.17.06.2.01.01.5.1.02.01.01.0029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer	964,000	360,000	37.34	37.34	604,000	
2.17.06.2.01.01.5.1.02.01.01.0064	Belanja pakaian dinas lapangan (PDL)	8,720,000	8,720,000	100.00	100.00	0	
2.17.06.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa, Acara dan Panitia	301,300,000	299,300,000	99.34	99.34	2,000,000	
2.17.06.2.01.01.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan	62,000,000	48,100,000	77.58	77.58	13,900,000	
2.17.06.2.01.01.5.1.02.02.01.0006	Honorarium penyuluhan dan pendampingan	45,000,000	45,000,000	100.00	100.00	0	
	Belanja sewa alat rumah tangga lainnya (Home Use)	117,750,000	111,531,750	#DIV/0!	94.72	6,218,250	
2.17.06.2.01.01.5.1.02.02.05.0037	Belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya	195,000,000	195,000,000	100.00	100.00	0	
2.17.06.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja perjalanan dinas biasa	267,000,000	143,933,300	53.91	53.91	123,066,700	
2.17.06.2.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan dinas paket meeting dalam kota	1,369,300,000	1,225,570,000	89.50	89.50	143,730,000	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar

2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3,905,410,250	3,332,796,008	85.34	85.34	572,614,242	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	3,905,410,250	3,332,796,008	85.34	85.34	572,614,242	
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1,502,709,000	1,284,511,958	85.48	78.74	218,197,042	
2.17.07.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	18,921,000	16,161,000	85.41	85.41	2,760,000	
2.17.07.2.01.01.5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	3,481,000	2,478,000	71.19	71.19	1,003,000	
2.17.07.2.01.01.5.1.02.01.01.0026	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak	5,379,000	2,799,500	52.04	52.04	2,579,500	
2.17.07.2.01.01.5.1.02.01.01.0029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer	114,000	53,000	46.49	46.49	61,000	
2.17.07.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	10,080,000	7,920,000	78.57	78.57	2,160,000	
2.17.07.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembaw a,Acara dan Panitia	169,300,000	160,900,000	95.04	95.04	8,400,000	
2.17.07.2.01.01.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan	27,300,000	25,200,000	92.31	92.31	2,100,000	
2.17.07.2.01.01.5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	26,000,000	26,000,000	100.00	100.00	0	
2.17.07.2.01.01.5.1.02.02.01.0026	Belanja jasa tenaga administrasi	54,000,000	54,000,000	100.00	100.00	0	
2.17.07.2.01.01.5.1.02.02.01.0027	Belanja jasa tenaga operator komputer	36,000,000	36,000,000	100.00	100.00	0	
2.17.07.2.01.02.5.1.02.02.02.0005	Belanja luran jaminan kesehatan bagi Non ASN	8,400,000	6,641,016	79.06	79.06	1,758,984	
2.17.07.2.01.02.5.1.02.02.02.0006	Belanja luran jaminan kecelakaan bagi Non ASN	504,000	472,730	93.80	93.80	31,270	
2.17.07.2.01.02.5.1.02.02.02.0007	Belanja luran jaminan kematian bagi Non ASN	630,000	590,912	93.80	93.80	39,088	
2.17.07.2.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja perjalanan dinas biasa	26,000,000	19,272,800	74.13	74.13	6,727,200	
2.17.07.2.01.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan dinas paket meeting dalam kota	941,600,000	824,800,000	87.60	87.60	116,800,000	
2.17.07.2.01.01.5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	7,500,000	0	0.00	0.00	7,500,000	
2.17.07.2.01.01.5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	60,000,000	0	0.00	0.00	60,000,000	
2.17.07.2.01.01.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	7,500,000	7,074,000	94.32	94.32	426,000	
2.17.07.2.01.01.5.2.05.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Terwujud Lainnya	100,000,000	94,149,000	94.15	94.15	5,851,000	
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	669,311,250	549,376,250	82.08	82.08	119,935,000	
2.17.07.2.01.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	7,330,000	5,469,500	74.62	74.62	1,860,500	
2.17.07.2.01.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	1,593,000	1,134,000	71.19	71.19	459,000	
2.17.07.2.01.02.5.1.02.01.01.0026	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak	789,000	752,250	95.34	95.34	36,750	
2.17.07.2.01.02.5.1.02.01.01.0029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer	482,000	180,000	37.34	37.34	302,000	
2.17.07.2.01.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	207,277,250	118,740,500	57.29	57.29	88,536,750	
2.17.07.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembaw a,Acara dan Panitia	96,000,000	96,000,000	100.00	100.00	0	
2.17.07.2.01.02.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan	16,800,000	16,800,000	100.00	100.00	0	
2.17.07.2.01.02.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan dinas paket meeting dalam kota	339,040,000	310,300,000	91.52	91.52	28,740,000	
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	192,204,000	103,945,800	54.08	54.08	88,258,200	
2.17.07.2.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	1,981,000	1,097,000	55.38	55.38	884,000	
2.17.07.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	590,000	420,000	71.19	71.19	170,000	
2.17.07.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak	42,000	0	0.00	0.00	42,000	
2.17.07.2.01.03.5.1.02.01.01.0029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer	241,000	90,000	37.34	37.34	151,000	
2.17.07.2.01.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembaw a,Acara dan Panitia	12,000,000	12,000,000	100.00	100.00	0	
2.17.07.2.01.03.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan	4,150,000	4,150,000	100.00	100.00	0	
2.17.07.2.01.03.5.1.02.02.01.0066	Belanja registrasi/keanggotaan	120,000,000	40,588,800	33.82	33.82	79,411,200	
2.17.07.2.01.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan dinas paket meeting dalam kota	53,200,000	45,600,000	85.71	85.71	7,600,000	
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1,541,186,000	1,394,962,000	90.51	90.51	146,224,000	
2.17.07.2.01.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	16,736,000	14,284,500	85.35	85.35	2,451,500	
2.17.07.2.01.04.5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	2,360,000	1,680,000	71.19	71.19	680,000	
2.17.07.2.01.04.5.1.02.01.01.0026	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak	630,000	607,500	96.43	96.43	22,500	
2.17.07.2.01.04.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembaw a,Acara dan Panitia	228,600,000	223,350,000	97.70	97.70	5,250,000	
2.17.07.2.01.04.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan	51,900,000	51,900,000	100.00	100.00	0	
2.17.07.2.01.03.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan dinas paket meeting dalam kota	1,240,960,000	1,103,140,000	88.89	88.89	137,820,000	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar

2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2,608,528,476	2,174,606,437	83.37	83.37	433,922,039
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2,608,528,476	2,174,606,437	83.37	83.37	433,922,039
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	2,608,528,476	2,174,606,437	83.37	80.20	433,922,039
2.17.08.2.01.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	14,876,800	10,653,000	71.61	71.61	4,223,800
2.17.08.2.01.03.5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	2,950,000	2,100,000	71.19	71.19	850,000
2.17.08.2.01.03.5.1.02.01.01.0026	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak	4,451,000	2,846,500	63.95	63.95	1,604,500
2.17.08.2.01.03.5.1.02.01.01.0029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer	228,000	0	0.00	0.00	228,000
2.17.08.2.01.01.5.1.02.01.01.0030	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor	15,822,000	10,332,000	65.30	65.30	5,490,000
2.17.08.2.01.01.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan minuman rapat	18,000,000	15,600,000	86.67	86.67	2,400,000
2.17.08.2.01.01.5.1.02.01.01.0064	Belanja pakaian dinas lapangan (PDL)	8,720,000	8,720,000	100.00	100.00	0
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa a, Acara dan Panitia	103,100,000	101,350,000	98.30	98.30	1,750,000
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan	64,450,000	52,450,000	81.38	81.38	12,000,000
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.01.0007	Honorarium rohaniawan	400,000	400,000	100.00	100.00	0
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.01.0026	Belanja jasa tenaga administrasi	36,000,000	36,000,000	100.00	100.00	0
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.01.0027	Belanja jasa tenaga operator komputer	36,000,000	36,000,000	100.00	100.00	0
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.01.0028	Belanja jasa tenaga pelayanan umum	54,000,000	54,000,000	100.00	100.00	0
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.01.0030	Belanja jasa tenaga kebersihan	66,000,000	66,000,000	100.00	100.00	0
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.01.0031	Belanja jasa tenaga keamanan	66,000,000	64,000,000	96.97	96.97	2,000,000
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.01.0037	Belanja jasa juri perlombaan/pertandingan	24,200,000	24,200,000	100.00	100.00	0
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	30,000,000	22,313,000	74.38	74.38	7,687,000
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	259,993,476	151,508,555	58.27	58.27	108,484,921
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.02.0005	Belanja luran jaminan kesehatan bagi Non ASN	6,720,000	6,250,368	93.01	93.01	469,632
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.02.0006	Belanja luran jaminan kecelakaan bagi Non ASN	403,200	378,184	93.80	93.80	25,016
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.02.0007	Belanja luran jaminan kematian bagi Non ASN	504,000	472,730	93.80	93.80	31,270
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.04.0123	Belanja sewa alat rumah tangga lainnya (Home Use)	25,010,000	24,880,000	99.48	99.48	130,000
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.05.0012	Belanja sewa bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar	200,000,000	168,000,000	84.00	84.00	32,000,000
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.05.0037	Belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya	325,000,000	324,280,000	99.78	99.78	720,000
2.17.08.2.01.01.5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur Jasa desain arsitektural	350,000,000	340,044,100	97.16	97.16	9,955,900
2.17.08.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja perjalanan dinas biasa	232,000,000	154,428,000	66.56	66.56	77,572,000
2.17.08.2.01.01.5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan dinas paket meeting dalam kota	481,200,000	414,900,000	86.22	86.22	66,300,000
2.17.08.2.01.01.5.1.02.05.01.0001	Belanja hadiah yang bersifat perlombaan	82,500,000	82,500,000	100.00	100.00	0
2.17.08.2.01.01.5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal alat angkutan darat tak bermotor lainnya	100,000,000	0	0.00	0.00	100,000,000

3.8. Inovasi dan Penghargaan

a. INOVASI DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA MAKASSAR

APLIKASI SI DATU MICIKO (SISTEM INFORMASI DATA USAHA MIKRO, KECIL DAN KOPERASI) DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA MAKASSAR

Data memiliki potensi yang signifikan dalam memberikan manfaat baik bagi pemerintah atau masyarakat. Sinergi antara pemerintah sebagai penyedia data, dan masyarakat sebagai penggunaannya akan terbangun ketika data pemerintah dapat diakses dan di monitoring dengan mudah dan dapat digunakan kembali dengan tujuan inovasi dan kolaborasi.

Tujuan berinovasi bukan lain agar terwujudnya efektifitas dan efisiensi dalam suatu pekerjaan meminimalkan anggaran yang di keluarkan dan mendapatkan hasil diharapkan hal itu tercermin dalam pagu dana yang dialokasikan untuk kegiatan pembuatan dan implementasi aplikasi si datu miciko (Sistem Informasi Data Usaha Mikro, Kecil Dan Koperasi) Kota Makassar adalah Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) termasuk PPN, yang berasal dari APBD T.A 2021. HPS untuk kegiatan Belanja Jasa Konsultansi yaitu Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Selain dari efisiensi anggaran juga sangat menunjang kualitas kebijakan pemerintah, data merupakan komponen penting dalam pengambilan keputusan. Melalui inisiatif Satu Data, efektivitas dan efisiensi dari tata kelola data pemerintah dapat ditingkatkan sehingga data tersebut menjadi lebih akurat. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dari setiap instansi akan bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dan pengelola utama data internal. Satu Data juga mendorong partisipasi publik yang lebih besar dalam pemerintahan. Data memberikan akses kepada masyarakat untuk menggunakan data sesuai dengan kebutuhannya dan berkontribusi pada peningkatan pelayanan publik. Data publik adalah sumber utama untuk inovasi sosial dan pertumbuhan ekonomi. Satu Data memberikan peluang kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam mengevaluasi dan berinovasi untuk peningkatan pelayanan publik. Pelaku usaha dapat menggunakan data terbuka untuk lebih memahami potensi pasar sehingga dapat menciptakan produk berdasarkan data. Melihat bagaimana pentingnya sebuah data untuk di kelola secara

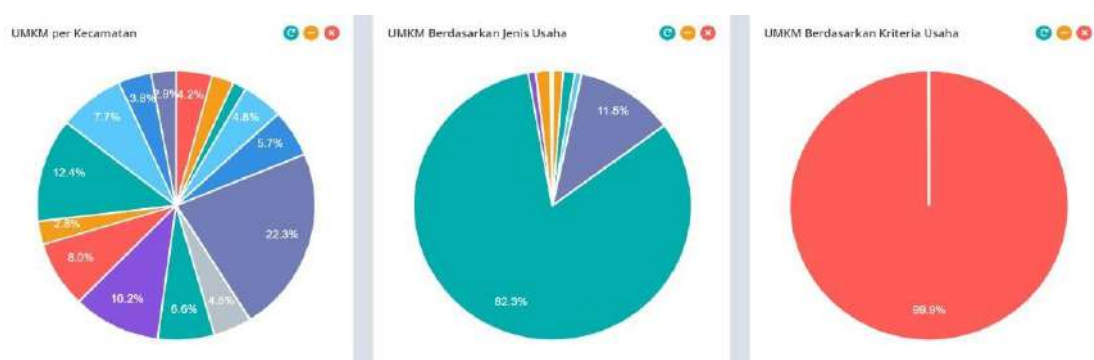
terorganisir demi pengambilang keputusan mengenai inovasi dan kolaborasi apa yang akan di capai pada masa yang akan datang untuk mengetahui jumlah pelaku usaha, klasifikasi pelaku usaha, penghasilan pelaku usaha di butuhkan data yang akurat, terorganisir dan terpercaya, data-data tersebut sangatlah penting untuk pemerintah dan masyarakat, salah satu contoh dengan adanya bantuan Covid-19 pada pelaku usaha UMKM yang baru-baru ini, banyaknya bantuan yang kurang tepat sasaran dan kesulitan pemerintah mendeteksi pelaku-pelaku usaha yang ada di daerahnya merupakan sebuah masalah yang harus segera di tuntaskan.

➤ **Tujuan si datu miciko adalah:**

- a) Membuat sumberdaya informasi yang lebih terorganisir dan mengidentifikasi sumberdaya informasi yang ada di lingkup Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar dengan mudah;
- b) Mengelompokkan Jenis UMKM yang serupa;
- c) Memberikan informasi mengenai Toko, Produk pada pelaku UMKM di Kota Makassar;
- d) Memberikan informasi lokasi UMKM;
- e) Memberikan data yang jelas antara Koperasi dan UMKM.

sasaran dari tujuan diatas adalah untuk mengintegrasikan data dan informasi mengenai pelaku UMKM dan Koperasi yang ada di lingkup Pemerintah Kota Makassar yang tepat mutu, tepat waktu, tertib administrasi dan keuangan.

Tampilan layer aplikasi Sidatu Miciko



Pada tahun pertama pengelolaan aplikasi Sidatu Miciko sudah mampu menampilkan hal-hal makro berupa informasi terkait data koperasi menurut jenis koperasi, data koperasi perihal koperasi yang memiliki website, data koperasi yang memiliki akun facebook, data

koperasi yang memiliki Instagram, UMKM di suatu wilayah (kecamatan), UMKM berdasarkan jenis usaha, UMKM berdasarkan kriteria usaha.

Kedepannya sidatu miciko akan terus di sempurnakan sebagai induk informasi koperasi dan UMKM di Kota Makassar dengan memberikan informasi detail seperti jumlah, nama pemilik, kriteria usaha, serta progress usaha di tingkat kelurahan yang di harapkan mampu menjadi wadah inovasi, jaringan usaha, dan kolaborasi baik untuk konsumsi warga Kota Makassar secara umum maupun warga luar Kota Makassar dan dimana Isdatu Miciko berperan sebagai navigasi dalam berkoperasi dan berUMKM di wilayah Kota Makassar.

b. PENGHARGAAN (NATAMUKTI)

Penghargaan Natamukti merupakan apresiasi bagi Pemerintah daerah kabupaten/kota yang sukses dalam membangun tata kelola dan kemandirian UMKM di daerahnya, berhasil dalam mempromosikan UMKM lokal, mendorong peningkatan kualitas produk UMKM lokal, serta membangun ekosistem UMKM di daerahnya. keberhasilan Pemerintah Kota Makassar dalam membangun dan memperkuat sektor UMKM tak lepas dari upaya Pemerintah Kota Makassar dalam mendorong munculnya produk unggulan di setiap wilayah melalui perorangan maupun kelompok usaha yang lebih tepatnya di wilayah Lorong berupa kelompok wirausaha bersama. Atas kerja kerja tersebut banyak bermunculan produk UMKM berkualitas dari setiap rumah tangga maupun kelompok yang memiliki daya saing. Berbagai program penguatan seperti pelatihan manajemen keuangan hingga teknik pemasaran dan packaging menjadikan produk UMKM kota makassar dapat berkembang dengan sangat baik. Pemerintah kota makassar terus mendorong sektor UMKM untuk terus tumbuh dan maju, terlebih lagi di masa Covid-19 saat ini. Sektor UMKM di masa pandemi terbukti bisa tetap bertahan dan menjadi penguat ekonomi nasional. Dalam menjalankan upaya tersebut Pemerintah Kota Makassar salah satunya melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar berkomitmen untuk terus memperkuat sektor industri kecil menengah yang berdaya saing dan unggul, untuk kesejahteraan masyarakat. pemberdayaan pelaku UMKM masuk rencana kerja utama yang disusun Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Kegiatan pemberdayaan berupa pelatihan keterampilan, teknik desain, pemasaran, dan peningkatan sumber daya manusia untuk wirausaha baru atau pemula.

Pemberdayaan pelaku UMKM menjadi bagian dari program prioritas Pemerintah Kota Makassar dalam pemulihan ekonomi. Program tersebut sesuai apa yang digaungkan Wali Kota dan Wakil Walikota Makassar . Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar juga

memfasilitasi pelaku UMKM ke pihak-pihak lainnya seperti Diskop Sulsel dan Kementerian Koperasi dan UKM maupun ke pihak swasta agar pelaku UMKM di Makassar bisa terakomodasi untuk memperoleh Bantuan Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM).

UMKM terbukti berkontribusi dalam peningkatan perekonomian di Indonesia khususnya Kota Makassar. Perekonomian di Kota Makassar menunjukkan bahwa kegiatan UMKM merupakan usaha yang konsisten dan mampu berkembang. Fakta menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang diciptakan oleh kelompok UMKM tersebut jauh lebih banyak dibandingkan tenaga kerja yang bisa diserap oleh usaha besar. Selain sebagai salah satu alternatif penyediaan lapangan kerja baru juga sebagai muara bagi hasil-hasil bumi yang ada di sekitar Kota Makassar.

Berkat perhatian dan konsistensi Pemerintah Kota Makassar UMKM berperan baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan sebagai program pengentasan kemiskinan maupun penyerapan tenaga kerja terlebih di masa pandemi sekarang ini. Seperti diketahui bahwa UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UMKM hanya menggunakan pihak-pihak tertentu saja, jadi dalam pembinaannya memiliki tantangan tersendiri. Adapun Kemudahan dalam membina UKM di Kota Makassar dimana UKM identik dengan struktur pengelolaannya yang sangat sederhana baik jumlah personil maupun sumber daya lainnya, inilah yang di tangkap oleh Pemerintah Kota Makassar sehingga melakukan terobosan-terobosan penopang berupa memfasilitasi kemudahan sarana dan prasarana dan pengembangan SDM yang salah satunya terwujud melalui program Kanrerong dan beberapa titik-titik fasum yang di Kelola oleh Pemerintah Kota Makassar yang tersebar di seluruh kelurahan dan kecamatan Kota Makassar, memudahkan legalitas para pelaku UKM baik secara administrasi kelurahan maupun di tingkat kota, dan memfasilitasi para pelaku UKM dalam membuka jaringan permodalan.

Dikarenakan beberapa alasan di atas Kementrian Koperasi dan UMKM mengapresiasi Pemerintah Kota Makassar dengan memberikan penghargaan Natamukti karena Pemerintah Kota Makassar di pandang mampu menggerakkan roda perekonomian , usaha mikro, kecil dan menengah dan mampu menciptakan siklus yang kondusif bagi UMKM.

Jumlah UMKM			Jumlah Ijin Usaha		
2020	2021	Pertumbuhan	2020	2021	Pertumbuhan
13.277	39.413	26.136	370	586	216

Adapun Langkah Kongkrit yang di lakukan Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Koperasi adalah:

1. Pemasaran Produk UKM dengan memanfaatkan ICT;
2. Memperkuat jaringan UKM baik pra Produksi (Modal usaha, sarana usaha, bahan baku) maupun Pasca Produksi (packaging, pemasaran);
3. Peningkatan SDM selaku pengelola UKM (manajemen keuangan, dan jaringan kerja);
4. Peningkatan inovasi berbasis teknologi.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasidan UKM Kota Makassar disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatankegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) sasaran strategis, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja utama. Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar pada Tahun Anggaran 2021.

Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar telah berhasil melaksanakan berbagai kegiatan untuk turut mendukung percepatan pemulihan ekonomi di Kota Makassar. Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar terus membangun momentum dan komitmen terhadap visi dan misi yang bersifat strategis serta terus mendorong Koperasi dan UMKM mengembangkan produk dan meningkatkan akses pasar yang lebih besar dan bangkit dari keterpurukan ekonomi.

Kinerja dicapai jauh dari target yang ditetapkan tetapi berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Hasil Laporan Kinerja Dinas Koperasidan UKM Kota Makassar dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana.
2. Dari analisis 3 (tiga) sasaran, terdapat 7 (tujuh) indikator sasaran seluruhnya merupakan indikator kinerja utama sebagai tolak ukur.

Walaupun belum semua indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan karena wabah Pandemi Covid19 Sehingga nilai rata-rata capaian kinerja indikator mengalami

penurunan kinerja dengan target sebesar 62.68% masuk dalam Kategori Rendah. Disesuaikan capaian tabel 2.1.1

A. Langkah-langkah ke depan yang perlu diambil

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan LAKIP dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam meningkatkan kinerja sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti leadership, sumberdaya manusia yang berkompetensi, manajemen, sarana prasarana dan fungsi pengawasan. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM dan yang perlu dibenahi pada tahun kedepan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pengelolaan pelayanan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang ada di Kota Makassar.
2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja (PK).
3. Dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Koperasidan UKM Kota Makassar disamping faktor-faktor tersebut di atas kedepannya wajib mempertimbangkan perencanaan kegiatan yang lebih berkualitas, sinergitas pembangunan dibidang koperasi dan UMKM dengan Dinas Kabupaten/Kota serta dukungan anggaran dari APBD yang proposional.

Laporan Kinerja Dinas Koperasidan UKM Kota Makassar Tahun 2021 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.